

1 2 3 KAMPANYE DIMULAI... JANGAN SALING SERANG!



**PRABOWO-
GIBRAN
MENATAP
KEMENANGAN**

**GANJAR-
MAHFUD
WASPADA
DRAKOR
POLITIK**

**RESTU UNTUK
KHOFIFAH INDAR
PARAWANSA
LANJUTKAN
PERIODE KEDUA**

**SUMSEL
SUKSES
KENDALIKAN
ANGKA
STUNTING**

**TIMBAL
BALIK
EKONOMI
DAN
KEAMANAN**



Rp75.000,-

info indonesia inovasi untuk negeri



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**



Alamat REDAKSI/IKLAN/pemasaran: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

• TELP 021-791 96781 • FAX 021-791 96786

TABLOID REFERENSI PEMILU 2024



TERBIT
TIAP
HARI
SENIN

EDISI
BULAN
NOVEMBER
2023

DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

Tibalah kita di lini masa periode kampanye Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif (DPRD kabupaten-kota, provinsi, DPR, serta DPD) yang terjadwal mulai 28 November 2023 berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berlanjut kelak dengan kampanye pemilihan kepala daerah.



36

INFO SUMSEL

Menjadi yang terbaik sudah tekad penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni dengan menargetkan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 di Sumsel menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia.



46

INFO PILKADA

I Wayan Koster merencanakan untuk bersantai sejenak di desanya setelah melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Bali.



64

INFO NASIONAL

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar tiga operasi khusus di Tahun Politik 2023-2024. Penting bagi segenap komponen bangsa untuk mencapai saling pengertian mengenai tiga operasi ini.

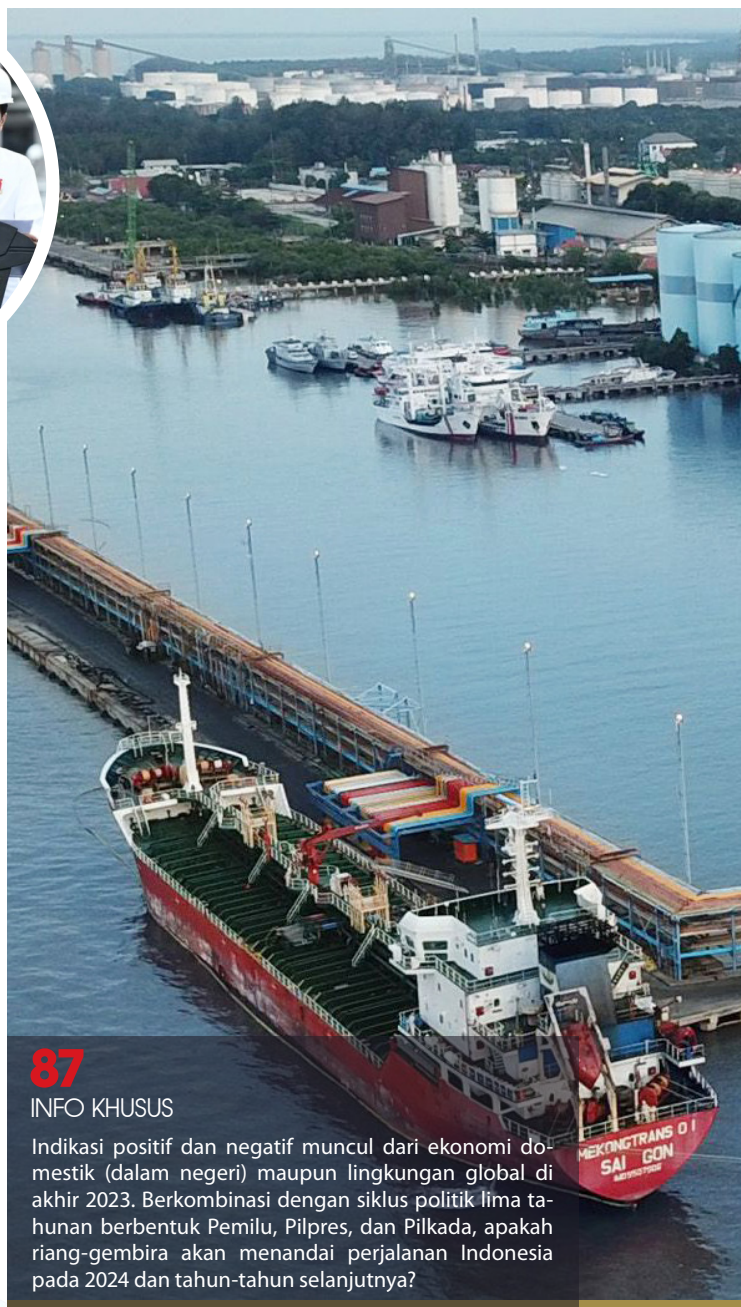


74

INFO ISTANA

Sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Barat mulai diresmikan pembangunan maupun operasionalnya oleh Presiden Joko Widodo di akhir November 2023.

Proyek-proyek tersebut diharapkan bisa membawa manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat di Timur Indonesia.



87

INFO KHUSUS

Indikasi positif dan negatif muncul dari ekonomi domestik (dalam negeri) maupun lingkungan global di akhir 2023. Berkombinasi dengan siklus politik lima tahunan berbentuk Pemilu, Pilpres, dan Pilkada, apakah riang-gembira akan menandai perjalanan Indonesia pada 2024 dan tahun-tahun selanjutnya?

3 DARI REDAKSI

20 OPINI

72 INFO KALTIM

86 KAJI

84

INFO CALEG

Manik Marganamahendra, mantan Ketua Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), kembali sebagai sorotan saat ia bersiap menjadi calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jakarta.

JADWAL

Pemilihan Kepala Daerah yang semula terjadwal pada November tampaknya akan dimajukan menjadi September 2024. Lebih dari sekadar usulan pemerintah (eksekutif) yang mengharapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat malah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi RUU Inisiatif DPR.

Ketua DPR Puan Maharani menyebut tiga fraksi menyampaikan pendapatnya. PKS menolak RUU Pilkada itu menjadi usulan inisiatif DPR. Sementara, PKB dan Demokrat menyetujui dengan catatan. "Bahwa ada tiga fraksi yang menyatakan, satu menolak, yaitu Fraksi PKS. Kemudian dari Demokrat menyatakan ada catatan dan dari PKB pun menyatakan ada catatan. Jadi tiga hal yang disampaikan, tiga fraksi. Satu menolak, dua ada catatan," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan ke-IX Tahun Sidang 2022-2023, Selasa, 21 November 2024.

Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzamil Yusuf, mewakili Fraksi PKS menyampaikan pandangan fraksinya. "Fraksi PKS menilai bahwa perubahan jadwal Pilkada dapat berdampak pada ketidaksiapan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan Pilkada, sebab rentang waktu Pilpres dan Pilkada yang terlalu dekat, terutama apabila Pilpres mengalami dua kali perputaran pemilihan," ujar Almuzzamil.

Almuzzamil juga menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan Pilkada menimbulkan banyak sekali kerugian baik bagi penyelenggara maupun peserta. Percepatan Pilkada dari November 2024 menjadi September 2024 dapat menimbulkan prasangka dan kegaduhan masyarakat sehingga mendorong ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu 2024.

Nah, soal prasangka dan kegaduhan masyarakat hendaknya dapat dengan mudah dihindari jika penjelasan yang masuk akal dan transparan sampai ke warga secara efektif dan efisien. Cara ini juga akan menghindari hal yang lebih buruk: kerusuhan sosial yang selalu saja melibatkan provokator.

Alasan yang paling masuk akal tentang percepatan Pilkada itu sudah dikemukakan oleh Mendagri M Tito Karnavian. "Adapun pilihan waktu pemungutan suara Pilkada serentak 2024 disarankan pada September 2024. Ini juga untuk pertimbangan bahwa ada waktu yang cukup sampai dengan proses sengketa sebelum 1 Januari 2025, ada waktu lebih kurang tiga bulan untuk menyelesaikan mulai dari proses untuk rekapitulasi dan pleno penentuan pemenang," kata Tito dalam rapat kerja (Raker) Komisi II DPR RI bersama KPU dan Bawaslu, Rabu malam, 20 September 2023.

Ringkas cerita, proses Pilkada harus selesai sebelum 1 Januari 2025. Itu adalah hari pertama tahun anggaran baru. Penggunaan anggaran tahun berjalan tentu saja harus selesai pada 31 Desember 2024. Atau mau melanggar kesepakatan yang kita buat sendiri: tata kelola penyelenggaraan negara yang baik? Good Governance. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

- TELP 021-791 96781
- FAX 021-791 96786

Twitter : @InfoIndonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.id

Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal **DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM:** Usman Rizal

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Zulfahmi Jamba **PEMIMPIN REDAKSI:** Gunawan Effendi **WAKIL PEMIMPIN**

REDAKSI: Rahmad Romli **REDAKTUR PELAKSANA:** Rusdiyono **REDAKTUR :** Rio Taufiq Adam, Melati Tagore, Irma Yani, Rusdiyono, Nina Erlina, Ega Tri Gustina, Rusdy Setiawan Putra **REPORTER:** Achmad Tirta Wahyuda, Anugrah Dany, Rifky Ilmi, Budi Prasetya, Ahmad Yani, Yuni Watiana, Mario Ananta, Rahmad KR, Iwan Fals, Heni Elsa Wulandari, Dedy Sagita, Nina Iskandar, Jifran, Nefri, Indra Hadi, Pahmi Ramadhan, Moehamad Moeslim, Sadam M, Hardi Aar, Reno, Aldi Rinaldi, M. Iqbal, Andyanto, M. Yadhi, Muhammad Fiqri, Muhammad Khaidir Boyke Parningotan Hutapea (Bekasi), Dian Taresa (Kalimantan Tengah), Zaki (Kalimantan Timur), Basri (Kalimantan Utara), Lalu Superman Ambakti (Nusa Tenggara Barat), Abu Bakar Usman (Kepulauan Bangka Belitung) **EDITOR & GRAFIS:** Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali **KEUANGAN:** Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI :** Nur Aisah **PENGEMBANGAN BISNIS:** RM Solehin, Zul Jamba **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar **BANK ACCOUNT:** A/N : PT. Wahana Multimedia, BCA : No Rek : 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



KAMPANYE

Tibalah kita di lini masa periode kampanye Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif (DPRD kabupaten-kota, provinsi, DPR, serta DPD) yang terjadwal mulai 28 November 2023 berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berlanjut kelak dengan kampanye pemilihan kepala daerah.



Hari H rangkaian pemilihan itu semuanya berlangsung pada 2024. Hari H Pilpres dan Pileg berlangsung serentak, terjadwal pada 14 Februari 2024. Sedangkan Hari H Pilkada untuk semua tingkatan kepala daerah berlangsung serentak pula berselang sekitar 10 bulan setelah Pilpres dan Pileg.

Dalam konteks politik dalam negeri, kita mengenal idiom mencuri start kampanye. Pengertiannya, para kandidat sudah berkampanye sebelum jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Namun, pengertian mencuri start itu sebenarnya menjadi buram karena salah satu pengertian kampanye ada-

Ambil contoh kasus pembentukan tim kampanye masing-masing pasangan calon Capres-Cawapres. Tentu saja susunan tim akan mempengaruhi (sedikit atau banyak) keputusan para pemilih ketika Hari H tiba. Demikian pula, kesiapan dalam pembentukan tim hingga susunan finalnya masuk ke KPU akan menjadi kampanye tersendiri bagi masing-masing pasangan calon Capres-Cawapres.

Apakah proses pembentukan dan susunan tim kampanye merupakan bagian dari kampanye? Dengan lugas dan mudah memang ya jawabnya. Apakah pembentukan tim yang melekat dengan kampanye paslon melanggar ketentuan KPU dan Undang-Undang Pemilu? Tentu saja tidak,

dan sasaran atau targetnya.

Jadi, akan lebih tepat menggunakan pengertian melanggar aturan kampanye KPU dibandingkan dengan mencuri start kampanye. Kalaupun dianggap memenuhi syarat melanggar peraturan KPU, hanya otoritas pemangku kebijakan pemilu -katakanlah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dapat membuat assessment atau penilaian pada awalnya.

Dalam perkembangan ingar-bingar menjelang masa kampanye versi KPU yang terjadwal pada 28 November misalnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto malah mengumumkan nama sejumlah tokoh yang akan diusung sebagai bakal calon gubernur (Cagub) pada Pemili-



lah upaya mempengaruhi keputusan (memilih) pada kelompok tertentu. Kampanye dapat berada dalam konteks pemilihan politik yang demokratis, malah dalam promosi atau sosialisasi produk dan jasa yang ditawarkan kepada kelompok atau segmen pasar tertentu. Dalam pemilihan politik segmen pasar sepadan dengan kelompok konstituen atau target elektoral.

Nah, dengan pengertian seperti itu, agak sulit membatasi kampanye berdasarkan jadwal resmi. Kampanye dapat berlangsung tanpa jadwal, 24 jam sehari, tujuh hari sepekan, dan seterusnya dari sisi pemilahan waktu.

Dengan pemahaman seperti ini maka mencuri start kampanye boleh dibilang kampanye negatif untuk melabel atau memberi cap buruk terhadap yang dituduh sebagai pencuri start kampanye.

Jadi, pengertian mencuri start kampanye adalah hal yang absurd, konyol, atau bertentangan dengan akal sehat. Terlebih jika melihat lini masa global bahwa umat manusia sudah memasuki masa Revolusi Industri IV yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Wujud kampanye tanpa henti dapat terlihat di media sosial berdasarkan pelaku kampanyenya

han Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Apakah yang dilakukan Airlangga itu kampanye? Tentu saja ya.

Tapi, apakah Airlangga mencuri start kampanye Pilkada? Yang menjawab ya tentu saja dapat menjadi bahan tertawaan

Nah, pengumuman Airlangga itu justru menunjukkan upaya menghindari stigma tentang politik uang atau mahar untuk kandidat calon kepala daerah. Dengan pengumuman itu, lebih sedikit kemungkinan Ketua Umum dan atau Partai Golkar meminta mahar kepada kadernya sendiri.

Baiklah, untuk Provinsi Banten,

Golkar akan mengusung mantan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany. "Kalau untuk Banten di sini ada Ibu Airin sekaligus ketua TKD (Tim Kampanye Daerah)," kata Airlangga saat konferensi pers usai pembekalan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 21 November 2023.

Kemudian di Jawa Barat, Golkar akan mengusung petahana Ridwan Kamil. Begitu juga di Jawa Timur, Golkar akan mengusung Khofifah Indar



Tapi, apakah Airlangga mencuri start kampanye Pilkada? Yang menjawab ya tentu saja dapat menjadi bahan tertawaan.

Parawansa untuk periode keduanya.

"Pak Ridwan Kamil di Jabar. Bu Khofifah Jawa Timur," kata Airlangga.

Sedangkan, untuk Pilgub DKI Jakarta, Golkar akan mengusung Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar. Kandidat ini sudah dikenal pernah menjadi Bupati Tangerang, Banten.

Namun Airlangga masih merahasiakan siapa yang akan diusung di Pilgub Jawa Tengah. Ia hanya memberikan bocoran sosoknya adalah anak muda. "Cagubnya nanti bacagubnya nanti pokoknya ada anak muda," katanya.

Pada kesempatan itu, Airlangga juga memperkenalkan mantan Kapolda Papua Paulus Waterpauw sebagai bakal calon gubernur Papua Barat. "Pak Paulus yang akan kita dukung untuk menjadi bakal calon di Papua Barat untuk gubernur," kata Ketua Umum Partai Golkar ini.

Dengan sendirinya Partai Golkar



sedang berkampanye menunjukkan politik terencana dan transparan dalam konteks Pilkada. Dengan segala kelebihan dan kekurangan, Partai Golkar tampak berusaha mempertahankan reputasinya sebagai partai politik berpengalaman sejak kelahirannya pada 1967.

Eh, apakah ini kampanye Partai

Golkar? Tentu saja bukan. Media massa memiliki koridor yang lebih ketat dalam memilih atau memilah konten. Jadi, apa yang dikemukakan di halaman ini dan selanjutnya merupakan informasi faktual, sesuatu yang mengurangi ketidakpastian berdasarkan himpunan fakta yang tersedia. •;

ANIES-MUHAIMIN ADALAH DWITUNGGAL

Seluruh calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 kini sudah mengantongi nomor urutnya masing-masing. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN dari Koalisi Perubahan mendapatkan nomor urut 01.





Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa dirinya dengan Anies Baswedan sangat senang karena mendapatkan nomor urut 01 di Pilpres 2024. Dia menyampaikan, nomor urut 01 sesuai dengan harapannya.

"Saya dan Mas Anies bersyukur dapat nomor 01," kata Cak Imin saat memberikan sambutannya di Kantor KPU, Selasa, 16 November 2023.

Wakil Ketua DPR RI itu pun mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memilihnya menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Dia meminta doa dan restu kepada rakyat Indonesia agar langkahnya bertarung di Pilpres 2024 berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

"Kalau ingin perubahan, ayo kuatkan nomor 01," kata Cak Imin.

Tidak hanya itu, Cak Imin juga mengajak kepada pendukungnya dan masyarakat luas untuk mengawal proses Pemilu 2024. Dia mengingatkan para penyelenggara Pemilu untuk tidak terlibat dalam politik praktis, apalagi memberi dukungan kepada salah satu calon tertentu.

"Tidak boleh ada wasit merangkap pemain. Tidak boleh ada kecurangan," tegas Cak Imin.

Cak Imin mengilustrasikan Pemilu seperti pertandingan sepak bola, di mana masyarakat akan menikmati dan riang gembira ketika menyaksikan pertandingan sepak bola. "Kita semua



Kalau ada wasit yang curang kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan tekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru, itulah Pemilu yang saling menjaga.

yakin kalau kita melihat Pemilu seperti sepak bola, maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia," kata Cak Imin.

Sementara, jika ada pemain atau wasit yang melakukan kecurangan, jangan takut untuk melaporkannya ke pihak berwenang. Hal itu dilakukan agar pemain dan wasit yang melakukan kecurangan mendapatkan sanksi.

"Kalau ada wasit yang curang kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan tekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru, itulah Pemilu yang saling menjaga," kata Cak Imin.

Penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil, kata Cak Imin, bukan untuk kepentingan masing-masing calon, akan tetapi demi bangsa Indonesia. Dia menjelaskan, keberhasilan penyelenggaraan Pemilu juga akan berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia.

"Bukan kepentingan AMIN. Tapi, Pemilu yang sehat, yang kuat akan menyelamatkan dan memajukan demokrasi. Kalau demokrasi maju, pasti rakyat akan semakin makmur," ujar Cak Imin.

Dia mengajak simpatisan,

masyarakat, dan seluruh capres yang bertarung di 2024 mendatang agar menyambut Pilpres dengan riang gembira. Tidak hanya itu, mantan Menteri Ketenagakerjaan itu juga mengajak seluruh paslon untuk mengedepankan pendidikan politik kepada masyarakat.

"Kami ingin bersama-sama mengisi Pemilu dengan gagasan, ide, cita-cita, dimulai dari track record, rekam jejak, dan berbagai visi-misi yang telah kita miliki masing-masing secara lengkap," terang Cak Imin.

Dia menyakini pasangan AMIN bisa menang dalam satu putaran. Untuk bisa menang satu putaran, pihaknya harus bekerja keras mengambil simpati dan dukung rakyat Indonesia. Dia pun meminta kepada para pendukungnya turun ke masyarakat untuk menyampaikan program kerja ataupun visi-misi dari pasangan AMIN jika kelak terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.



Semua orang tau apa itu sliding tackle. Dan, semua orang tahu itu nyorakin pemain yang curang.

"Pokoknya kita bekerja keras. Pendukung AMIN, ayo kita yakinkan hanya satu jalan untuk Indonesia lebih baik, perubahan nasib, yang miskin jadi cukup, yang kecil jadi besar, yang kuat tetap kuat, yang tidak sehat jadi sehat, yang miskin jadi kaya," jelas Cak Imin.

Dia pun mengakhiri sambutannya dengan pantut. Dalam isi pantutnya tersebut, dia mengajak masyarakat un-

tuk memilih pasangan AMIN di hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju pilihlah nomor 01," ujar Cak Imin.

Sementara itu, Anies Baswedan juga merasa senang mendapatkan nomor urut 01 di Pilpres 2024. Dikatakan Anies, dia dan Cak Imin mendapatkan nomor urut 01 karena hikmah yang diberikan kepadanya. "Kami bersyukur. Alhamdulillah. Semua pasti ada hikmahnya. Jadi selalu ada hikmahnya," ujar Anies.

Dia mengaku merasa gembira ketika mendapat nomor urut 01 saat pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. "Ceria, ada suasana yang khusus, tapi juga suasananya riang gembira," kata Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan, setelah mendapatkan nomor urut pasangan calon, pihak-



ya langsung bergerak dan turun ke masyarakat. Disampaikan Anies, dirinya dan seluruh simpatisan pasangan AMIN akan menggaungkan nomor urut 01 di masyarakat.

"Langsung kita bergerak dengan angka 01," kata Anies.

Selain itu, Anies juga memberikan penjelasan terkait dirinya tidak memberikan sambutan saat pengundian nomor urut. Sebab, Anies menyampaikan, pasangan AMIN merupakan dwitunggal. Calon wakil presiden juga memiliki peranan yang setara dengan calon presiden.

"Kita ingin menunjukkan bahwa wakil presiden memiliki kaliber yang setara. Wakil presiden memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan untuk berkomunikasi yang amat baik. Dan, saya bangga berpasangan dengan Gus Imin," kata Anies.

Atas rasa bangga dan hormatnya

kepada Cak Imin, Anies memberikan kesempatan agar cawapres dari Koalisi Perubahan bisa tampil di ruang publik. Sebab, kata dia, cawapres memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu kerja-kerja dari capres.

"Dan rasa bangga itu kami tunjukkan dengan mempersilakan seluruh rakyat Indonesia menyaksikan cawapres yang bisa menyampaikan gagasannya dengan amat baik, pesannya jelas, penyampaiannya cerita, dan ilustrasinya mudah sekali dipahami," ujar Anies.

Anies pun setuju dengan pendapat

Cak Imin yang ilustrasikan Pemilu seperti pertandingan sepak bola. Anies menilai, masyarakat akan menyadari pemain-pemain yang berbuat kecurangan di sebuah pertandingan.

"Semua orang tau apa itu sliding tackle. Dan, semua orang tahu itu nyorakin pemain yang curang. Semua orang tahu wasit yang bersertifikat dengan baik. Pesan-pesan itu mudah ditangkap dan ini sebuah pesan kepada semua bahwa kami pasangan dwitunggal, saling melengkapi, dan bisa saling mengisi," kata Anies. •



PILOT PESAWAT TEMPUR JADI KAPTEN TIMNAS AMIN

Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akhirnya diumumkan ke publik. Koalisi Perubahan menunjuk Marsekal (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus sebagai Kapten Timnas Anies-Muhaimin.

Menunjukkan Muhammad Syaugi Alaydrus sebagai Kapten Timnas Anies-Muhaimin diharapkan bisa membawa pasangan Amin memenangkan Pilpres 2024.

Calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menjelaskan, keputusan penunjukkan mantan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) itu sebagai Kapten Timnas Amin sudah melalui proses dan berbagai pertimbangan.

Dia mengungkapkan, Koalisi Perubahan mengangkat pria yang akrab disapa Top Gun itu karena sudah memiliki banyak pengalaman yang mumpuni untuk bisa membantu kemenangannya di Pilpres 2024.

"Kapten utama atas nama Marsekal (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus. Beliau sudah punya banyak pengalaman dalam pengelolaan SAR, sudah punya pengalaman kepemimpinan juga, kalau dilihat dari CV-nya di tempat beliau bekerja hampir semua jadi pimpinan," ungkap Anies dalam konferensi pers pengumuman Timnas AMIN di Jakarta, Selasa, 14 November 2023.

Penunjukkan Syaugi sebagai Kapten Timnas AMIN disambut baik oleh seluruh partai pendukung pasangan Anies-Muhaimin, yakni Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Di sisi lain, masyarakat pun bertanya-tanya mengenai sosok Muhammad Syaugi Alaydrus yang ditunjuk sebagai Kapten Timnas Anies-Muhaimin. Sebab, posisinya memiliki peranan yang sangat penting untuk mengantarkan Amin meraih kemenangan di kontestasi 2024.

Profil Muhammad Syaugi Alaydrus

Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus yang dijuluki Top Gun ini lahir pada 10 Desember 1960. Tidak banyak



yang mengetahui bahwa Muhammad Syaugi Alaydrus merupakan cucu dari salah pendiri pusat pendidikan Islam di Jakarta, yakni Habib Al Abdurrahman As Saqaf.

Syaugi menyelesaikan pendidikan di Akademi Angkatan Udara (AAU) pada 1984. Perjuangannya dalam menyelesaikan pendidikannya membuahkan hasil yang moncer. Akhirnya, Syaugi menyabet gelar lulusan terbaik atau Adhi Makayasa.

Setahun kemudian, Syaugi melanjutkan pendidikannya di Sekolah Komando Kesatuan TNI Angkatan Udara (Sekkau) pada 1985. Sekkau sendiri merupakan pendidikan pengembangan umum tingkat pertama bagi para perwira TNI AU yang telah selesai mengikuti pendidikan lanjutan kecabangan atau setingkat.

Tidak hanya sampai di situ, Syaugi selanjutnya meneruskan pendidikannya ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) pada 1992. Seskoau merupakan jenjang pendidikan pengembangan umum tertinggi TNI AU, Pendidikan Operasi Matra Udara, yang melaksanakan pengkajian dan pengembangan doktrin serta kemampuan dan kekuatan matra udara.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di AAU, Syaugi langsung bergabung di tim penerbangan andalan AAU. Karirnya moncer ketika bergabung di tim penerbangan andalan. Akhirnya dia masuk jajaran Perwira TNI yang mahir dalam menerbangkan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat.

Selama kurang dari 11 tahun atau tepatnya pada 1985-1996 menjadi pilot pesawat tempur, Syaugi dipercaya untuk mengisi jabatan strategis di lingkungan TNI AU. Pertama kalinya, Syaugi dipercaya menjadi Pangkosekhanudnas IV/Biak pada 2010.

Karirnya pun tidak berhenti di situ. Setahun kemudian, Syaugi dipercaya menjadi Komandan Lanud Iswahyudi pada 2011, dan menjadi Pangkoop-sau I pada 2012.

Karirnya pun terus cemerlang di mana selama kurang lebih 2 tahun Syaugi dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Perencanaan Per-

tahanan (Dirjen Renhan) Kementerian Pertahanan pada 2014-2017.

Karirnya kian moncer saat menjabat Dirjen Renhan Kemenhan, Syaugi mendapatkan kenaikan pangkat menjadi marsekal bintang 3.

Selanjutnya, selama berkarir di Kemenhan, Presiden Joko Widodo mengangkat Syaugi menjadi Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) pada 2017. Selama menjabat sebagai Kepala Basarnas, Syaugi juga pernah menangani beberapa kasus kecelakaan. Salah satunya pada saat peristiwa jatuhnya

Susunan Lengkap Timnas AMIN:
Captain : Marsdya (purn) Muhammad Syaugi Alaydrus
Co-Capt 1 : Sudirman Said
Co-Capt 2 : Thomas Trikasih Lembang
Co-Capt 3 : Al Muzzammil Yusuf
Co-Capt 4 : Nihayatul Wafiroh
Co-Capt 5 : Azrul Tanjung
Co-Capt 6 : Nasirul Mahasin
Co-Capt 7 : Leontinys Alpha Edison
Co-Capt 8 : Yusuf Muhammad Martak
Co-Capt 9 : Ki KRT H Lebdo Nagoro Anom Suroto
Co-Capt 10 : Muhammad Jumhur Hidayat
Co-Capt 11 : Maksu Faqih
Co-Capt 12 : Suyoto
Sekretaris Jenderal : Novita Dewi
Bendahara : Gede Widiade
Tim Hukum Nasional : Ari Yusuf Amir

pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta-Pangkalping pada 2018.

Saat menangani jatuhnya pesawat Lion Air JT 610, Syaugi selaku Kepala Basarnas langsung mengerahkan anak buahnya untuk melakukan pencarian terhadap penumpang burung besi tersebut. Akhirnya, tidak berselang lama, Syaugi pensiun sebagai perwira TNI AU. Setelah tidak lagi aktif di kesatuan, Syaugi dipercaya mengemban jabatan sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta pada 2019-2022. Kemudian, berse- lang setahun, tepatnya pada 2023, dipercaya oleh partai pendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Kapten Timnas. Karir politiknya mulai dari sini.

Strategi Timnas AMIN

Setelah mendapatkan kepercayaan menjadi Timnas AMIN, Sya-

gi langsung melakukan beberapa strategi untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Syaugi mengungkapkan bahwa setelah ditunjuk sebagai Timnas AMIN, dirinya langsung melakukan konsolidasi dengan Wakil Kapten Timnas dan seluruh jajarannya.

"Sekarang ini kami menyatukan dulu. Kapten itu ada Co-Captain. Nah, itu nanti kami bagi tugas," kata Syaugi, Selasa, 14 November 2023.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat ini seluruh jajaran Timnas AMIN akan terus melakukan konsolidasi demi memperkuat internal dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Dia ingin Timnas yang sudah bentuk ini berjalan sesuai dengan harapan.

"Bisa menjadi kesebelasan yang efektif dan efisien. Itu dulu," kata Syaugi.

Dia percaya bahwa Timnas yang sudah dibangun ini sudah dari kata cukup. Dia meyakini Timnas AMIN bisa memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tidak hanya itu, Timnas AMIN juga diminta untuk terjun langsung ke masyarakat. Hal itu dilakukan untuk memperkenalkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar secara langsung ke masyarakat.

"Kita kolaborasikan, kita gandeng semua untuk melaju atau memberikan serangan untuk menggaet masyarakat seperti itu," tegas Syaugi.

Dia juga mengaku senang ketika mengetahui pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 01 di Pilpres 2024. Menurutnya, itu merupakan pertanda baik.

Dia meyakini pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa menang dalam satu putaran. Momor urut 01 yang sudah kantong ter- sebut sesuai dengan harapan Timnas AMIN dan seluruh pendukung pasangan AMIN.

"Kan kami pengen yang pertama. Daftar aja pertama, urutan nomor pertama, dapat juga insya Allah menang pertama," ujar Syaugi. ●

AMIN SUDAH DIPASTIKAN KALAH OLEH LEMBAGA SURVEI

Pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selalu menempati urutan paling buncit dalam survei elektabilitas terhadap tiga kandidat yang akan bersaing di Pilpres 2024. Hal ini menjadi indikasi duet AMIN bakal kalah di putaran pertama pesta demokrasi tahun depan.

Dalam survei yang dilakukan Poltracking Indonesia, pasangan Anies-Cak Imin hanya memiliki elektabilitas 23,7 persen di kalangan pemilih NU. Sementara, Prabowo-Gibran di posisi teratas dengan elektabilitas 42,4 persen, diikuti Ganjar-Mahfud 30,4 persen.

Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin tidak mau ambil pusing dengan hasil survey tersebut. Dia lebih menyerahkan seluruhnya kepada lembaga survei. Sebab, hasil survei bagi pasangan AMIN menjadi cambukan untuk bekerja keras.

"Ya itu terserah. Terserah yang nyurvei saja lah," kata Cak Imin sembari tertawa ditemui di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu, 11 November 2023.

Wakil Ketua DPR itu menyatakan tidak ingin mempersoalkan hasil survei yang menempatkan pasangan AMIN di posisi terakhir. Disampaikan Cak Imin, hasil survei tersebut menjadi masukan bagi pasangan AMIN untuk melakukan evaluasi agar lebih baik lagi.

Hasil survei Poltracking Indonesia merekam pilihan warga Nahdlatul Ulama (NU) di Pilpres 2024. Hasilnya, warga NU paling banyak memilih pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran

Rakabuming Raka.

Dengan basis suara warga NU sekitar 51,3 persen, 42,4 persen merupakan pemilih Prabowo-Gibran. "NU dengan populasi 51,3 persen pertama ke Prabowo-Gibran," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, saat pemaparan survei secara daring, Jumat, 10 November 2023.

Pasangan Ganjar-Mahfud di urutan kedua yang paling banyak dipilih warga NU dengan angka 30,4 persen. Sementara, Anies-Muhaimin di urutan ketiga dengan angka 23,7 persen.

Hanta Yuda menjelaskan bahwa angka ini memperlihatkan tidak ada yang dominan di antara pemilih dari basis Nahdlatul Ulama. "Ini data tersebut tidak ada yang dominan tidak ada yang lemah," jelasnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga merespons terkait pernyataan Nurson Wahid yang menyebut dirinya kurang NU. Kendati begitu, Cak Imin ogah menimpalkan pernyataan dari politisi Partai Golkar tersebut. "Tanggapannya cuma satu, EGP. Emang



Gue Pikirin,” kata Cak Imin.

Sebelumnya, Nurson menyatakan bahwa Cak Imin tidak pernah menjadi pengurus PBNU. Dikatakan Nurson Wahid, Cak Imin hanya pernah menjadi bagian dari Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), kala itu Cak Imin menjadi ketua umum. Selain itu, Cak Imin juga pernah bergabung dengan GP Ansor.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai, kekalahan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di survei dinilai sebagai buah simalakama. Sebab, Anies Baswedan dan Muhai-

rah ke Anies. “Artinya, karena dukungan cawapres NU (Cak Imin) itu yang menjadi jalan tengah,” kata Hari.

Dia menilai, kalahnya Anies di beberapa survei menunjukkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak memiliki basis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Apalagi, basis dari NU. Anies, tidak memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh NU. Maka sangat wajar bila surveinya sangat rendah.

“Artinya tidak punya basis secara provinsi,” ujar Hari.

Faktor yang sangat mempengaruhi adalah Anies bukan orang

dan memiliki jabatan yang sangat strategis di DPR.

“Safari politik yang dilakukan ini kan karena kerja-kerjanya Cak Imin,” kata Hari.

Dikatakan Hari, faktor Cak Imin sangat penting bagi Anies. Sebab, Cak Imin yang memiliki basis pendukung yang sangat besar. Apalagi, Cak Imin sangat diidentikan dengan NU. Tidak hanya itu saja, Cak Imin juga memiliki kedekatan dengan para Kiyai NU.

“Cak Imin faktor penentu bagi Anies,” ujar Hari.

Kendati begitu, Hari menilai, Cak Imin nampaknya ingin menjadi NU



min Iskandar masih tersandera kasus yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, Anies memiliki rekam jejak politik yang sedikit hitam yakni memainkan isu agama pada Pilgub DKI Jakarta.

“Karena Anies masih tersandera kasus Formula E. Kedua, identitas Anies terhadap penggunaan kampanye pada saat menang Pilgub DKI Jakarta,” kata Hari kepada Info Indonesia, Sabtu, 11 November 2023.

Menurut Hari, langkah Koalisi Perubahan yang memasang Cak Imin dengan Anies Baswedan merupakan keputusan yang cukup cemerlang. Dikatakan Hari, setidaknya Cak Imin bisa meredam isu-isu yang menga-

partai. Sehingga, sulit bagi Anies untuk mendapatkan efek elektoral. Hal ini membuat basis dukungan dari partai kepada Anies tidak begitu kuat.

“Anies enggak punya basis partai dan Anies bukan kader partai. Itu menjadi faktor turunnya elektabilitas atau survei Anies turun,” kata Hari.

Dia menyampaikan, safari politik yang dilakukan Anies dan Cak Imin ke beberapa daerah akan sangat percuma. Sebab, Anies tidak memiliki basis partai yang kuat.

Hari menilai, dukungan yang besar terhadap pasangan AMIN itu karena peranan dari Cak Imin. Sebab, Cak Imin merupakan ketua umum partai

sebagai alat politiknya. Hari mengatakan, tokoh-tokoh NU tidak hanya berada di PKB karena banyak yang bergabung ke partai lain.

“NU tidak bisa identik di PKB. Banyak tokoh NU itu di partai lain,” kata Hari.

Hari menyampaikan, Cak Imin ingin menjadikan PKB sebagai kendaraan politik para warga NU. Namun, hal itu nampaknya sangat sulit untuk terwujud. Pasalnya, Ketau Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf sudah mengingatkan kepada seluruh warga Nahdliyin untuk tidak ikut dalam politik praktis.

“NU mau diarahkan ke PKB sebagai alat politik,” tandas Hari. •

PRABOWO-GIBRAN MENATAP KEMENANGAN

Pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendapatkan nomor urut 02 untuk Pilpres 2024. Angka tersebut sama dengan Partai Gerindra di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 yang mendapatkan nomor 2.



Prabowo Subianto merasa terhormat mendapatkan nomor urut 02 di Pilpres 2024. Dia pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh penyelenggara pemilu, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Saya atas nama, pasangan calon nomor urut 02 mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada KPU, dan juga ke-

sar di dunia. Kalau tidak salah ketiga terbesar di dunia," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan, siapapun harus bersikap jujur dalam berkompetisi. Dia juga memiliki pendapat yang sama dengan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang mengatakan bahwa Pemilu harus dijalankan dengan kejujuran dan memberikan keadilan yang sama kepada seluruh pasangan calon.

"Kejujuran itu harus utuh, seutuh-utuhnya. Jadi saya sangat sependapat

dengan aspirasi pasangan calon nomor 01, memang kita bersyukur, kita memiliki negara berdemokrasi," ujar Prabowo.

Menteri Pertahanan itu juga merasa bangga Indonesia sebagai negara yang terbesar dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, tetap bersatu, meskipun berbeda pilihan ketika datangnya Pemilu. "Alhamdulillah kita masih utuh, masih bersatu, walaupun banyak tantangan yang kita hadapi," ujar Prabowo.

Dia juga setuju dengan apa yang



pada Bawaslu, dan DKPP atas proses pemilihan umum dengan baik," kata Prabowo saat memberi sambutan.

Prabowo juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap perjalanan demokrasi dari bangsa Indonesia yang tetap teguh hingga saat ini. Dia menyampaikan, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari puluhan ribu pulau, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

"Kita patut bangga, kita adalah negara demokrasi salah satu yang terbe-



Saya sangat setuju dengan tadi aspirasi dan harapan-harapan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor 01

disampaikan oleh pasangan AMIN yang menyampaikan bahwa proses demokrasi ini tidak boleh ada kecurangan. "Saya sangat setuju dengan tadi aspirasi dan harapan-harapan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor 01," ujar Prabowo.

KPU sebagai panitia penyelenggara Pemilu harus menghadirkan keadilan bagi seluruh pasangan calon yang bertarung di Pilpres 2024. Dia menilai, kecurangan dalam proses demokrasi akan berdampak buruk bagi bangsa

• INFO UTAMA

Indonesia. Sebab, sama saja seperti mengkhianati masyarakat dan bangsa Indonesia.

"Kami yakin KPU akan melaksanakan Pemilu dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-juurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun, karena kalau pelaksanaan Pemilu curang mengkhianati dan negara In-

saat ini mulai memanas. Prabowo mengatakan, Pemilu ataupun Pilpres harus disambut dengan gembira dan penuh senyuman.

"Saya bersyukur dan saya gembira, suasana hari ini suasana penuh kekeluargaan, penuh riang gembira, penuh dengan saling mengasihi. Jadi kawan-kawan, siapapun yang menang, kita

"Satu dua cempaka biru. Tiga empat dalam jambangan. Kalau mendapat kawan baru. Kawan lama dilupakan," kata Prabowo.

Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menyebut semua nomor urut yang sudah dikantongi masing-masing paslon memiliki maknanya tersendiri. Hal itu juga dialami oleh Gibran ketika



donesia," terang Prabowo.

Dia juga merasa bersyukur dan gembira dengan suasana perpolitikan Tanah Air yang semakin cair. Masyarakat pun sudah sangat cerdas dalam menyikapi isu-isu politik yang

harus bersatu menjaga negeri ini," kata Prabowo.

Dia pun menutup sambutannya dengan pantun. Dalam isi pantunnya itu, Prabowo menyinggung soal persahabatan satu sama lainnya.



mendapatkan nomor urut 02.

"Semua nomor punya makna bagus. Tenang saja," ujar Gibran.

Dia menilai, semua nomor urut yang dimiliki masing-masing paslon juga bagus. Tidak ada yang membedakan satu sama lainnya. Kendati begitu, dia menyebut nomor urut tidak ada yang jelek. Tergantung bagaimana memaknai nomor urut tersebut. "Semua no-

mor bagus,” kata Gibran.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengaku tidak memiliki firasat apapun soal nomor urut 02 tersebut. Kendati demikian, Gibran menyakini nomor urut 02 akan membawa dirinya kepada kemenangan di Pilpres 2024. “Enggak ada firasat,” ujar Gibran.

Wali Kota Surakarta itu mengata-

Gibran di Pilpres 2024. Dia menambahkan bahwa pasangan yang ia dukung itu bisa menjawab segala tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia. Selain itu, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju.

“Angka 2 mencerminkan kemenangan dan kesuksesan Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang ter-

nesia.

Dia juga meyakini, nomor urut 02 juga akan membawa energi positif bagi bangsa Indonesia. Dia yakin nomor urut 02 akan menghadirkan keharmonisan antar masyarakat.

“Angka dua ini melambangkan harmoni,” ujar Rosan Roeslani.

Tidak hanya itu, dia menyampai-



kan, dirinya akan tetap bekerja keras untuk bisa memenangkan Pilpres. Gibran menegaskan, dirinya tetap optimis dengan nomor urut 02 tersebut bisa memberikannya kemenangan.

Di sisi lain, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju, Rosan Perkasa Roeslani, meyakini nomor urut 02 akan memberikan kemenangan bagi pasangan Prabowo-

jadi,” kata Rosan.

Dia memaknai nomor urut 02 sebagai simbol dua jari yang melambangkan victory atau kemenangan. Selain itu, nomor urut 02 juga dapat dimaknai dengan simbol perdamaian atau peace. Hal ini juga sejalan dengan komitmen pasangan Prabowo-Gibran yang ingin menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indo-

nesia, pada sila kedua juga disebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dari itu, nomor urut 02 ini memberikan makna sangat berarti bagi pendukung, simpatisan, khususnya pasangan Prabowo-Gibran.

“Sehingga, nomor 02 ini akan membawa Indonesia menjadi negara maju, adil, beradab yang berasaskan kemanusiaan,” pungkasnya. •

GASPOL KAMPANYEKAN PRABOWO-GIBRAN

Koalisi Indonesia Maju resmi mengumumkan susunan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan Pilpres 2024 pada 6 November 2023. Rosan Perkasa Roeslani ditunjuk sebagai Ketua TKN Prabowo-Gibran.

Jika melihat struktur TKN Prabowo-Gibran, komposisi tim ini terbilang cukup gedut dibandingkan dengan Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Selain itu, jika ditelusuri lebih jauh, banyak nama beken yang tergabung di dalam TKN Prabowo-Gibran, mulai dari mantan Panglima TNI, mantan Kapolri, beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju, serta para artis dan influencer.

Kendati begitu, seluruh partai pendukung pasangan Prabowo-Gibran telah menyepakati bahwa yang menahkodai TKN adalah Rosan Roeslani. Mantan Wakil Menteri BUMN ini merupakan sosok yang tidak asing di dunia usaha Tanah Air.

Tokoh-tokoh besar seperti Sandiaga Uno merupakan teman baiknya. Namun, mereka berdua dipisahkan dengan pilihan politik. Sebab, Sandiaga Uno yang kini merupakan kader PPP mendukung pasangan Ganjar-Mahfud Pilpres 2024.

Rosan mengatakan, TKN Prabowo-Gibran yang diumumkan telah mengakomodasi seluruh partai pengusung, relawan baik nasional maupun daerah dan kalangan profesional.

sional.

"Dengan lengkapnya susunan TKN ini, kami siap untuk gaspol memenangkan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang," kata Rosan.

Profil Rosan Roeslani

Rosan Roeslani merupakan pengusaha kelahiran Jakarta, 31 Desember 1968. Dia mengawali bisnis dengan mendirikan penasihat keuangan (financial advisors) pada 1996.

Setahun kemudian pada 1997, perusahaan yang dirintisnya itu mulai berjalan dengan nama PT Republik Indonesia Funding atau lebih dikenal sebagai finance Indonesia.

Saat krisis ekonomi melanda Indonesia, banyak perusahaan nasional mencari orang yang mampu menyehatkan kembali perusahaan dan bisnis yang dikelolanya. Krisis ekonomi yang melanda menjadi berkah tersendiri bagi Rosan. Kala itu, Rosan dkk banyak dicari oleh para pengusaha dan pemilik modal besar untuk menyehatkan perusahaan mereka.

Setelah itu, pada 2022, Rosan mengganti nama perusahaannya dari Finance Indonesia menjadi Recapital. Saat ini, dia juga chairman dari Grup Recapital. Perusahaannya itu fokus pada bidang keuangan dan investasi.

Selanjutnya, perusahaannya mengurusi ke beberapa sektor, di antaranya bidang industri pertambangan, infrastruktur, properti, hingga media dan komunikasi.

Rekam Jejak Karir

Rosan merupakan alumni Antwerpen European University di Belgia dan Oklahoma State University, Amerika Serikat. Rosan pernah menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2015-2020. Rosan juga dipercaya oleh Presiden Joko Widodo menjadi Duta Besar Indone-



sia untuk Amerika Serikat.

Tidak hanya itu, naluri bisnisnya pun masih terus mengalir. Akhirnya, Rosan mengakuisisi klub sepak bola asal Italia yakni Inter Milan. Kemudian, Rosan dipercaya Presiden Jokowi untuk menggantikan Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri BUMN.

Perjalanan Bisnis Rosan

Selain menjadi Chairman Recapi-

tal Group, Rosan pernah menjabat Presiden Komisaris Komite Investasi Rcapital Asset Management pada 2002-2023. Karirnya pun kian moncer, di mana Rosan dipercaya sebagai Kepala Pemantauan Kreditur Capital-inc Finance Tbk pada 2003-2007.

Hasil dari kerja kerasnya itu, Rosan kembali dipercaya untuk menduduki posisi Presiden Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Indonesia Tbk

(Bank BTPN) pada 2005-2007. Lalu, Rosan juga dipercayakan sebagai Dewan Penasehat PT Lupita Anda dan Komisaris Lativi Mediakarya atau TV One.

Atas kerja kerasnya itu, partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mempercayai Rosan mengemban tugas sebagai Ketua TKN Prabowo-Gibran. ●

Berikut Susunan lengkap TKN Prabowo-Gibran:

PEMBINA:

Habib Lutfi bin Yahya
Jenderal (Purn) TNI Wiranto
Aburizal Bakrie
Hatta Rajasa
Asep Safuddin (Amanatul Ummah)
Laksamana (Purn) TNI Widodo Adi Sutjipto
Jenderal (Purn) TNI Agum Gumelar
Letjen (Purn) TNI EE Mangindaan
Siti Hardjanti Munandar
Jeffrie Geovanie

PENGARAH

Ketua: Airlangga Hartarto
Wakil Ketua Dewan Pengarah:
Sufmi Dasco Ahmad
Agus Harimurti Yudhoyono
Zulkifli Hasan
Yusril Ihza Mahendra

Anis Matta
Kaesang Pangarep
Ahmad Ridho Sabana
Agus Jabo Priyono
Hashim Djodjohadikusumo
Mahfudhoh Ali Ubaid
Agustadi Sangsoko
Muchamad Jurianto
Ida Bagus Putu Dunia
DEWAN PENASEHAT
Jenderal (Purn) Sutanto
Jenderal (Purn) Sutarman
Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin
Nurmala Kartini Sjahrir
Ridwan Kamil
Putri K Wardani
Akbar Tandjung
Agung Laksono
Ahmad Sucipto
Gautama Wiranegara
KH Abdul Ghafur
KH Adib Rafiuddin Izza
Kharor Aschal
Prof dr Sjarifuddin Hasan
Edhi Baskoro Yudhoyono
Linda Agum Gumelar
Buya Zulfi Syukur
Deddy Mizwar
Fadli Zon

Mochamad Iriawan
Maher Algadri
Siti Hediati Soeharto
Widjono Harjanto
Amir Syamsuddin
Andi Alfian Mallarangeng
Muzakir Manaf
Theo Sambuaga
Cicip Sutardjo
Badarrudin
Ahmad Hafizh Thohir

KMS Umar Halim
Nasrullah
Giring Ganesha
Irma Hutabarat
Syaifudin
Dedy Miing Gumilar
Mayjen (Purn) Musa Bangun
Irjen (Purn) Adnas
Komjen (Purn) Boy Rafli Amar
Moechlas Sidik
Habib Umar Assegaf
Ida RSI Agung Wahayan
Habib Ahmad bin Hasan Alaydrus
Misbakhun Munir Cholil
KH Zuhri Yacub
TGKH Lalu Muhammad Zainudin Atsani
KH Muchlich Abbas
KH Hamdi Hasan Al Maliki
KH Zaini Zulfa
KH Agus Masna Shofa Fauzan
KH Masrur Anhar
KH Muzhaff
Tjokorda Gde Agung Sumara Wisesa
Andi Thaswin Abdullah

DEWAN PAKAR

Burhanudin Abdullah (Ketua)
Sudrajat Djiwandono
Budiman Sudjatmiko
TB Ace Hasan
Moh Jafar Hafsa
Willem Wandik
Drajad Hari Wibowo
Asman Abnur
Bima Arya Sugiarto
Helmy Yahya

Ketua TKN: Rosan Roeslani
Ketua Koordinator Strategis: Sufmi Dasco
Wakil Ketua:
Ahmad Muzani
Loedwijk F Paulus
Teuku Refly
Eddy Soeparno
Mahfudz Siddiq
Afriansyah Noor
Raja Juli Antoni

Sekretaris TKN: Nusron Wahid
Wakil Sekretaris:
Saleh Daulay
Renanda Bachtar
Fadli Tri Hartono
Fikrah Auliayaurrahman
Azanil Kelana

Bendahara TKN: Tomas A Muliatna Djiwandono

Wakil Bendahara TKN:

Pandu Patria Sjahrir
Setiawan Ichlas
Harry Zulnardy
Simon Aloysius Mantiri
Satrio Dimas Adityo

Komandan Alpha (Teritorial): Ahmad Doli Kurnia Tanjung
Wakil Komandan Alpha
Prasetyo Hadi
Irvan Herman
Herman Khaeron
Satria Chandra Wiguna
Fritz Edward Siregar

Komandan Bravo (Komunikasi): Budisatrio Djiwandono
Wakil Komandan Bravo:
Nurul Arifin

Eko Hendro Purnomo
Herzaky Mahendra Putra
Fahri Hamzah
Cheryl Tanzil

Komandan Charlie (Penggalangan): Yandri Susanto

Wakil Komandan Charlie:
Andi Achmad Dara
Ferry Juliantono
Umar Arsal
Abdul Rohim

Komandan Delta (Supporting): Irjen (Purn) Yovianes Mahar
Wakil Komandan Delta:

Erwin Izharuddin
Tatyana S. Sutara
Komandan Echo (Hukum dan Advokasi): Hince Pandjaitan
Wakil Komandan Echo:

Habiburokhan
Supriansa
Adies Kadir
Syarifudin Sudding
Fahri Bachmid

Komandan Fanta (Pemilih Muda): M. Arief Rosyid Hasan
Wakil Komandan Fanta:

Rahayu Saraswati
Dyah Roro Esti
Jerry Sambuaga
Sigit Purnomo Said

Verrel Bramasta
Komandan Golf (Relawan): Haris Rusly Moti

Wakil Komandan Golf:
Immanuel Ebenezer
Wahab Talaoho
Dinuk Ashaf
Fauzi Baadilla
Mangapul Silalahi

PRABOWO TETAP PROJO

Relawan Pro Jokowi (Projo) telah menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024.

Dukungan yang diberikan Projo terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pastinya dinilai sangat penting. Sebab, Projo merupakan organisasi yang memiliki massa pendukung yang cukup banyak. Maka dari itu, dukungan tersebut akan berpengaruh terhadap pasangan Prabowo-Gibran.

Maka tidak heran, beberapa pengurus Projo terdaftar kedalam struktural Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Salah satu pengurus Projo yang tergabung di TKN adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Presiden (Bappilpres) Projo, Panel Barus.

"Panel Barus sebagai Wakil Ketua Koordinator Strategis," kata Sekretaris TKN, Nusron Wahid, kepada wartawan di Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin, 6 November 2023.

Panel Barus menjelaskan, pembentukan struktural TKN Prabowo-Gibran sudah melalui proses yang begitu panjang. Dia menyampaikan bahwa pasangan Prabowo-Gibran bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan dan tantangan yang sedang dihadapi

Bangsa Indonesia.

Direktur Rumah Indonesia Maju (RIM) itu merasa memiliki tanggung jawab untuk bisa memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Kami merasa amat bertanggung jawab untuk memenangkan pasangan ini. Pasangan ini menurut pandangan kami adalah pasangan yang mampu menjawab tantangan ke depan," kata Panel.

Selain itu, Panel bakal berupaya untuk memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran. Panel mengatakan, Projo bertanggung jawab penuh atas kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.

"Untuk Projo, ada atau tidak adanya Projo di TPN, kami amat bertanggung jawab memenangkan pasangan ini satu putaran," ujar Panel.

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyampaikan, pihaknya akan berusaha menggerakkan kader-kadernya di seluruh provinsi di Indonesia untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Projo menargetkan Prabowo-Gibran menang satu putaran di Pilpres 2024.

"Pokoknya satu putaran. Doakan bersama rakyat. Ya udah itu aja," ungkap Budi Arie.

Dia memastikan, Projo akan tetap bersama dan mendukung penuh Prabowo-Gibran. Dia menyatakan, Projo di daerah telah sepakat satu suara. Budi



Arie menegaskan, Projo akan turun ke masyarakat untuk menyosialisasikan program dan visi-misi dari pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) tersebut.

"Kami melakukan konferensi daerah, di seluruh provinsi di Indonesia, dan menyimpulkan seluruh pendukung Projo ini solid, bulat, militan, untuk mendukung Pak Prabowo (sebagai) Presiden Indonesia," ujar Budi Arie.

Menteri Komunikasi dan Informatika itu menyampaikan, Projo mengharapkan dukungan masyarakat di seluruh Indonesia untuk bisa ikut ser-

dua kali pemilu, Projo lebih dekat dekat PDIP.

Maka dari itu, Surokim menilai, Projo tidak akan sepenuhnya mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Adapun Projo juga akan memberikan kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di kontestasi 2024.

"Secara institusi organisasi Projo akan mengikuti arah dukungan Pak Jokowi. Tetapi ada sejarah panjang di mana Projo selama ini berkolaborasi dengan PDIP mendukung Jokowi dalam dua pemilu, pasti punya

tinggi karena faktor sejarah tadi," jelas Surokim.

Lebih lanjut, Surokim mengatakan, secara kelembagaan seharusnya Projo bisa konsisten dan tidak pindah-pindah dalam memberikan dukungan politiknya.

"Ke mana dukungan Pak Jokowi mestinya Projo ada di situ," kata Surokim.

Surokim menyampaikan, dalam politik tidak selalu bicara mengenai kalkulasi secara matematis, begitu juga soal arah dukungan politik.



Bisa berubah-ubah tergantung dari akomodasi kepentingannya seberapa jauh bisa diakomodasi

ta dalam memenangkan Prabowo-Gibran di kontestasi 2024.

"Enggak, enggak ada yang berat. Seluruh rakyat dukung. Ya semuanya seluruh Indonesia. Ini kan pilpres bukan satu provinsi dong. Semuanya udah, kita berharap rakyat punya kebijaksanaan," kata Budi Arie.

Dia mengatakan, Pilpres merupakan ajang masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilihnya dalam menentukan figur yang dapat dipercaya untuk memimpin bangsa ini di masa mendatang.

Selain itu, Budi Arie juga tidak mempersoalkan adanya kader Projo yang memberi dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Kita yakin. Ini kontestasi pilpres, kan memilih figur. (Ada yang mendukung Ganjar Pranowo?) Ya biar aja, enggak apa-apa. Tapi saya yakin kok. Kan kita tahu hati nurani rakyat," ujar Budi Arie.

Peneliti Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, menilai, Relawan Projo akan setia bersama Presiden Jokowi. Meskipun selama

chemistry. Sehingga, tidak otomatis strike tegak lurus, tentu masih ada split yang akan mendukung paslon dari PDIP," kata Surokim.

Dia menilai, Relawan Projo merupakan salah satu organisasi yang cukup militan dalam memberikan dukungan. Hal itu terlihat ketika dua kali Pilpres, Projo mendukung Jokowi. Hasilnya, Jokowi bisa menang dua periode di pilpres.

"Ya sejauh ini Relawan Projo termasuk yang militan jika ada penguatan dari Pak Jokowi tentu akan bisa signifikan dan solid," kata Surokim.

Kendati begitu, Surokim menyakini jika Presiden Jokowi tidak memberikan penguatan, maka dukungan Projo berpotensi akan terbelah.

"Tetapi, jika belum ada penguatan dari Pak Jokowi. Saya pikir potensi pendukung untuk terbelah masih

Dukungan itu bisa saja berubah jika kepentingannya tidak diakomodir.

"Bisa berubah-ubah tergantung dari akomodasi kepentingannya seberapa jauh bisa diakomodasi," ujar Surokim.

Surokim menilai, Relawan Projo pastinya akan mengikuti langkah politik dari Presiden Jokowi di 2024. "Tapi kalau melihat arah dukungan Pak Jokowi saya pikir Projo akan istiqomah sesuai arahan Pak Jokowi," kata Surokim.

Surokim berpendapat, Projo tidak akan membelot dari Prabowo-Gibran. Kendati begitu, dukungan dapat berubah di tataran akar rumput.

"Kalau membelot enggaklah, potensi untuk seperti terbelah di grass-root masih terbuka dan ada sepanjang enggak ada penguatan Pak Jokowi," tandas Surokim. ●



GANJAR-MAHFUD WASPADA DRAKOR POLITIK

Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan nomor urut 03 untuk Pilpres 2024. Nomor tersebut dirasa sangat pas dan cocok dengan pasangan Ganjar-Mahfud.



"Kami mendapatkan nomor 3 itu pas sesuai dengan sila ketiga, persatuan Indonesia," kata Ganjar saat memberikan sambutan usai pengundian nomor urut di Kantor KPU, Selasa, 16 November 2023.

Ganjar menyampaikan, seluruh masyarakat Indonesia harus disatukan dalam proses politik yang riang gembira. Sebab, Pemilu ataupun Pilpres merupakan pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. "Hormati, itulah kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan," kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyinggung peristiwa politik yang saat ini terjadi. Menurutnya, peristiwa politik tersebut tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

"Beberapa hari ini, kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik publik. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi," tegas Ganjar.

Dia menyampaikan, banyak pihak saat ini sedang menyuarakan kegelisahan. Kendati begitu, kegelisahan

yang terjadi tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak untuk memperbaikinya.

"Itu kewajiban kita untuk menjaga (demokrasi)," kata Ganjar.

Dia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga proses demokrasi yang saat ini sedang berjalan. Sebab, menjaga demokrasi merupakan tanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali.

"Harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik, meskipun sekarang belum baik-baik saja," kata Ganjar.



Saya sangat setuju dengan tadi aspirasi dan harapan-harapan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor 01

Ganjar mengaku tidak merasa beban atas gejolak politik yang terjadi belakangan ini. Dia menyampaikan, dirinya percaya bahwa dukungan dari masyarakat membuatnya menjadi sosok yang kuat dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Dia menambahkan, demokrasi yang sudah berlangsung sejak reformasi harus tetap dipertahankan.

"Kita harus sampaikan, saya tenang kok dan kami ini tenang semuanya, karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini," kata Ganjar.

Sebagai warga negara, lanjut Ganjar, dirinya sangat mendukung dan mendorong semua pihak untuk menjaga demokrasi yang sudah tertanam sejak dulu. Disamping itu, Ganjar sangat menghargai perjuangan para pendahulu dalam menghadirkan demokrasi di Indonesia. "Saya hormati perjalanan demokrasi ini," ujar Ganjar.

Dia menilai, demokrasi yang sudah diperjuangkan selama ini sudah sangat baik. Namun, terkandung terdapat pihak-pihak yang berupaya untuk merusak demokrasi. Dia menanalogi-



• INFO UTAMA

kan demokrasi seperti air yang mengalir, di mana demokrasi akan terbentuk dengan sendirinya.

"Memang kadang-kadang lurus, kadang-kadang berliku seperti aliran air, tapi percayalah air yang mengalir itu, dia akan mengikuti arah batin, dia tidak akan bisa dibentuk apapun. Kalau bentuknya itu dia paksakan, dia

agar perjalanan demokrasi tetap pada jalur yang tepat.

"Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jujur situasi yang bisa berjalan pada rel," tegas Ganjar.

Ganjar juga mengajak Masyarakat untuk mengawal perjuangan reforma-

atas perjuangan reformasi ini sudah terbentuk yang namanya konsstitusi. Seluruh masyarakat tanpa terkecuali, harus mematuhi konstitusi.

"Kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh-jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang,"



akan tetap mencari jalannya sampai tiba muara. Itulah para demokrasi yang hari ini kita hidupkan. Dan, tentu saja inilah kesepakatan hari ini yang mesti kita jaga bersama," jelas Ganjar.

Dia mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar ada reformasi yang sudah diperjuangkan ini terus dilanjutkan. Selain itu, Ganjar juga mengajak

si dalam membangun bangsa Indonesia sebagai negara yang demokrasi. Dia menekankan bahwa proses demokrasi ini harus terhindar dari intervensi ataupun kecurangan.

Dia menambahkan, agenda reformasi, termasuk di dalamnya demokrasi, harus terbebas dari unsur-unsur Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Sebab,

kata Ganjar.

Dia mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia memiliki tugas untuk menjaga konstitusi. Hal itu dilakukan demi menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.

"Kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, kelompok masyarakat dan bagaimana sejatinya kita menjaga

NKRI," terang Ganjar.

Bahkan, Ganjar mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga NKRI. Selain itu, tidak perlu takut untuk melaporkan segala upaya yang dilakukan pihak-pihak tertentu yang berupaya merusak persatuan bangsa. "Laporkan praktik-praktik tidak baik yang akan mencederai

02 punya komitmen yang sama," kata Ganjar.

Oleh karena itu, Ganjar mengajak kepada seluruh paslon untuk bertarung secara jujur dan adil. Dia juga mengingatkan agar menjaga integritas. Jangan sampai demi keinginan pribadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya.

Sementara, Mahfud MD menutup pidato pasangan tersebut dengan sebuah pantun. Ada dua pantun yang disampaikan oleh Mahfud MD.

"Hukum yang tegak harap kita. Sejahtera merata di depan bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gontong royong pilih nomor tiga," kata Mahfud.

"Satu lagi. Membakar seafood dari



demokrasi," kata Ganjar.

Dia juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang memiliki komitmen yang sama terhadap NKRI.

"Saya terima kasih karena pasangan nomor 01 dan pasangan nomor

"Kami sangat senang, mari kita tunjukkan integritas dan kejujuran itu sampai dengan pikiran batin dan perkataan kita," tambah Ganjar.

Palu. Ke negeri Cina naik pesawat. Kalau Ganjar Mahfud menang Pemilu. Dukungan ke Palestina makin menguat," tutup Mahfud. •

PENGALAMAN DAN JARINGAN MODAL MENANGKAN GANJAR-MAHFUD

Koalisi partai politik pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah memiliki tim yang siap membantu meraih kemenangan pada Pilpres 2024 yang diberi nama Tim Pemenangan Nasional (TPN).

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, dipercaya oleh seluruh partai pendukung untuk menjadi Ketua TPN Ganjar-Mahfud.

TPN Ganjar-Mahfud diisi oleh tokoh-tokoh yang cukup terkenal, mulai dari mantan Panglima TNI, mantan Waka-polri, dan pengusaha top Tanah Air. Tim tersebut nantinya akan membantu kerja-kerja dari pasangan Ganjar-Mahfud dan menyusun strategi bagi pasangan tersebut ketika melakukan kampanye politiknya di masyarakat.

Profil Arsjad Rasjid

Arsjad Rasjid lahir di Jakarta pada 16 Maret 1970. Dia merupakan anak dari pasangan HMN Rasjid yang merupakan Purnawirawan TNI AD dan Suniawati. Arsjad hidup dengan kedua orang tua yang berbeda keturunan. Ayahnya berdarah Palembang, sedangkan ibunya berdarah Sunda-Tionghoa.

Pada 1990, Arsjad Rasjid menuntut ilmu di University of Southern California di bidang Computer Engineering. Pada 1993, dia juga menyelesaikan pendidikannya di bidang Administrasi Bisnis di Pepperdine University, California, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar Bachelor of Science.

Selain itu, Arsjad juga menyelesaikan program Executive Education on Leadership and Decision Making in the 21st Century di Jackson Institute for Global Affairs, Yale University, Amerika Serikat.

Selanjutnya, pada 2013, Arsjad menyelesaikan Executive Education on Impacting Investing di Said Business School, University of Oxford, Inggris. Pada 2012, dia menyelesaikan program

Executive Education Global Leadership and Public Policy for the 21st Century di Harvard Kennedy School, Amerika Serikat.

Lalu, dia juga menyelesaikan program Insights Into Politics and Public Policy in Asia untuk Para Pemimpin Global di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.

Pengalaman Arsjad Rasjid

Arsjad Rasjid menjabat sebagai Direktur Utama Indika Energy. Perusahaan itu bergerak di bidang investasi yang terdiversifikasi terkemuka di Indonesia yang berfokus pada pengembangan dan eksploitasi sumber daya alam, infrastruktur, dan berbagai sektor industri strategis lainnya.

Di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid, Indika Energy terus mengembangkan dan mengelola portofolio bisnis yang luas dan beragam, mencakup sektor energi, logistik, infrastruktur, mineral, bisnis hijau, digital, dan kesehatan.

Portofolio bisnis Indika Energy mencerminkan komitmen perusahaan untuk menciptakan nilai jangka panjang dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Arsjad menjabat sebagai Direktur Utama Indika Energy sejak 2005. Di bawah kepemimpinannya, Indika Energy berhasil mengembangkan berbagai proyek strategis dan ekspansi bisnis, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perusahaan.

Arsjad berhasil membesarkan aset Indika Energy sekitar tujuh kali lipat dari Rp2,78 triliun menjadi Rp18,28 triliun dalam jangka waktu 6 tahun, yaitu pada periode 2005-2011 melalui strategi akuisisi.

Kontribusi Arsjad Rasjid

Pada periode 2021-2026, ia menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, organisasi yang berfungsi sebagai satu-satunya payung bagi bisnis di Indonesia dan mitra strategis pemerintah.



Selaku Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan perkembangan dan keberhasilan pelaku usaha di berbagai sektor industri di Indonesia. Ia memimpin dan mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Arsjad berfokus pada peningkatan kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah dalam rangka menciptakan kebijakan yang pro-bisnis dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, ia mendorong inovasi dan pengembangan industri lokal melalui berbagai program pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan yang ditujukan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hasil dari perjuangannya itu, Arsjad Rasjid berhasil membangun hubungan yang erat dengan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional, serta memastikan dukungan yang kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha di Indonesia. Kepemimpinan dan visinya yang tajam membuat Arsjad dihormati dan disegani sebagai salah satu tokoh bisnis terkemuka di Indonesia.

Melalui peran penting ini, Arsjad Rasjid kembali membuktikan komitmennya untuk memajukan perekonomian Indonesia dan menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Ia menjadi inspirasi bagi para pengusaha dan pebi-

snis di Indonesia untuk terus berinovasi, bekerja keras, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Perjalanan Politik

Pada rapat pimpinan partai politik pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang digelar di Kantor DPP PDIP, 4 September 2023, Arsjad Rasjid diangkat sebagai Ketua TPN.

Keputusan tersebut diambil atas hasil musyawarah yang dilakukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

"Ketua TPN, Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsjad Rasjid tadi diputuskan," kata Hari Tanoe.

Alasan pimpinan partai politik pendukung pasangan Ganjar-Mahfud mengangkat Arsjad karena memiliki pengalaman dan jaringan yang sangat luas. Tidak hanya itu, latar belakang Arsjad juga dianggap sangat mempunyai untuk menakhodai TPN.

"Beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga network-nya (jaringannya) juga sangat luas," jelas Hary Tanoe.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, TGB HM Zainul Majdi membeberkan beberapa strategi yang akan dilakukan untuk bisa memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. TPN akan langsung turun ke masyarakat untuk menyampaikan berbagai macam program kerja dan visi-misi yang akan dilakukan pasangan

Ganjar-Mahfud jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

"Strateginya turun ke bawah, menyapa rakyat menyampaikan tentang apa dan siapa Ganjar-Mahfud," kata Zainul Majdi.

Tidak hanya menyosialisasikan program kerja dan visi-misi, TPN juga akan menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait latar belakang dari Ganjar-Mahfud. Menurutnya, masyarakat harus mengetahui secara lengkap latar belakang dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di Pilpres. Sebab, hal itu juga akan memudahkan masyarakat dalam memiliki calon pemimpinnya di masa depan.

"Rekam jejaknya sangat kaya dan juga misinya cocok untuk kebutuhan Indonesia ke depan," ujar Zainul.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa, membeberkan beberapa strategi yang akan dilakukan untuk memenangkan Ganjar-Mahfud. Salah satunya menggaet kalangan generasi Z, milenial, dan kalangan perempuan.

Mantan Panglia TNI tersebut juga membeberkan strategi utamanya adalah menjalankan kampanye dengan kejujuran. Menurutnya, dengan cara tersebut akan menarik simpati dari masyarakat.

"Kita kini berusaha tampilkan (kampanye) yang apa adanya, karena ini menjadi preferensi pemilih milenial dan Gen Z. Mereka ini generasi yang menyukai kejujuran, tidak suka basa-basi dan open minded," kata Andika. •

Susunan lengkap TPN Ganjar-Mahfud

DEWAN PENASEHAT:
Puan Maharani
Yenny Wahid

Ketua Dewan Pakar: Sandiaga Uno
Ketua TPN: Arsjad Rasjid
Wakil Ketua TPN:
Jenderal (Purn) Andika Perkasa
Komjen (Purn) Gatot Eddy
Letjen (Purn) Joni Supriyanto
Marsekal Madya (Purn) Tatang Harlyansyah
Laksamana Madya (Purn) Desi Albert Mamahit
TGB M Zainul Majdi
Bagas Adhadirga
Rambun Tjajo
Mustar Bona Ventura
Nita Yudi

Eko Sulistyo
Usman M Tokan
Ahmad Basarah
Angela HM Tanoesoedibjo
Benny Rhamdani
Andi Gani Nena Wea
Ammarsjah

Sekretaris Eksekutif TPN: Heru Dewanto
Sekretaris TPN: Hasto Kristiyanto
Wakil Sekretaris TPN:
Moh Arwani Thomafi
Amhad Rofiq
Kodrat Shah
Hotasi Nababan
Sumantri Suwarno

Bendahara Umum TPN: Orias Petrus Moedak

Wakil Bendahara:
Rudianto Tjhen
Sarah
R Arya Permana Graha
Djauhar Mauldi
Henry Suparman

Kepala Staf Pimpinan TPN: Regi Wahyu
Deputi Politik 5.0 TPN: Andi Widjajanto
Deputi Kinetik Teritorial TPN: Komjen (Purn) Luki Hermawan
Deputi Operasi 247 TPN: Denon Prawiraatmadja
Deputi Komunikasi 360 TPN: Prabu Revolusi
Deputi Hukum TPN: Todung Mulya Lubis
Ketua Tim Pemenangan Muda TPN:
Fitria Aldiani
Dharmaji Suradika

GANJAR SEMAKIN MELEJIT

Ganjar Pranowo terus melakukan safari politik ke beberapa tokoh dan ulama di daerah. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga sowan ke tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU).

Diyakini safari politik yang dilakukan Ganjar Pranowo itu akan meningkatkan elektabilitas. Selain itu, jelang hari pencoblosan, elektabilitas Ganjar Pranowo diprediksi akan semakin melejit meninggalkan kompetitornya.

Analisis politik Citra Institute, Efriza, menjelaskan, safari politik yang dilakukan Ganjar Pranowo ke beberapa daerah, terutama ke tokoh NU, merupakan upayanya untuk menarik simpati dari kelompok Islam.

Tidak hanya itu, Ganjar Pranowo juga ingin menarik suara dari masyarakat umum yang mayoritas Islam.

"Ganjar diyakini menyadari PDIP bukan saja semata perlu melekatkan kembali hubungan dengan Nahdlatul Ulama (NU), tetapi mesti pula memperoleh simpati besar dari masyarakat kita yang mayoritas Islam," kata Efriza kepada Info Indonesia, Sabtu, 11 November 2023.

Pendekatan yang dilakukan Ganjar Pranowo ke

kelompok Islam, kata Efriza, adalah untuk mengeruk basis Islam. Sebab, kelompok Islam ini menjadi basis utama dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Maka dari itu, penting bagi Ganjar Pranowo untuk mendekatkan diri ke kelompok Islam guna memecah suara mereka.

"PDIP dan Ganjar menyadari lawan terkuat dengan kekuatan basis Islam dan isu Islam adalah Anies-Imin. Anies tentu saja paling mendapatkan respons besar dari pemilih sosiologis. Melihat fenomena keterpilihan dirinya pada Pilkada DKI 2017," jelas Efriza.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang itu menuturkan, Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tentunya membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi pilpres yang diprediksi akan berjalan dua putaran. Kekuatan yang dimiliki Mahfud MD, PPP, Partai Hanura, Partai Perindo, dinilai belum cukup.

Oleh karena itu, Ganjar Pranowo harus terus melakukan safari ke seluruh daerah di Indonesia guna menggaet suara-suara yang sulit dijamah pasangan lain. Selain itu, Efriza juga menyarankan kepada Ganjar Pranowo untuk sowan ke para pendiri pesantren yang ada di Indonesia.

Efriza menyampaikan, pengaruh dan dukungan yang diberikan kiai dan para pendiri pesantren sangat berpengaruh besar. Sebab, pengikut para kiai pastinya akan satu suara. Jadi, kata Efriza, hal itu sangat menguntungkan Ganjar Pranowo jika memiliki kedekatan dengan para ulama atau pendiri pesantren.

"PDIP oleh sebab itu tak hanya membutuhkan PPP, Mahfud MD, maupun mematok wilayah Jawa Timur untuk harapan mer-



aup perolehan suara. Tetapi, juga melakukan silaturahmi ke daerah-daerah, khususnya kunjungan ke berbagai pondok pesantren,” ujar Efriza.

Dia menilai, Ganjar Pranowo terlihat sudah memahami lingkungan yang berada di pesantren. Ini, kata Efriza, akan semakin memudahkan Ganjar Pranowo untuk mendekatkan diri kepada para pendiri pesantren. Selain itu, Ganjar Pranowo akan semakin mudah untuk mendapatkan dukungan dari lingkungan pesantren.

“Ganjar memahami pola perilaku di lingkungan pesantren masih mayoritas merujuk kepada pilihan kiai. Sehingga, pilihan santri lebih banyak didasari atas arahan dari kiai,” ujar Efriza.

“Tak dipungkiri santri masih menjadikan acuan pandangan kiai sebagai faktor utama sebagai preferensi

kalangan kiai, ulama, santri, adalah pilihan terbaik bagi PDIP agar tidak terulang lagi kekalahan memalukan bagi PDIP seperti DKI Jakarta,” kata Efriza.

Apalagi, keluarga besar dari istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, merupakan salah satu pengurus sejumlah pondok pesantren terkenal di Jawa Tengah. Maka, Ganjar Pranowo akan berupaya sekuat tenaga agar dukungan dari basis Islam semakin menguat kepada dirinya.

“Ini menunjukkan PDIP memang berusaha menggarap unsur Islam agar tidak kalah dari Anies sendiri, maupun PKB dan PKS yang memang partai berideologi Islam untuk memenangkan Anies,” kata Efriza.

“Ini adalah strategi politik dari PDIP untuk menyasar pemilih yang masih mengedepankan isu sosiologis sep-

Dikatakan Efriza, jika pemilu berideologi nasionalis seperti PDIP sudah sangat mengakar sebagai partai lama. Maka dari itu, PDIP melalui capresnya harus kembali membangun komunikasi dengan para petinggi kelompok-kelompok keagamaan, termasuk kelompok Islam.

“Sehingga untuk tujuan tersebut dilakukan safari politik ke pondok-pondok pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah,” kata Efriza.

Sedangkan, untuk mengimbangi kekuatan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabming Raka di Pilpres mendatang, PDIP melakukan serangan dengan gencar yang menyerang Jokowi dan Gibran melalui narasi perilaku menyimpang mereka dari sifat mereka yang tamak akan kekuasaan.

Hal itu sudah terlihat ketika Gibran



dalam memilih. Sehingga, tak juga salah jika dianggap perilaku memilih santri masih dimobilisasi juga tidaklah salah,” kata Efriza menambahkan.

Efriza berpendapat, safari politik ke kelompok Islam ataupun ulama menjadi langkah yang terbaik bagi Ganjar Pranowo. Hal itu untuk menguatkan barisan dukungan dari Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

“Oleh sebab itu, mendekati kiai, membangun komunikasi dengan

erti agama sebagai basis dalam memilih calon,” ujar Efriza.

Dia menyampaikan, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ingin berupaya mengalahkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan merebut suara dari kelompok Islam.

“Jadi untuk berusaha mengimbangi Anies-Imin maka yang digarap oleh PDIP sebagai prioritas adalah unsur Islam,” kata Efriza.

Rakabuming Raka didapuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Apalagi, PDIP kini sudah secara terang-terangan menyerang Gibran Rakabuming Raka sebagai kader yang tidak loyal terhadap partai yang sudah membesarkannya selama ini.

“Seperti narasi yang dibangun oleh PDIP, misalnya pengkhianat, perilaku penguasa politik mengabaikan konstitusi, dan sebagainya,” tandas Efriza. •

ETIKA POLITIK BERDEMOKRASI

Oleh: Asep Saepudin Jahar
Guru Besar dan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Perjalanan panjang demokrasi Indonesia kembali diuji dalam perhelatan Pemilu 2024.

Perilaku dan etika politik tampil di publik menghadapi tantangan yang kompleks, terutama bagaimana membangun demokrasi Pancasila dan mempertahankan saling percaya antar warga bangsa. Memaknai demokrasi dengan partisipasi rakyat menentukan hak pilihnya adalah suatu jargon yang maklum diketahui. Namun, mensimplifikasi demokrasi tanpa membangun trust (kepercayaan) adalah suatu benih bencana yang membahayakan.

Perwajahan demokrasi dalam potret pilpres, pilkada, dan pemilu legislatif kali ini jadi arena yang mengkhawatirkan. Pada satu sisi, upaya partisipasi masyarakat terbuka sebagai ekspresi demokrasi, namun pada sisi lain benih ketidakpercayaan (distrust) menguat. Lebih-lebih parpol tak lagi bersandar pada pencapaian ideologis demi demokrasi yang sehat. Kepentingan politik pragmatis menjadi negosiasi yang menonjol.

Demokrasi dan Kepercayaan

Diawali tahun 1999 dengan pemilu demokratis, hingga 2024, adalah pengalaman demokrasi yang perlu kita rawat setelah masa Orde Baru yang penuh dengan tekanan. Pesta demokrasi 2024, perhatian kita tertuju pada dinamika parpol dalam membangun koalisi untuk bisa mengusung capres dan cawapres.

Kita punya harapan, namun ada rasa cemas karena koalisi antar partai terlihat zig-zag dibentuk berdasar negosiasi kepentingan (political interest) dibanding agenda ideologis jargon partai (political ideology) yang komitmen pada filosofi demokrasi Pancasila. Mengedepankan keputusan politik oleh kekuasaan partai secara kolektif adalah bagian dari praktik demokrasi pada umumnya.

Terlihat para pimpinan partai tersandera oleh masalah dirinya masing-masing. Alih-alih upaya negosiasi dan mencari jalan aman ditempuh dalam menjaga kepentingannya, demokrasi dalam tataran seperti ini menghadirkan demokrasi dilematis seperti yang diungkapkan Francis Fukuyama, sejarawan dan ilmuwan politik AS. Menurutnya, tampilan demokrasi yang bersandar pada kemufakatan partai memperlemah demokrasi ideal. Ia menyarankan saling percaya perlu lebih dimaksimalkan untuk memperkuat arah demokrasi.

Pemilu saat ini menunjukkan ujian penting bagaimana trust dibangun. Negosiasi antar partai untuk mengusung capres-cawapres lebih mengandalkan figur dan aliansi kekuatan politik adalah bagian dari proses demokrasi. Namun, politik client-patron yang sangat kuat dengan model mobilitas "single power" penguasa akan meruntuhkan arah demokrasi kita yang sedang dibangun.

Jika setiap partai berkontestasi bukan pada jargon ideologi partai yang diperjuangkan, tetapi pada kepentingan pimpinan partainya, maka demokrasi prosedural akan selalu jadi model demokrasi di Indonesia. Rakyat hanya jadi tikar untuk tempat bersila para penguasa.

Sudah maklum saat ini bahwa tiga koalisi besar partai-partai untuk mengusung capres-cawapres. Pertama, Koalisi Golkar,

PAN, Demokrat dan Gerindra. Kedua, koalisi PDI-P dan PPP. Ketiga, koalisi Nasdem, PKS dan PKB. Irisan dari ketiga koalisi ini membaaur pada negosiasi politik untuk memperkuat hegemoni aliansinya, tanpa ada perjuangan ideologis demi tegaknya demokrasi seperti yang digagas Pendiri Bangsa.

Akibat yang menguat yaitu kemenonjolan distrust antar anak bangsa, lebih-lebih antar partai. Penulis melihat satu sama lain bisa saling "menyikut", dengan mengabaikan spirit etika berpolitik. Dalam konteks kekinian perlu dibangun pendekatan rasional, seperti dikatakan Charles Thilly (2007) dalam buku *Democracy* yang bertitik tolak dari trust.

Ia menjelaskan, trust adalah dasar keyakinan dalam demokrasi di mana setiap orang atau institusi punya keinginan kuat mewujudkan kesejahteraan bukan semata-mata demokrasi prosedural. Langkah ini, menurutnya, sebagai upaya memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menghindari dilema demokrasi.

Di Indonesia, politik bukan sekadar proses pengambilan keputusan publik, tetapi juga panggung kekuasaan, persaingan ideologi, serta refleksi dari dinamika sosial masyarakatnya.

Namun, dalam konteks kekinian, ada kebutuhan mendesak untuk mengadopsi konsep politik yang arif—suatu pendekatan yang bijaksana, seimbang, serta mampu menciptakan keadaban, kekeluargaan dan kemajuan bersama. Bisakah demokrasi dijadikan pijakan tanpa membangun etika politik, atau dengan kata lain demokrasi adalah semata-mata menghadirkan dukungan rakyat tanpa sama sekali menggunakan etika Politik.

Etika politik keindonesiaan

Keindonesiaan sejak dilahirkan para Founding Fathers dibangun berdasar budaya kekeluargaan dan saling menghormati dengan nilai-nilai luhur yang berkeadaban. Para Pendiri Bangsa bersusah payah membangun negeri untuk mematri model kenegaraan tidak semata mengadopsi sistem dari luar, tetapi selalu melihat bagaimana konteks budaya dan keindonesiaan bisa melekat dalam kebangsaan dan kenegaraan.

Maka Pancasila menjadi temuan yang mulia untuk dijadikan dasar negara untuk berkeadaban dalam keragaman. Dasar negara ini menyelamatkan Indonesia dari keragaman yang rumit, antara nasionalisme dan keagamaan. Maka keunikan politik kita sampai saat ini membaurkan nilai-nilai budaya, seperti terbuka, menghargai dan kekeluargaan yang berkeadaban. Nilai dan etika partai harus berkaca dari cara Pendiri Bangsa berpolitik di masa awal Indonesia.

Jika keindonesiaan menjadi arah politik Indonesia, apakah praktik politik saat ini dibangun pada etika yang berasas nalar Indonesia, atau nalar masa pra-Republik Indonesia yang berdasarkan pada sukuisme dan model kerajaan?

Praktik demokrasi kita masih sangat belia untuk akhirnya mewujudkan menjadi negara demokrasi yang mapan. Persaingan para kontestan, baik partai maupun capres-cawapres harus selalu mengedepankan etika luhur yang konsisten dalam ucapan dan perbuatan.

Tampilan politik yang bermuka ganda dan apalagi tak beretika keindonesiaan, akan jadi contoh buruk buat generasi selanjutnya. Kumandang lagu Indonesia Raya dalam setiap pertemuan resmi atau kendurian di berbagai tempat harus jadi renungan dan pijakan penting dalam etika politik. Jika lagu kebangsaan itu sering kita lantunkan setiap saat namun kita berpraktik politik dengan cara lain, nilai apalagi yang akan kita yakini?

Civil society untuk keadilan politik

Civil society atau masyarakat sipil memiliki peran sangat penting dalam mengembangkan dan memperkuat sistem politik suatu negara. Keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat sipil, seperti organisasi non-pemerintah, LSM, kelompok advokasi, dan komunitas sukarelawan, adalah kunci menciptakan dan memelihara politik yang ideal di suatu negara.

Pemberdayaan politik yang ideal melalui keterlibatan civil society merupakan fondasi bagi masyarakat yang lebih demokratis, inklusif, serta bertanggung jawab. Upaya ini untuk menjembatani membekunya kemandirian partai-partai dalam menyuarakan idealismenya yang sudah tersandera lingkaran kekuasaan.

Civil society berperan sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah dan parpol. Mereka bertindak sebagai pengawas yang kritis terhadap kekuasaan, khususnya kebijakan pemerintah, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses politik.

Pemilu yang jujur dan adil saat ini menjadi taruhan yang harus dikontrol bersama. Keterlibatan civil society juga memberikan wadah bagi partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Dengan memberikan edukasi politik dan mengkritisi kebijakan publik, civil society mendorong partisipasi yang inklusif dari seluruh lapisan masyarakat.

Pemberdayaan politik yang ideal melalui keterlibatan civil society juga membangun jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kolaborasi yang konstruktif, civil society dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Dengan mendorong partisipasi, pengawasan, dan advokasi yang berkelanjutan, civil society menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan politik yang lebih responsif, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Salah satu filosof Jerman yang memiliki pandangan sangat relevan dalam konteks politik dan pemberdayaan masyarakat adalah Jürgen Habermas. Dalam bukunya, *The Structural Transformation of the Public Sphere* (1962), ia menekankan pentingnya dinamika komunikasi sehat dan rasional di masyarakat.

Merujuk pada pandangannya, pada pesta demokrasi 2024 ini kita harus meletakkan ruang publik sebagai ruang terbuka untuk berdiskusi, dan menghasilkan pemahaman kolektif tentang masalah-masalah politik tanpa ada rasa ketakutan atau intimidasi.

Namun kita perlu mewaspadaai adanya "opini publik palsu" (pseudo-public spheres), di mana narasi politik dan kebijakan dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terkadang tanpa keterlibatan yang sebenarnya dari masyarakat. Ini diakibatkan oleh permainan ruang publik oleh kekuatan politik, komersialisasi media dan perkembangan teknologi. Untuk membendung arus politik yang bisa mendegradasi nilai-nilai demokrasi ini kita harus memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif

di ruang publik yang sehat.

Komunikasi yang rasional dan argumen yang berlandaskan kebenaran dalam proses politik akan menjaga proses demokrasi itu sendiri. Syarat mutlak demokrasi bukan semata partisipasi, tetapi juga diskusi yang bermakna, informasi yang akurat, dan pertukaran ide yang bersifat kritis dan konstruktif.

Di masa reformasi 1998, telah banyak korban nyawa melayang karena berjuang untuk mencapai demokrasi yang sehat. Kita harus berterima kasih kepada mereka yang telah menjadi korban demi hadirnya demokrasi saat ini. Tanpa mereka, rasanya tak mungkin kita punya presiden seperti Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudoyono dan Joko Widodo.

Sekarang saatnya kita bertanya, apakah kita akan memutar jarum jam dengan model pseudo demokrasi (demokrasi semu), yaitu demokrasi yang terlihat hanya di tataran muka, namun sebenarnya masih jauh dari tujuan demokrasi itu sendiri?

Budaya komunikatif

Menciptakan politik yang santun dan ideal yang mengusung keterbukaan bagi sesama memerlukan serangkaian prinsip, praktik, dan nilai-nilai yang mendasari perilaku politik. Penting untuk memahami bahwa politik yang santun berakar pada etika, rasa hormat, dan tanggung jawab terhadap individu serta masyarakat. Keterbukaan dalam konteks politik melibatkan transparansi, partisipasi, dan kesediaan untuk mendengar dan memahami perspektif yang berbeda.

Salah satu cara menciptakan politik yang santun dan terbuka adalah melalui kultur politik yang didasari nilai-nilai etika, integritas, dan saling menghormati. Para pemimpin dan aktor politik lainnya harus menunjukkan perilaku santun, berkomunikasi secara bijaksana, serta berupaya menjaga norma etika dalam interaksi politik mereka. Kesantunan dalam politik melibatkan pemahaman bahwa perbedaan pendapat adalah hal wajar, bahkan diperlukan dalam membangun keputusan yang lebih baik.

Keterbukaan dalam politik harus diperkuat melalui transparansi dalam pengambilan keputusan. Informasi mengenai kebijakan, keputusan politik, dan proses pengambilan keputusan haruslah tersedia dan dapat diakses masyarakat.

Hal ini tak hanya memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik, tetapi juga memperkuat legitimasi keputusan politik yang diambil.

Selain itu, penting juga menciptakan ruang bagi partisipasi publik yang inklusif. Keterbukaan dalam politik membutuhkan kerangka kerja yang memungkinkan partisipasi aktif berbagai kelompok dan lapisan masyarakat. Dialog yang terbuka, diskusi yang terarah, dan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan menjadi penting dalam menciptakan politik yang lebih inklusif.

Pada akhirnya, menciptakan politik yang santun dan terbuka memerlukan komitmen bersama untuk membangun budaya politik yang didasari oleh nilai-nilai etika, integritas, dan keterbukaan. Ini melibatkan partisipasi aktif, transparansi, kesediaan untuk mendengar, serta menghormati kepentingan yang beragam dalam masyarakat. Dengan demikian, politik dapat menjadi wahana yang memajukan kepentingan bersama dan menciptakan tatanan yang lebih adil serta inklusif bagi semua. ●



PEMILU 2024 DI SUMSEL HARUS JADI CONTOH NASIONAL

Menjadi yang terbaik sudah menjadi tekad penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni dengan menargetkan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 di Sumsel menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia.

Dimana kesuksesan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada telah menjadi salah satu prioritas utamanya sebagai Pj Gubernur Sumsel dengan mengkoordinir semua kabupaten/kota di Sumatera Selatan untuk secara serentak menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak 2024.

"Targetnya waktu itu tanggal 9 November harus sudah ditandatangani dan kami memang komitmen soal dana Pemilu/pilkada ini harus segera selesai," jelasnya.

Untuk mendukung percepatan penandatanganan NPHD, Direktur Jender-

al (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini juga intens berkoordinasi dengan Pemda kabupaten/kota.

Rapat rutin terus dilakukan melalui zoom meeting guna menyisir berbagai permasalahan untuk mencari solusi. Hasilnya tak sia-sia, penandatanganan NPHD serentak bersama seluruh Kabupaten/Kota di Sumsel menjadi yang pertama di Indonesia.

"Alhamdulillah kita menjadi provinsi yang pertama menandatangani NPHD serentak bersama kabupaten/kota. Makanya generasi muda kita harus semangat. Saya setuju dengan ini Sumsel bisa menjadi percontohan," kata Fatoni.

Fatoni juga memastikan Pemprov Sumsel pada prinsipnya siap mendukung dan mensupport penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada oleh KPU. Dia meminta KPUD Sumsel tak sungkan berkoordinasi dan bersinergi terkait dukungan yang dapat diberikan Pemprov.

"Apa yang diperlukan silahkan komunikasikan ke kita bisa melalui Badan Kesbangpol dan lainnya. Mengenai sosialisasi KPU bisa berkomunikasi dengan Dinas Kominfo kita," ucap Fatoni.

Fatoni berpesan kepada KPU untuk ikut bersama mengantisipasi kerawanan menjelang Pemilu dan Pilkada. Dia berharap, situasi kondusif di Sumsel

dapat dipertahankan.

"Nama baik Sumsel harus dijaga bersama sehingga Sumsel akan menjadi Provinsi terbaik dalam segala hal, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024," ujarnya.

Sementara Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya menyebut telah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota di Sumsel. Saat ini tercatat jumlah pemilih di Sumsel per 27 Juni lalu mencapai 6.326.348 jiwa. Andika mengingatkan sebentar lagi akan memasuki masa kampanye mulai tanggal 28 November 2023 hingga 11 Februari 2024.

"Setelah masa tenang 3 hari yaitu 11-13 Februari, maka pada tanggal 14 Februari kita melaksanakan Pilpres dan Pileg," ujarnya.

Saat ini pihaknya telah melaksanakan persiapan logistik tahap pertama. Tak lupa Andika juga mengajak seluruh pemilih yang terdaftar menggunakan hak pilihnya untuk datang ke TPS.

"Setelah itu kami lakukan pengerjaan logistik tahap 2 baru kemudian DPD menyusul kemudian DPRD dan DPR RI, mudahan-mudahan ini tepat waktu, tepat jumlah," jelasnya.

"Untuk itu kami gencarkan koordinasi ke Pemprov Sumsel terutama untuk dukungan billboard di sejumlah titik sosialisasi mengajak warga ke TPS seperti bandara, stasiun kereta api dan lainnya," lanjutnya.

Jaga Netralitas ASN

Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menghadapi Pemilu 2024. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni siap menaati arahan tersebut.

Mendagri dalam arahannya menegaskan netralitas ASN menjadi kunci keberhasilan Pilkada. Untuk itu agar ASN bersikap netral diminta untuk menjaga jarak dengan semua kekuatan politik pada tahun 2024.

Terkait netralitas ini, Pj Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni di berbagai kesempatan terus mengingatkan jajaran ASN di lingkungan Pemprov Sumsel untuk tetap menjaga integritas dan

profesionalisme serta bersikap netral pada pesta demokrasi tahun 2024.

"ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun, tidak memihak pada kepentingan tertentu, maupun kepentingan apapun," ucapnya.

Menurutnya, apabila terdapat ASN di lingkungan Pemprov Sumsel yang melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan mekanisme sesuai dengan prosedur baik secara internal melalui Inspektorat.

tukan, apakah ini melanggar atau tidak, setelah diketahui pelanggarannya, pelanggaran sedang, pelanggaran ringan dan pelanggaran berat, baru di situ kita tetapkan sanksinya," tegasnya.

Fatoni merinci beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh ASN, diantaranya adalah menjadi peserta kampanye, menggunakan atribut partai, berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, baik itu sebelum, selama dan sesudah kampa-



"Inspektorat akan memeriksa untuk bisa memastikan benar tidak berita yang ada atau Netral atau tidak ASN itu. Namun secara eksternal sesuai dengan fungsi Bawaslu yang akan menen-

nye.

"Tidak boleh posting dan share di sosmed, ikut kampanye, jadi kita ASN itu harus netral. Karena ASN ini milik semua," ucapnya. ●

PENANGANAN KARHUTLA DI SUMSEL SESUAI RENCANA

Bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan menjadi perhatian pemerintah pusat untuk dilakukan penindakan. Sehingga penanganan Karhutla menjadi salah satu fokus utama Penjabat Gubernur Sumsel, Agus Fatoni selama menjabat.

Untuk melihat keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dalam menangani Karhutla ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya turun langsung ke lokasi sekaligus menggelar rapat bersama Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni bersama jajarannya.

Melihat kinerja dalam menangani Karhutla ini Menteri LHK Siti Nurbaya mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sumsel, Forkopimda, Bupati/Walikota serta stakeholder lainnya sudah bekerja keras.

"Kita juga sudah menganalisis di

wilayah Sumsel secara keseluruhan. Tahun 2023 ini jumlah titik panas mengalami penurunan menjadi 80 persen atau sekitar 10.090 titik dibanding dengan tahun 2019 jumlahnya 29.000 titik terus tahun 2015 jumlahnya 71.000 titik api," katanya.

Selain itu, Siti Nurbaya mengatakan terkait perusahaan yang melanggar aturan sudah ada langkah-langkah oleh Ditjen Gakkum.

"Saya sudah mendapat laporan dari Pemda termasuk langkah-langkah sanksi hukum. Kita bisa parallel, tidak ada masalah," ungkapnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel

Agus Fatoni mengatakan dalam upaya penanganan Karhutla, Pemprov Sumsel bersama Forkopimda termasuk Bupati/Walikota serta stakeholder yang lain terus bersinergi.

Fatoni menyebutkan berbagai langkah yang dilakukan, salah satunya dengan melakukan pergeseran anggaran untuk penanganan Karhutla di tingkat kabupaten/kota.

Menurutnya Pemda bisa melakukan pergeseran anggaran dalam kondisi darurat. Artinya tidak ada alasan Pemda tidak ada anggaran terutama dalam penanganan karhutla.

"Kita juga mengarahkan agar me-



manfaatkan dana anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang memang diperuntukan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi,” pungkasnya.

Turun ke Lapangan

Bukan hanya menerima laporan Pj Gubernur Agus Fatoni bersama Menteri LHK juga meninjau langsung ke salah satu lokasi Karhutla yakni di Desa Jungkal Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Melihat beratnya lokasi medan yang dilalui serta kondisi wilayah yang terbakar Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan, lahan gambut sulit padam jika terbakar dikarenakan api tidak saja membakar bagian atas tetapi api juga akan menjalar hingga bagian akar dengan kedalaman beberapa meter ke bawah. Untuk itu dirinya mewanti-wanti agar lahan gambut jangan sampai terbakar.

“Jadi memang kita menjaganya seluruh provinsi, ini perkiraan saya sekarang sudah memasuki pertengahan November biasanya di tanggal 4 November itu sudah selesai. Saya bersama Pak Gubernur mengunjungi Sumsel melihat titik spot terakhir, apalagi Sumsel ini kan wilayah gambutnya luas,” ungkapnya.

Menteri Siti Nurbaya menyebutkan ada 3 pendekatan yang diperintahkan oleh Presiden RI Joko Widodo untuk pencegahan karhutla secara permanen yaitu pendekatan pengendalian cuaca.

“Jadi kita cek hotspot-nya, kita cek kontrol, pola hujan nya, awan apakah bisa di modifikasi cuaca,” tambahnya.

Kedua lanjutnya, patroli terus dilakukan baik patroli darat maupun udara dan ketiga adalah pen-

gendalian lanskap.

“Saya melihat secara koordinasi Pak Gubernurnya sudah oke. Termasuk dari anggarannya juga oke,” tutupnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengaku bersyukur atas

prehensif,” katanya.

Selain itu komprehensif, Fatoni menyebutkan penanganannya juga harus terpadu, semuanya bergerak kemudian juga harus berkesinambungan bukan hanya mengatasi kebakarannya saja tetapi



kehadiran Menteri LHK di Sumsel.

“Tadi dijelaskan secara teknis dan kita juga melakukan evaluasi dimana penanganan karhutla ini bisa ditangani secara kom-

bagaimana menyiapkan, mengantisipasi kebakaran yang akan datang.

Maka lanjut Fatoni akan disiapkan dokumentasi penanganan di lapangan seperti ini. Sehingga generasi ke depan bisa mengetahui penanganan itu sudah dilakukan di Sumsel sebelumnya.

“Kita bersama Forkopimda sudah berjalan bersama Bupati/Walikota, masyarakat sudah bergerak, artinya dalam penanganannya kita bersyukur membaik di perlu komprehensif dan terpadu,” pungkasnya. •

SUKSES KENDALIKAN ANGKA STUNTING

Berbagai program terus dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni dalam pengendalian stunting. Atas semua kerja keras yang dilakukan Provinsi Sumatera Selatan sukses menurunkan angka stunting tertinggi di Indonesia.

Dimana saat ini, angka stunting di Sumsel berada di angka 18,6% atau turun 6,2% dibanding tahun 2021 dengan angka 24,8%. Angka ini menjadi penurunan tertinggi di Indonesia.

"Kemiskinan ekstrem kita juga stabil, angka stunting masih di angka 18,6 persen dari penurunan sebelumnya. Kita ingin angka stunting bisa ditekan

lagi dan menurun lebih banyak lagi," harap Agus Fatoni.

Fatoni menyampaikan bahwa upaya percepatan penurunan prevalensi stunting mengacu kepada strategi nasional penurunan stunting melalui 5 Pilar.

"Pilar pertama, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa," terangnya.

Kedua, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.

Ketiga, peningkatan konvergensi Intervensi spesifik dan intervensi sensitif di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.

Selanjutnya keempat, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Terakhir penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Selain penurunan angka stunting, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni berharap agar pertumbuhan ekonomi naik serta kemiskinan ekstrem menurun di Sumsel. Sehingga dia meminta keterlibatan semua pihak, termasuk anggota KADIN Sumsel dapat berkontribusi.

"Capaian pertumbuhan perekonomian, inflasi, penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting yang ada sudah bagus sebelumnya. Tinggal kedepannya kita ingin capaian ini jadi lebih bagus lagi dan dimaksimalkan dengan cara kolaborasi bersama semua pihak termasuk dibutuhkan peran dunia usaha dan juga KADIN," ucapnya.

Saat ini dunia usaha di Sumsel terus bangkit untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

"Yang terpenting dunia usaha harus segera bangkit jalin kemitraan bersama pemerintah daerah dalam mengejar pertumbuhan ekonomi dan tersedianya lapangan pekerjaan," tandasnya.

Turun Hingga ke Desa

Upaya penurunan angka stunting ini dilakukan langsung Agus Fatoni hingga ke desa-desa dengan memberikan bantuan makanan untuk bayi, balita dan ibu hamil. Salah satunya memberi bantuan ke Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Fatoni didampingi Pj Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sumsel Tyas A. Fatoni menyerahkan bantuan makanan kepada masyarakat. Penyerahan bantuan dilakukan usai peresmian Pasar Desa Tungku Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap dan Pasar Desa Sari Bumi Desa Karya Mukti Unit 12 Kecamatan Sinar Peninjauan yang dipusatkan di Desa Bumi Desa Tungku Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten OKU.

Bantuan yang diberikan berupa be-



ras 5 kilogram, telur satu kilogram, susu, sosis dan vitamin. Fatoni berharap bantuan ini bermanfaat untuk memenuhi asupan gizi bagi anak-anak yang rentan agar terhindar dari risiko stunting.

"Stunting itu yang pertumbuhan badannya tidak bagus, yang pertumbuhan badannya tidak normal dan berdampak pada kesehatan, berdampak pada perkembangan otaknya, kalau semuanya tidak bagus," ucap Fatoni.

Dia mewanti-wanti kalangan orang tua untuk memberikan perhatian khusus agar asupan gizi dan vitamin anak tercukupi yang nantinya akan sangat berpengaruh dengan pertumbuhan dan kecerdasan anak di masa depan.

"Jika asupan gizi tidak terpenuhi maka perkembangannya akan membuat anaknya tidak pintar dan tidak sehat. Kalau tidak pintar dan tidak sehat tidak bisa sekolah dengan baik tidak bisa melaksanakan aktivitas dengan baik dan akhirnya masa depannya tidak bagus," kata dia.

Fatoni menyebut, untuk memastikan asupan makanan bergizi pada balita menjadi tugas semua pihak guna memenuhi asupan yang cukup. Dia juga meminta masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang ada di sekitar dengan menanam sayur.

"Makanan yang bergizi, makan bergizi tidak harus mahal, ada di kebun kita, ada di lingkungan kita, ada di kandang kita. Makan daging, makan telur, makan daun singkong, makan buah pepaya, makan pisang itu banyak sekali di lingkungan kita silakan dimakan," ucap Fatoni.

Masih di Kabupaten OKU, Agus Fatoni juga menebar 10 ribu bibit ikan nila di Kolam Wisata Rantau Kumpai, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Dengan mengkonsumsi ikan dapat memberikan asupan gizi yang lengkap bagi bayi dan ibu hamil.

"Mengingat konsumsi ikan dapat memberikan asupan gizi yang lengkap kepada bayi dan ibu hamil sehingga baik untuk pertumbuhan janin," kata Fatoni.

Fatoni berharap bibit ikan yang ditebar ini nantinya dapat menjadi bahan konsumsi harian masyarakat yang mudah didapat dan diolah.



"Nanti kalau ikannya sudah besar, ikan di sini bisa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Saya berharap para ibu-ibu masyarakat sini mempunyai pola hidup sehat sehingga terhindar dari resiko melahirkan anak-anak yang berpotensi stunting," ucapnya.

Fatoni mengajak masyarakat untuk

memahami, bahwa sumber protein tidak hanya pada daging, namun justru ikan merupakan sumber protein yang melimpah dan mudah didapat dengan melakukan budi daya.

"Kalau gizi bagus, pertumbuhan bagus maka stunting bisa dicegah sejak dini," terangnya. ●



TARGETKAN MASUK 2 BESAR PRODUKSI PADI NASIONAL

Hingga saat ini produksi padi di Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu sektor kebanggaan dikarenakan masuk dalam peringkat lima besar secara nasional. Untuk itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menargetkan produksi padi masuk peringkat dua besar secara nasional.

Hal ini dikarenakan Provinsi Sumatera Selatan mendapat alokasi dari Kementerian Pertanian RI dalam pembukaan lahan sawah baru seluas 200 ribu hektar. Sehingga target ini bukanlah tidak mungkin untuk direalisasikan.

"Untuk itu saya mengharapkan dukungan semua pihak agar yang sudah dicapai ini bisa lebih baik kedepannya," kata Fatoni.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sumatera Selatan Bambang Pramono mengatakan untuk meningkatkan produksi padi di Sumsel, pihaknya akan memperluas lahan sawah di akhir tahun 2023 seluas 100 ribu hektar siap garap. Sedangkan di tahun 2024 dilanjutkan dengan 100 ribu hektar lagi.

"Setelah mendapatkan arahan langsung dari Mentan RI di Sumbawa lalu, Provinsi Sumsel sebagian jatah seratus ribu hektare namun Pak Gubernur optimis jika perluasan tersebut digarap

menjadi dua ratus ribu hektar. Alhamdulillah bantuan benih padi dan sarana produksi lainnya diberikan oleh Kementan di tahun 2024 untuk seratus ribu hektare," jelas Bambang.

Bambang menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan berbagai upaya mendorong pelaksanaan optimalisasi lahan rawa menjadi sawah siap tanam dengan membentuk tim di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk melibatkan unsur TNI/Polri, PT Pusri dan mitra kerja lainnya.

"Produksi kita saat ini sudah 1,5 juta ton. Maka dengan penambahan tersebut produksi beras menjadi 3 juta ton di tahun 2024," kata dia.

Cetak Sawah 200 Ribu Hektar

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia (RI) terus melakukan upaya dalam meningkatkan produksi padi dan beras di Indonesia. Kementan RI secara khusus memberikan kuota untuk mencetak 200 ribu hektar sawah

baru di Sumsel.

Nantinya 100 ribu hektar sawah baru akan direalisasikan pada tahun 2023. Sementara itu, 100 ribu hektar selanjutnya akan direalisasikan pada tahun 2024.

Diharapkan dengan adanya penambahan garapan lahan sawah seluas 200 ribu hektare tersebut mampu menambah produksi beras di Sumsel.

Mentan menargetkan produksi beras Indonesia di tahun 2024 menjadi 37 juta ton beras. Meningkat jika dibanding produksi tahun 2023 saat ini masih pada angka 31,3 juta ton.

"Untuk merealisasi target tersebut Kementan mengharapkan Sumsel ikut menambah produksi beras di tahun 2024," ucap Mentan.

Dalam kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Sumsel (Sumsel) Agus Fatoni menyambut baik kuota perluasan lahan yang ditargetkan Menteri Pertanian tersebut.

"Sumsel siap mendukung program Optimalisasi Pengembangan Lahan Rawa Menjadi Lahan Sawah," ucap Fatoni.

Fatoni memaparkan di Sumatera Selatan terdapat 3.263 jumlah desa/kelurahan. Sementara itu, 3.245 desa/kelurahan diantaranya telah terdaftar di Simultan.

"Dari jumlah tersebut terdapat petani yang telah teregistrasi dalam Simultan sebanyak 791.199 petani, jumlah petani tersebut tergabung dalam 36.431 kelompok tani, 958 Kelompok Wanita Tani (KWT), 2.921 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan 695 Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)," jelas Fatoni.

Fatoni menjelaskan, Sumsel menjadi satu-satunya Provinsi di Indonesia yang telah mengangkat Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian (PPEP) yang merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan satu desa satu penyuluh yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel.

"Dengan jumlah PPEP pada tahun 2023 sebanyak 1.910 orang dengan rincian 1.400 PPEP Dinas Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel, 240 orang di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan,

200 orang di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 70 orang di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumsel," kata Fatoni.

Sementara itu Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sumsel, Bam-

jika perluasan tersebut digarap menjadi dua ratus hektar. Alhamdulillah bantuan benih padi dan sarana produksi lainnya diberikan oleh Kementan di tahun 2024 untuk seratus ribu hektare," jelas Bambang.

Nantinya dalam waktu dekat pihak-



bang Pramono mengatakan untuk meningkatkan produksi padi di Sumsel, pihaknya akan memperluas lahan sawah di akhir tahun 2023 dengan 100 ribu hektar siap garap. Sedangkan di tahun 2024 dilanjutkan 100 ribu hektar lagi.

"Setelah mendapatkan arahan langsung dari Mentan di Sumbawa kemarin, Sumsel kebagian jatah seratus ribu hektare, namun Pak Gubernur optimis

ya akan melakukan berbagai upaya mendorong pelaksanaan optimalisasi lahan rawa menjadi sawah siap tanam dengan membentuk tim di tingkat provinsi, kabupaten/ kota termasuk unsur TNI, Polri, PT Pusri dan mitra kerja lainnya.

"Produksi kita saat ini sudah 1,5 juta ton. Maka dengan penambahan tersebut produksi beras menjadi 3 juta ton di tahun 2024," ucapnya. •

BERHASIL KENDALIKAN LAJU INFLASI

Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) terus melakukan upaya menekan laju inflasi. Pengendalian laju inflasi ini melibatkan semua pihak hingga tingkat kabupaten/ kota.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni meminta semua stakeholder terlibat langsung dalam pengendalian inflasi dan menjaga ketersediaan pasokan pada akhir tahun 2023 di Sumsel.

"Kepala daerah perlu melihat pengaruh inflasi di masing-masing daerahnya, ini menjadi atensi khusus. Karena ini menyangkut hajat orang banyak,

himbau masyarakat untuk melakukan gerakan tanam mandiri secara masif," ujarnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga mengharapkan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumsel melakukan operasi pasar secara masif dan sidak kepada distributor pangan, agar tidak terjadi kecurangan yang mempengaruhi stabilitas harga.



menyangkut ekonomi kita dan menjadi penilaian juga pemerintah pusat," kata Fatoni.

Dalam melakukan upaya pengendalian inflasi, Fatoni minta kepala daerah melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok pangan serta meminta seluruh pemangku kepentingan mensosialisasikan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) kepada masyarakat.

"Kita jangan hanya bekerja dibalik layar namun kita juga perlu untuk langsung terjun ke lapangan memastikan ketersediaan stok pangan, juga kita

"Sesekali kita perlu melakukan sidak di pasar dan distributor jangan sampai ada distributor yang bermain-main ataupun penimbunan sehingga mengganggu kestabilan harga, ini bisa dilakukan kerja sama dengan pihak kepolisian apabila terjadi pelanggaran itu langsung bisa dilakukan penindakan," imbuhnya.

Dia juga mengharapkan TPID di daerah juga melakukan koordinasi secara intens dengan daerah sekitar yang memiliki stok pangan untuk selanjutnya dilakukan distribusi ke daerah sekitar yang mengalami kekurangan stok.

Sementara untuk menunjang kestabilan inflasi tentu memerlukan anggaran yang cukup. Salah satunya dengan memanfaatkan dana anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang diperuntukan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi.

"Saya minta kepala daerah memahami betul Pasal 69 Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 dan tolong dijelaskan kepada OPD," jelasnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumsel, Ricky Perdana Gozali dalam laporannya menjelaskan Inflasi umum di Sumsel pada keseluruhan tahun diperkirakan berada pada kisaran target inflasi nasional sebesar 3,0 kurang lebih 1 persen. Melandasi tekanan inflasi 2023 diperkirakan sejalan dengan melandasinya inflasi volatile food, core inflation dan administered price.

Pada volatile food, Ricky mengatakan melandasinya inflasi dipengaruhi juga oleh Program Pemerintah Daerah melalui GSMP, Sinergi TPID, GNPIP, optimalisasi pasar murah, gerakan tanam, digital farming dan inovasi alsintan.

"Berdasarkan pantauan harga terhadap komoditas cabai merah, cabai rawit, gula pasir, bawang merah perlu diwaspadai kenaikan harganya. Sementara itu, untuk harga komoditas beras, minyak goreng, daging sapi stabil, sedangkan untuk komoditas telur ayam ras, daging ayam ras, dan bawang putih mengalami penurunan," paparnya.

Pertumbuhan Ekonomi Sumsel Lebih Nasional

Keberhasilan mengendalikan inflasi membuat pertumbuhan ekonomi

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) lebih tinggi dibandingkan capaian nasional. Berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal III Tahun 2023 di Sumsel tercatat mencapai 5,08% (year-on year/YoY) sementara pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,94%.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel Moh Wahyu Yulianto menjelaskan pertumbuhan ekonomi Sumsel pada kuartal III Tahun 2023 meningkat jika dibandingkan kuartal II Tahun 2023 sebesar 2,39%.

"Neraca perdagangan Sumsel surplus US\$ 1,19 miliar pada kuartal III Tahun 2023 atau konstruksi sebesar 41,43% (YoY). Beberapa komoditas unggulan ekspor provinsi Sumsel, yaitu bahan bakar mineral, bubur kayu (pulp), karet, minyak dan gas," ujar Wahyu.

Ada sejumlah faktor yang membuat ekonomi Sumsel tumbuh dengan stabil. Di antaranya produksi padi secara YoY naik sebesar 11,03% dan secara q-to-q juga naik 13,53%. Kemudian, untuk produksi karet dengan karakteristik SIR 10 dan SIR 20 secara YoY naik sebesar 0,87%.

"Realisasi pengadaan semen secara YoY naik sebesar 3,80%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita secara YoY naik sebesar 20,10%. Juga realisasi belanja modal pemerintah secara YoY naik sebesar 99,67%, dan secara q-to-q naik sebesar 50,83%," jelas Wahyu.

Wahyu mengatakan sejumlah sektor memberikan kontribusi yang cukup tinggi bagi pertumbuhan ekonomi. Di antaranya, sektor pertambangan 10,23%, sektor transportasi sebesar 5,88% dan sektor akomodasi dan makanan mencapai 12,93%.

"Pertambangan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,33%," imbuhnya.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumsel turun 0,52% pada Agustus 2023 atau berada pada 4,11 persen jika dibandingkan pada Agustus 2022 sebesar 4,63 persen. Kemudian perbaikan kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar

5,08 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan III Tahun 2023.

Keberhasilan Agus Fatoni dalam mengendalikan laju inflasi ini bisa dilihat secara nyata.

Salah satunya memberikan contoh langsung kepada masyarakat dengan menanam bawang merah di Kecama-

akan sangat terbantu. Ini dikarenakan masyarakat juga berperan langsung dalam meningkatkan perekonomian daerah.

"Masyarakat dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan pokok hal ini dapat membantu perekonomian sehingga mampu menekan inflasi," ucap



tan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten OKU, Sumatera Selatan.

"Kali ini kita berada di lokasi penanaman bawang. Di tempat ini terus produksi bawang setiap tahun, di sini sentralnya dan berharap dari sinilah kemudian bisa mensuplai daerah-daerah lain yang ada di Sumsel sehingga harga bawang bisa terjaga harga bawang bisa terkendali," kata Fatoni.

Menurutnya, melalui cara mandiri tersebut program penanganan inflasi

Fatoni.

Terkait stok pangan, Fatoni memastikan stok bahan pokok terutama komoditas beras di Sumsel akan cukup hingga bulan Maret tahun 2024.

"Kita masih cukup beras, begitu juga produksi beras kita juga cukup dan saya berharap masyarakat. Kemudian juga pedagang agar tidak menjual berasnya keluar. Kita utamakan untuk mencukupi kebutuhan kita sendiri," tegasnya. ●



I Wayan Koster

BELUM ADA PENANTANG SEPADAN, DAPAT RESTU PERIODE KEDUA

I Wayan Koster
merencanakan
untuk bersantai
sejenak di de-
sanya setelah
melepaskan
jabatannya seba-
gai Gubernur Bali.



Soal partisipasinya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2024 mendatang, Wayan Koster menyatakan bahwa bergantung pada keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Meskipun calon gubernur yang akan didukung oleh PDIP berada di bawah kendali DPP, Gubernur yang baru saja menyelesaikan satu periode jabatannya tetap berharap untuk mendapatkan doa restu dari masyarakat Bali selama periode keduanya.

"Ya kan nanti tergantung penugasan partai. Mohon doa restu untuk periode yang kedua," ujar Wayan Koster.

Bahkan Wayan Koster dengan yakin menyatakan sumber pendapatan bagi Provinsi Bali akan bertambah jika terpilih kembali pada Pilgub 2024.

"Di periode kedua, sumber pendapatan (Bali) sudah meningkat. Saya sudah mencari sumber pendapatan daerah yang lain. Kalau mengikuti undang-undang, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB) tetap sama. Sepuluh tahun menjabat gubernur, belum ada perubahan apa pun," jelasnya.

Secara tersirat, Koster menyikapi kemungkinan menggandeng Cok Ace untuk periode kedua.

"Oh ya. Kenapa kita harus berpisah?" kata Koster.

Ia pun mengutarakan pendapat pribadinya mengenai kinerja Cok Ace selama 4 tahun 5 bulan menjabat wakil gubernur mendampinginya.

"Beliau orangnya baik, sopan dan menjalankan tugasnya dengan efektif. Komunikasi kita selalu baik," tambah Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Bali ini.

Menanggapi hal tersebut, mantan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menyatakan keinginan Koster mencerminkan kemauan masyarakat.

"Iya, sebenarnya permintaannya juga mencerminkan keinginan mayoritas masyarakat dan dia tidak akan mengundang saya jika masyarakat tidak memberinya lampu hijau. Untuk apa dia mengambil risiko dengan mengundang saya?," katanya.

Pria yang akrab disapa Cok Ace juga menyebutkan hubungan kerja sama yang baik dengan Koster semasa

kepemimpinannya di Bali.

Ia menegaskan, dirinya telah berupaya semaksimal mungkin sebagai wakil gubernur dan menjalankan program-program yang ada.

"Saya sudah bekerja semaksimal mungkin bersama Gubernur Koster. Pokoknya saya wakilnya, dan dia Gubernur Bali. Jadi, saya harus selaraskan dengan program-program

Di sisi lain, DPD PDIP Bali memberikan tanggapan terkait harapan Wayan Koster untuk mendapatkan doa restu dari masyarakat Bali.

Bendahara DPD PDIP Bali, Dewa Made Mahayadnya, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, menyatakan bahwa kader PDIP Bali yang telah menunjukkan kinerja dan prestasi yang baik seharusnya di-



beliau," tambahnya.

Saat ditanya kesediaannya mendampingi Koster di Pilgub 2024, Cok Ace enggan menjawab pasti.

Cok Ace pun mengakui, hubungan dengan Gubernur Koster selama ini baik-baik saja.

"Selama ini sudah baik, sangat harmonis, saling mendukung," imbuhnya.

rekomendasikan sebagai calon Gubernur Bali untuk kedua kalinya.

"Kader yang sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan penuh dengan prestasi harus direkomendasikan maju sebagai Gubernur untuk yang kedua kalinya," ungkap Dewa Jack, sebagaimana ia dikenal.

Ketika ditanya mengenai dukungan

dari DPC PDIP Kabupaten/Kota di seluruh Bali, Dewa Jack tidak dapat memberikan banyak komentar. Ia menjelaskan bahwa PDIP memiliki mekanisme tersendiri sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tersebut.

Sementara, Pengamat Politik I Nyoman Subanda berpendapat bahwa meskipun popularitas I Wayan Koster kemungkinan akan mengalami penurunan setelah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Bali pada bulan Septem-

pat melakukan kunjungan ke daerah, membuka acara, atau memberikan bantuan kepada masyarakat, yang tentu saja akan berdampak pada penurunan popularitasnya. Namun, meskipun begitu, popularitasnya tetap akan kuat," kata Subanda.

Subanda menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang akan menjaga popularitas Wayan Koster tetap tinggi.

Pertama, selama masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali, Koster mendapatkan apresiasi yang tinggi

mendukung Koster. Subanda mencatat bahwa PDI-P adalah partai yang kuat dan berpengaruh di Bali. Di seluruh kabupaten/kota di Bali, PDI-P memiliki kader-kader yang menduduki posisi kepala daerah dan anggota DPRD.

"Dengan dukungan dari mesin partai PDI-P, Koster akan tetap menjadi salah satu calon kuat dalam Pilgub Bali. Mesin partai ini juga akan menjaga popularitasnya tetap tinggi saat Pilgub nanti," tambahnya.

Terakhir, faktor ketiga adalah



ber 2023 dan digantikan oleh penjabat sementara, namun ia tetap akan menjadi figur yang kuat dalam Pilgub Bali 2024.

Menurut Subanda, penurunan popularitas Wayan Koster setelah meninggalkan jabatan gubernur disebabkan oleh fakta bahwa Koster tidak lagi memiliki alat komunikasi dan sarana untuk berinteraksi dengan masyarakat seperti saat ia masih menjabat sebagai gubernur.

"Misalnya, Koster tidak akan lagi da-

atas berbagai program pembangunan yang telah dijalkannya.

"Koster telah melakukan pembangunan Pelabuhan di Denpasar, pembangunan di Besakih, shortcut di Buleleng, rencana pembangunan Tol dan pembangunan PKB di Klungkung. Meskipun program-program ini mendapatkan respons yang beragam dari masyarakat, mereka akan tetap mengingatnya," ungkapnya.

Selanjutnya, faktor kedua adalah keberadaan mesin partai PDI-P yang

kurangnya figur atau sosok yang muncul sebagai penantang bagi Koster dalam Pilgub Bali. Subanda berpendapat bahwa situasi ini justru akan menguntungkan dan memperkuat posisi Koster.

"Dengan tidak adanya calon lawan yang muncul hingga saat ini, baik dari partai politik maupun sebagai calon independen, Koster akan memiliki keunggulan yang signifikan. Inilah yang membuatnya sulit untuk dikalahkan," pungkasnya. ●

A close-up portrait of a man with a friendly expression, wearing a white button-down shirt and a black cap. He is looking slightly to the right of the camera.

MENANTI PRIORITAS STRATEGIS PAN DI JAMBI

Pemilihan Gubernur (Pil-gub) Jambi 2024 sepertinya menjadi medan pertempuran antara dua tokoh kader PAN yang sangat menonjol antara Romi Haryanto dan Al Haris.

Romi Haryanto merupakan Bupati Tanjung Jabung Timur dan Al Haris menjabat sebagai Gubernur Jambi, keduanya tidak hanya bersaing untuk memperebutkan kursi pemerintahan, tetapi juga berjuang keras untuk memenangkan dukungan dari partai dengan lambang matahari ini.

Romi Haryanto, didorong dengan keyakinan yang kuat oleh Ketua DPD PAN Kota Jambi, Rusli Kamal Siregar,

resmi mengenai Pilgub Jambi 2024.

Sebenarnya, Romi Haryanto bukanlah satu-satunya kader PAN yang bersinar di Jambi. Al Haris, yang menjabat sebagai Gubernur, juga merupakan bagian dari PAN dan diharapkan akan ambil bagian dalam persaingan untuk Pilgub berikutnya.

"Kedudukan Al Haris sebagai Gubernur memberinya keunggulan tersendiri, tetapi persaingannya dengan Romi pasti akan memanas," jelasnya.

Tantangan utama bagi PAN adalah bagaimana memanfaatkan peluang di Pilgub tanpa memecah partai. Jika keduanya maju tanpa konsolidasi dukungan, PAN berisiko memecah suara pemilih dan melemahkan posisi mereka.

Dinamika Pilgub Jambi dapat menjadi indikator tentang bagaimana PAN akan berperilaku dalam kontestasi politik nasional.

Keputusan PAN di Jambi dapat mencerminkan prioritas strategis mere-



nampaknya memulai pertarungan ini dengan berbekal momentum yang cukup solid.

"Romi adalah kader PAN murni," katanya.

Rusli Kamal seakan-akan menggarisbawahi bahwa Romi adalah kader tulen PAN yang pantas mendapatkan dukungan penuh dari partai ini.

Namun, Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, Bakri, memberikan tanggapan yang sangat tegas. Baginya, dukungan yang dinyatakan oleh Rusli Kamal Siregar hanyalah pendapat pribadi, dan PAN masih berfokus pada Pilpres dan Pileg. Saat itu, belum ada pembicaraan

Momentum menarik ini mencerminkan dinamika internal PAN yang sedang berlangsung. Bagaimana partai ini akan membuat keputusan, apakah akan mendukung kader lama yang sudah berkuasa atau memberikan kesempatan pada tokoh baru, menjadi pertanyaan yang sedang hangat dibicarakan di kalangan publik.

Pertarungan antara Romi dan Al Haris dalam Pilgub Jambi 2024 tidak sekadar menentukan siapa yang akan memimpin Jambi, melainkan juga berkaitan dengan strategi PAN di tengah tantangan kompleks dalam dinamika demokrasi.

ka, apakah mereka akan mendukung kader yang sudah mapan atau memberi peluang kepada figur baru untuk pertumbuhan dan regenerasi partai.

Sementara Barisan Merah Putih (BM) PAN Kota Jambi dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Bupati Tanjung Jabung Timur, Romi Hariyanto, untuk maju sebagai Cagub Jambi pada Pilgub 2024 mendatang.

Ketua BM PAN Kota Jambi, Teuku Gilang, menegaskan bahwa partainya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dasar barisan dan nilai-nilai dasar perjuangan partai dalam menentukan calon pemimpin.

"Dalam menilai calon pemimpin, sangat penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai kepentingan dan ideologi partai," ulasnya.

Gilang menjelaskan bahwa Romi Hariyanto adalah contoh yang ideal dalam perkaderan partai, sebab beliau lahir dari kelompok BM PAN dan kemudian bergabung dengan PAN.

Dia percaya bahwa nilai-nilai perjuangan partai akan selalu melekat pada sosok Romi Hariyanto, mengingat per-

Mashuri, Adirozal, dan sejumlah tokoh politik lainnya di wilayah barat Jambi.

Dari semua tokoh yang ditemuinya di wilayah barat Jambi, Romi tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Mashuri, Ketua DPD Demokrat Jambi.

Kedekatan ini terlihat dari frekuensi kunjungan mereka satu sama lain, baik di Bungo maupun di Tanjung Jabung Timur. Bahkan, dalam perkembangan terbaru, Mashuri tampaknya telah men-

Romi dan Mashuri disebut cocok sebagai pasangan karena mereka mewakili wilayah timur dan barat Jambi, dan dalam hal usia, mereka juga memiliki perbedaan yang dapat memberikan keuntungan tambahan.

"Jika itu adalah yang terbaik untuk daerah mereka, mengapa tidak," tambahnya.

Selain kunjungan ke Bungo, Romi juga secara aktif bertemu dengan Bupati Kerinci, Adirozal, untuk membahas



jalan politik yang dimulai dari BM PAN dan berlanjut di PAN.

"Saya yakin bahwa Romi Hariyanto adalah calon pemimpin yang memahami dan menerapkan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai perjuangan partai," tambahnya.

Saat ini Romi Hariyanto sedang aktif dalam menjalani rangkaian kunjungan ke berbagai daerah di Provinsi Jambi, seperti Bungo, Merangin, dan Kerinci.

Dalam upayanya untuk membangun jejaring politik yang kuat, Romi juga kerap kali terlihat bertemu dengan berbagai tokoh terkemuka, termasuk

dapat sambutan yang hangat dari Ketua DPD PAN Tanjung Jabung Timur.

"Kemungkinan timur dan barat," ujar Romi singkat

Hubungan erat antara Romi dan Mashuri ini menimbulkan spekulasi mengenai apakah mereka akan berpasangan dalam Pilgub yang akan datang pada tahun 2024.

Ketika ditanya tentang kemungkinan ini, Romi, seorang politisi PAN, tidak menampik kemungkinan kolaborasi antara mereka, mengatakan bahwa kemungkinan timur dan barat bisa menjadi pasangan yang kuat untuk Pilgub mendatang.

langkah-langkah bersama dalam memajukan provinsi Jambi ke depan.

Selain menjalani penajakan untuk mencari calon wakil gubernur yang sesuai, Romi juga menjalin komunikasi dengan berbagai partai politik, termasuk Partai Golkar.

Ia terlihat bertemu dengan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi, Cek Endra, dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman Romi Hariyanto di Tanjung Jabung Timur.

Kedua tokoh politik ini menunjukkan kesatuan dalam tekad mereka untuk mendorong kemajuan Jambi yang lebih baik lagi. •



PELUANG NAMA BARU SALIP PETAHANA DI NTB

Sejumlah nama mulai mencuat ke permukaan untuk bersaing di pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

Nama mantan Gubernur NTB Zulkieflimansyah disebut-sebut bakal maju untuk periode kedua. Hanya saja, dirinya masih belum memutuskan siapa yang akan menjadi pasangannya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akrab disapa Bang Zul ini mengungkapkan bahwa dia tidak ingin terburu-buru mengumumkan pasangan Zul-Rohmi Jilid 2.

Meskipun begitu, Bang Zul menepis rumor bahwa pasangan Zul-Rohmi akan berpisah dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024.

Namun, dia juga belum memastikan apakah akan berpasangan dengan Rohmi kembali atau tidak.

"Kami tidak menyandera diri kami, bahwa kami harus jadi Gubernur lagi periode kedua. Harus bersatu lagi, itu nanti pasar yang menentukan," kata Bang Zul, belum lama ini.

Dalam periode setahun ini, Bang Zul berencana untuk terus melakukan survei guna memahami peluangnya dalam Pilkada NTB berikutnya. Dia menyadari bahwa perubahan tren bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor.

"Kalau dalam waktu setahun ke depan, masyarakat tidak menginginkan, kita jadi malu juga mendorong diri maju bersama," tutup Bang Zul.

Zul-Rohmi mengakhiri jabatan mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada Selasa, 19 September 2023.

Sedangkan nama lain yang ikut mencuat adalah tentang kemungkinan partisipasi Staf Khusus Menteri Luar Negeri Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal dalam Pilgub NTB 2024 dinilai sebagai perkembangan positif.

Pengamat politik dari Universitas Mataram (Unram) Dr Saipul Hamdi mengungkapkan pandangannya tentang potensi Lalu Iqbal yang sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar Turki dari tahun 2019 hingga 2023, memiliki pengalaman birokrasi yang kuat dan tidak diragukan.

"Menurut pandangan saya, Mas Iqbal memiliki peluang yang besar. Meskipun saya belum sering melihatnya berinteraksi dengan masyarakat," ujar

Saipul.

Menurut Saipul, sebagai calon yang relatif baru dalam Pilgub NTB, Lalu Iqbal perlu berkomunikasi secara aktif dengan masyarakat. Dia juga menyarankan agar Lalu Iqbal sering muncul di media untuk menjelaskan visi dan solusi yang akan dia tawarkan untuk NTB di masa depan.

Selain itu, Saipul menyatakan bahwa ada banyak isu yang bisa diangkat oleh

Lalu Iqbal untuk menarik perhatian masyarakat, seperti isu kesejahteraan masyarakat dan jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) di NTB yang terus meningkat setiap tahunnya.

"Terutama melihat situasi ekonomi NTB saat ini, kita sangat tergantung pada ekonomi negara lain seperti Malaysia, Hongkong, dan Arab Saudi," katanya.

Saipul berpendapat bahwa Lalu



• INFO PILKADA

Iqbal tidak harus selalu berkomentar tentang masalah yang berat. Menurutnya, ada banyak masalah kecil di NTB yang juga perlu mendapatkan perhatian, seperti sektor pertanian dan janji pemerintah terkait pengembangan industri.

Dengan demikian, Saipul melihat bahwa peluang bagi tokoh baru

“Dia harus mendekati para pemimpin partai politik. Kekurangan dukungan partai adalah tantangan pertama yang perlu diatasi. Jika partai tidak mendukung, itu akan menjadi kendala serius,” tambah Saipul.

Seperti yang telah diketahui, kabar mengenai kemungkinan Lalu Iqbal untuk mencalonkan diri dalam Pil-

firmasi rencananya untuk maju dalam Pilgub NTB, mengklaim bahwa pertemuan tersebut hanya sebatas untuk memberitahukan bahwa tugasnya sebagai Dubes Turki telah selesai.

Paling terkini Lalu Muhammad Iqbal bahkan sudah membuka komunikasi dengan sejumlah partai politik dengan mengunjungi Ketua DPD Demokrat NTB Indra Jaya Usman (IJU).

“Semua masuk radar. Putra putri terbaik NTB. Sebagai partai politik kita harus banyak mendengar juga aspirasi dari publik, tokoh-tokoh yang punya kemungkinan dan punya kapabilitas,” ungkap IJU.

Namun untuk saat ini, kata IJU, pihaknya masih fokus untuk memenangkan Partai Demokrat di Pemilu 2024. Walaupun di saat bersamaan pembahasan mengenai Pilkada juga sudah dimulai.

“Karena ini tahun-tahun politik pasti ada kesana masalah ke Pileg, Pilpres, berbicara isu-isu lokal daerah, Pilkada pasti kena lah,” kata anggota DPRD Lombok Barat ini.

Adapun inti pertemuan dengan Iqbal di kediamannya itu bicara soal visi pembangunan. Obrolan tentang Pilkada, kata IJU, hanya menjadi guyonan.

“Kita berbicara pembangunan, industrialisasi tepat sasaran dan tepat guna, bagaimana ke depannya itu yang banyak kita diskusikan,” kata IJU.

Sebelumnya, Iqbal pulang kampung ke Praya, Lombok Tengah, Rabu (6/9/2023) usai menunaikan tugasnya sebagai Dubes Indonesia untuk Turki selama 4,5 tahun.

Diplomat lulusan Doktor Politik Universitas Bucharest Rumania ini mengakui didekati sejumlah tokoh politik.

“Tepatnya saya didatangi, dihubungi beberapa Parpol, tokoh masyarakat,” bebernya.

Pendekatan itu karena Iqbal dinilai punya kans untuk bersaing pada Pilgub NTB 2024. Komunikasinya dengan sejumlah Parpol itu belum merujuk pada kepastian Iqbal turun gelanggang di Pilkada 2024.

“Sebaiknya kita menjaga etika politik karena itu yang kita resahkan sekarang,” urainya. ●



seperti Lalu Iqbal dalam Pilgub NTB 2024 sangat terbuka. Namun, ia menekankan pentingnya Lalu Iqbal untuk mendekatkan diri kepada para pemimpin partai politik di NTB karena dukungan partai akan menjadi faktor kunci dalam perjalanan politiknya.

gub NTB telah menjadi perbincangan hangat.

Dia telah melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh politik, masyarakat, dan agama. Meskipun demikian, Lalu Iqbal belum secara resmi mengkon-

PERTARUNGAN DUA KLAN BESAR BERSAING REBUT SULBAR SATU

Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Barat (Sulbar) yang akan datang dipastikan akan menjadi pertarungan yang semakin menarik.



Pasalnya, dua klan atau keluarga besar, yaitu keluarga Masdar dan keluarga Mengga, kemungkinan besar akan berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.

Dua tokoh yang menjadi perwakilan dari kedua klan tersebut adalah Andi Ibrahim Masdar dari Keluarga Masdar dan Salim S Mengga dari Keluarga Mengga.

Kedua figur ini semakin menguatkan

ka, dipastikan akan sulit bagi lawan-lawannya untuk mengalahkan mereka karena memiliki basis massa yang cukup besar.

"Jika kedua klan ini berhasil bersatu, saya yakin mereka akan menjadi sangat kuat," tambahnya.

Namun, jika tidak ada figur lain yang jauh lebih kuat yang mungkin dapat membawa mereka bersatu, maka kedua klan ini kemungkinan besar akan kembali bertarung dalam Pilkada.

Indonesia Perjuangan (PDIP) dan meresmikan niatnya untuk menjadi calon Gubernur Sulbar pada Pilgub tahun 2024 mendatang.

Mantapkan dirinya menuju pencalonan di Pilgub 2024, AIM mengungkapkan keyakinannya dalam mendukung nomor urut 01 di Sulawesi Barat.

Bupati Polewali Mandar yang telah menjabat selama dua periode tersebut menegaskan keanggotaannya di PDIP dengan bukti Kartu Tanda Anggota



niat mereka untuk bertarung dalam Pilgub Sulbar, hal ini terlihat dari bermunculan baliho dan spanduk mereka yang terpasang di sepanjang jalan.

Baliho-baliho ini menampilkan gambar wajah keduanya beserta slogan-slogan yang menyoroti kemungkinan mereka dipilih oleh rakyat pada Pilkada 2024 mendatang.

Pengamat politik dari Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) Ahmad Amiruddin mengungkapkan kedua tokoh politik ini memiliki peluang besar untuk bersaing dalam kontestasi Pilkada mendatang.

Nama mereka masih cukup dikenal di kalangan masyarakat Sulawesi Barat.

"Kedua klan kemungkinan besar akan mencoba untuk tetap menjadi nomor satu jika mereka maju dalam Pilkada mendatang," ungkapnya.

Namun demikian, jika kedua klan ini berhasil menyatukan kekuatan mere-

Salim S Mengga sendiri adalah seorang Purnawirawan TNI-AD yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer Diponegoro. Selain itu, ia juga pernah terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil Sulbar.

Sementara itu, Andi Ibrahim Masdar adalah adik kandung dari Gubernur Sulbar, Andi Ali Baal Masdar. Dengan singkatan AIM, Andi Ibrahim telah menjabat sebagai Bupati Polman selama dua periode dan masih menjabat hingga saat ini.

Bahkan AIM telah dengan tegas mengumumkan keputusannya untuk bergabung dengan Partai Demokrasi

(KTA) yang diberikan langsung oleh ketua PDIP, Megawati Soekarno Putri.

AIM menjelaskan bahwa KTA yang diterimanya adalah tanda resmi bergabung dengan partai tersebut, berbeda dengan yang diberikan dengan tanda tangan Sekretaris Jenderal.

Lebih lanjut, AIM optimis bahwa PDIP akan menjadi kendaraan politik yang akan digunakannya untuk mencapai tujuannya di Pilgub 2024.

Namun, ketika ditanya tentang persiapan menuju Pilgub 2024, AIM mengungkapkan bahwa saat ini fokusnya masih pada tugasnya sebagai Bupati Polman. Ia juga menyebut bahwa prioritasnya adalah Pemilihan



Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Calon Legislatif (Caleg) yang akan datang.

Selain itu, AIM juga mengumumkan persiapannya untuk menyambut kedatangan Ganjar Pranowo pada bulan Oktober 2023.

Awalnya, kedatangan Ganjar direncanakan pada akhir Juni 2023 untuk acara jalan santai, tetapi AIM menjelaskan bahwa kunjungan tersebut akan menjadi bagian dari tahap kampanye pada bulan Oktober.

AIM memiliki target ambisius, yakni memperoleh 50 persen suara kemenangan bagi Ganjar dalam Pilpres 2024 mendatang. Dengan keyakinan dan tekadnya yang kuat, AIM siap menghadapi tantangan politik yang ada di



Kedua klan kemungkinan besar akan mencoba untuk tetap menjadi nomor satu jika mereka maju dalam Pilkada mendatang

Sulawesi Barat.

Sementara nama lain yang juga disebut-sebut bakal maju dalam Pilgub Sulbar 2024 adalah Bupati Mamuju Tengah, Aras Tammauni, yang juga merupakan Bupati dua periode di Kabupaten termuda di Sulawesi Barat, dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk ikut serta dalam Pilgub Sulbar tahun 2024 yang akan datang.

Keputusannya untuk mencalonkan diri dalam Pilgub Sulbar mendatang adalah bukti nyata dari rasa peduli yang mendalam terhadap wilayah Sulawesi Barat secara keseluruhan. Aras Tammauni berkomitmen untuk mendorong Sulbar agar menjadi daerah yang lebih maju daripada sebelumnya.

Dalam pernyataannya yang sangat tegas, Bupati aktif Mamuju Tengah ini mengumumkan niatnya untuk bersaing sebagai calon Gubernur Sulawesi Barat pada Pilgub yang akan datang.

Namun, hingga saat ini, Aras Tam-

mauni belum mengungkapkan siapa yang akan menjadi pasangan duetnya dalam kontestasi Pilgub mendatang.

"Kalau Gubernur disebut, Insya Allah kita gaspol saya optimis untuk maju," tegas orang nomor satu di Mamuju Tengah ini.

Aras Tammauni menegaskan bahwa persiapannya untuk bersaing dalam Pilgub sudah sangat matang. Berbagai langkah persiapan telah diambil untuk

memastikan bahwa ia siap untuk maju dan memiliki potensi untuk meraih kemenangan.

"Yang jelas kita sudah sangat siap untuk maju dan tentunya siap menang," tandasnya.

Dengan semangat ini, Aras Tammauni siap untuk menghadapi perjuangan politik yang akan datang dalam rangka mewujudkan visi dan misinya untuk kemajuan Sulawesi Barat. ●



DUET ANDRE ROSIADE DAN FADLY AMRAN UNTUK PERUBAHAN

Kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 di Sumatera Barat mencuatkan nama Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade yang digadang-gadang bakal maju sebagai Calon Gubernur (Cagub).



Hanya saja, Andre sendiri enggan berspekulasi dan lebih memilih fokus pada upaya memenangkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024.

Namun, Andre Rosiade dan Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (Nas-Dem) Sumatera Barat, Fadly Amran, sedang menjadi perbincangan serius

ini bersatu, mereka memiliki peluang besar untuk menjadi pemenang dalam Pilgub Sumbar tahun 2024 mendatang.

"Jika Andre Rosiade dan Fadly Amran Bersatu, ada peluang besar untuk menjadi pemenang di Pilgub Sumbar 2024 dan bisa menjadi lawan serius bagi incumbent Mahyeldi," jelasnya.

Keduanya sudah memiliki partai politik, basis massa, dan pendukung yang

adalah Ketua NasDem Sumatera Barat. Kedua partai ini saat ini memiliki peluang yang baik dalam menghadapi Pemilu 2024," ungkap Ilham.

Sebelumnya, diketahui Andre Rosiade juga mengungkapkan targetnya untuk melihat perubahan kepemimpinan dalam Pilgub 2024. Menurutnya, partainya harus mencari kandidat gubernur baru untuk mempercepat pembangunan di Sumatera Barat.



sebagai calon duet dalam Pilgub Sumbar tahun 2024.

Banyak pihak yang berpendapat bahwa kedua tokoh ini adalah kombinasi yang sangat potensial untuk memimpin pembangunan Sumbar ke depan. Hal ini diperkuat oleh rekam jejak mereka yang sangat baik dalam dunia politik.

Andre Rosiade adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2019-2024, sementara Fadly Amran baru saja menyelesaikan masa jabatannya sebagai Wali Kota Padang Panjang pada tahun 2018 dengan banyak prestasi yang berhasil diraih selama kepemimpinannya di "Serambi Mekkah" tersebut.

Menurut pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand), Ilham Alde-lano Azre, jika kedua pemimpin muda



Kami akan mencari Gubernur Sumbar yang dapat membawa inovasi baru, perubahan yang lebih baik lagi.

fanatik. Selain itu, keduanya telah dikenal luas oleh masyarakat.

"Andre Rosiade adalah figur nasional yang memimpin Partai Gerindra di Sumbar, sedangkan Fadly Amran

"Kami akan mencari Gubernur Sumbar yang dapat membawa inovasi baru, perubahan yang lebih baik lagi. Kami akan mencalonkan calon gubernur dari pihak kami untuk Pilgub Sumbar nanti," tegas Andre.

Andre melihat bahwa Sumbar saat ini memerlukan perubahan yang lebih positif. Diperlukan seorang pemimpin yang dapat bekerja sama dengan kepala daerah lainnya secara lebih efektif.

Ia menilai bahwa kepemimpinan saat ini di bawah Mahyeldi, Gubernur Sumbar, belum cukup efisien dalam membangun sinergi antara kabupaten, kota, dan pemerintah pusat.

Andre juga mencatat bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, selalu mendorong semua anggota dan kader partai untuk bekerja

keras demi kepentingan masyarakat.

"Kami, sebagai anggota dewan, mendapatkan instruksi dari Pak Prabowo untuk bekerja keras demi kepentingan masyarakat. Kami juga akan terus berkolaborasi dengan semua kepala daerah. Yang pasti, target kami pada Pilgub Sumbar nanti adalah mengganti gubernur," tambahnya.

Namun terkait pencalonan dirinya sebagai Gubernur Sumbar 2024, Andre enggan berspekulasi dan lebih memilih fokus pada upaya memenangkan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024.

"Saya enggan untuk berspekulasi. Sebagai kader Partai Gerindra, fokus utama kami saat ini adalah Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. Tugas kami adalah memenangkan Pak Prabowo," ujar Andre Rosiade.

Andre Rosiade, yang juga anggota Komisi VI DPR, berpendapat bahwa apabila Prabowo menjadi Presiden maka isu keterbelakangan pembangunan di Sumbar juga akan dapat diselesaikan dengan lebih baik.

Ia memberikan contoh bahwa jika Prabowo menjadi Presiden dan dirinya menjadi Gu-

nur, kolaborasi dan komunikasi antara keduanya akan menjadi lebih lancar, yang pada akhirnya akan mempercepat proses pembangunan.

"Pak Prabowo menjadi Presiden akan membuka peluang komunikasi yang lebih efektif," ungkap Andre Rosiade, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).

Andre juga menyatakan jika Presiden adalah Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan, maka konteks seperti itu tidak akan terjadi.

Andre meyakini bahwa Prabowo akan dengan mudah mendukung usulan semacam ini. Bahkan, ada kemung-

kinan bahwa Prabowo akan menghubungi beberapa menteri untuk mendukung rencana pembangunan di Sumbar.

Lebih lanjut, sebagai juru bicara Partai Gerindra, Andre mengungkapkan bahwa banyak masyarakat di Sumbar yang mengharapkan dirinya maju se-

calon Gubernur dalam Pilkada 2024.

Masyarakat telah mengamati kinerjanya yang baik selama menjabat sebagai anggota Dewan DPR RI, sehingga dianggap layak untuk memimpin di Sumbar.

"Kami merasa tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Oleh karena itu, harapan masyarakat pada tahun 2024, kami membutuhkan pemimpin baru yang mampu membangun Sumbar. Salah satu tokoh yang diharapkan oleh masyarakat adalah Andre Rosiade," tutur Andre dengan yakin.



Saya enggan untuk berspekulasi. Sebagai kader Partai Gerindra, fokus utama kami saat ini adalah Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif.

Dia juga mengumumkan tujuan ambisinya untuk meraih pergantian gubernur dalam kontestasi Pemilu 2024. Ia berpendapat bahwa partainya harus mencari sosok gubernur baru agar pembangunan di Sumbar dapat berjalan lebih lancar.

Menurut pandangan Andre, saat ini Sumbar memerlukan perubahan positif. Diperlukan pemimpin baru yang memiliki kemampuan lebih baik dalam bekerja sama dengan seluruh kepala daerah di wilayah tersebut.

Andre mengkritik kepemimpinan Mahyeldi, gubernur saat ini, dengan menyebut bahwa pemerintah provinsi belum mampu membangun sinergi yang memadai antara kepala daerah tingkat kabupaten dan kota serta dengan pemerintah pusat.



RESTU UNTUK KHOFIFAH INDAR PARAWANSA LANJUTKAN PERIODE KEDUA

Saat ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapat dukungan dari PPP dan Hanura untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024.



Kedua partai ini sebelumnya telah menjadi pengusung Khofifah-Emil di Pilgub Jawa Timur 2018. Khofifah juga sudah mengantongi restu dari PKB, Gerindra, dan Demokrat mengungkapkan niat mereka untuk mendukung Khofifah.

Wakil Ketua DPW PPP Jawa Timur, Mujahid Ansori, menegaskan bahwa Khofifah bukanlah sosok yang asing bagi PPP.

Partai dengan lambang Ka'bah ini siap mendukung Khofifah jika dia memutuskan untuk kembali maju di Pilgub Jawa Timur 2024.

"Terkait pilgub, PPP sudah sepakat. Jadi mulai dulu PPP setia mengusung Mbak Khofifah. Saya kira PPP akan tetap mengawal dan setia kalau memang Mbak Khofifah berkenan untuk jadi calon gubernur Jatim. PPP pasti akan menjadi garda terdepan," ungkapnya.

Menurut Mujahid, Khofifah merupakan representasi dari kader PPP. Sejak awal karier politiknya, Khofifah telah bersama-sama dengan PPP.

Bahkan ketika Khofifah tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu, PPP selalu mendukung dan mengawalinya.

"Khofifah itu PPP, mulai dari awal kami mendukungnya di Pemilihan Gubernur Jawa Timur dan hingga saat ini. PPP Jatim memiliki hubungan khusus dengan beliau, bahkan dalam beberapa Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) yang kami adakan, nama Khofifah selalu diperbincangkan," jelasnya.

Mujahid, yang merupakan mantan anggota DPRD Jawa Timur, menambahkan bahwa PPP telah mempertimbangkan Khofifah maju sebagai calon gubernur.

"Terlebih lagi, jika Khofifah maju sebagai calon gubernur Jawa Timur, PPP tidak akan ragu untuk tetap konsisten dalam mendukungnya," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Hanura Jawa Timur, Yuniarto Wahyudi, menyatakan bahwa partainya akan secara solid mendukung Khofifah jika beliau memutuskan untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024.

"Hanura akan mengusung Khofifah

Indar Parawansa jika beliau memutuskan untuk maju kembali sebagai calon gubernur Jawa Timur pada tahun 2024," kata Yuniarto.

Pria yang akrab disapa Cak Masteng ini menegaskan bahwa Hanura akan mendukung Khofifah, tidak peduli dengan siapa pun yang menjadi pasangannya dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024.

"Apapun pasangannya, Hanura akan tetap mendukung Khofifah Indar Parawansa, selama beliau masih ingin melanjutkan periode kedua," tandasnya.

Sementara, Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei elektabilitas berbagai calon yang diperkirakan akan mencalonkan diri untuk jabatan gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) di Jawa Timur.

Elektabilitas Khofifah yang masih berada di posisi teratas membuatnya menjadi pesaing kuat pada Pilgub Jatim 2024.

Direktur ARCI Baihaki Sirajt mengatakan elektabilitas Khofifah sebagai calon



gubernur Jatim masih tetap unggul dan unggul signifikan dibandingkan pesaing lainnya.

Secara rinci, hasil survei ARCI terhadap calon gubernur Jatim 2024 menunjukkan elektabilitas Khofifah sebesar 35,6%, disusul Emil Dardak 19,4%, dan Achmad Fauzi 17,3%.

"Disusul Eri Cahyadi 5,7%, Sarmuji 5,3%, Anwar Sadat 4,4%, Gus Ipul 4,3%, Gus Halim 3,2%, dan Heru Tjahjono 2,7%," jelas Baihaki.

Baihaki menyebut peluang Khofifah maju dan menang di Pilgub Jatim 2024 terbuka lebar. Menurut dia, elektabilitas Khofifah bisa semakin meningkat jika ia resmi menyatakan pencalonannya dalam pemilu.

"Setelah Khofifah hampir dipastikan tidak mencalonkan diri pada Pilpres 2024, maka peluangnya ada pada pencalonan Gubernur Jawa Timur untuk periode keduanya," kata Baihaki.

Baihaki kemudian menyinggung calon wakil gubernur yang potensial mendampingi Khofifah di Pilgub Jatim 2024. Berdasarkan angka elektabilitas survei, Emil Dardak dinilai sebagai sosok paling berpotensi mendampingi Khofifah.

"Emil Dardak merupakan calon wakil gubernur yang paling berpotensi mendampingi Khofifah di Pilgub Jatim atau Khofifah-Emil tahap II. Elektabilitas Emil sebagai calon wakil gubernur Jatim berada di angka 35,2%, jauh mengungguli calon lainnya." jelasnya.

Dijelaskannya jika Khofifah dan Emil kembali berpasangan, peluang untuk menang di Pilgub Jawa Timur 2024 sangat besar. Pasalnya, bisa dikatakan bahwa saat ini belum ada calon lain yang menjadi penantang berarti.

Ia kemudian membeberkan tingkat kepuasan warga Jatim terhadap kinerja Khofifah dan Emil selama hampir lima tahun kepemimpinannya.

"Sebanyak 82,1% responden survei dari Jawa Timur puas dengan kinerja Khofifah, dan 81,7% puas dengan kinerja Emil," tutupnya.

Survei ARCI dilakukan pada 22 Oktober hingga 27 Oktober 2023. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 38 kabupat-

en dan kota di Jawa Timur. Survei ARCI memiliki margin of error sebesar 2,8% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

Hanya saja, Khofifah dengan tegas menyatakan bahwa ia belum membuat keputusan mengenai langkahnya ke depan. Menurutnya, keputusan

sehingga langkah-langkah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan makro organisasi harus mendapatkan green light. Nah itu yang saya belum melakukan komunikasi dan konfirmasi, tetapi bahwa apa yang terkonfirmasi kepada publik ya biar sementara mengalir saja,



tersebut sepenuhnya tergantung pada berbagai faktor, terutama apakah akan ada izin atau dukungan yang diperlukan.

"Saya juga salah satu ketua PBNU,

mengalir saja," jelasnya.

Khofifah menjelaskan bahwa pengambilan keputusan memerlukan komunikasi yang mendalam dengan organisasi tersebut. •



NFO NASIONAL

3 OPERASI PENGAMANAN POLRI DI TAHUN POLITIK

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar tiga operasi khusus di Tahun Politik 2023-2024. Penting bagi segenap komponen bangsa untuk mencapai saling pengertian mengenai tiga operasi ini.



Dua operasi sudah berjalan. Masing-masing Operasi Nusantara Cooling System dan Operasi Mantap Brata. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan Operasi Mantap Brata merupakan kolaborasi antara Polri, TNI (Tentara Nasional Indonesia), kementerian/lembaga terkait, dan mitra kamtibmas untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pemilu 2024.

"Sebagai dukungan terhadap Operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri juga menggelar Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 untuk memban- gun narasi besar 'Persatuan dan Kes- atuan, serta Kemajuan Bangsa di Atas

oleh hoaks, isu SARA, propaganda 'firehose of falsehood', dan kampanye hitam dengan dukungan dari Satgas Anti Money Politics serta Satgas Pemilu Damai," Jenderal Sigit.

Kapolri mengatakan, koordinasi, komunikasi, dan pertukaran informasi akan didukung oleh Command Center dari Mabes Polri hingga Polda di selu- ruh Indonesia, yang bertindak sebagai pusat kendali untuk mengintegrasikan data dan informasi serta mengatur per- sonel pengamanan dari pusat hingga daerah.

Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan berlangsung selama 222 hari, mulai dari 19 Oktober 2023 hingga

ganggu persatuan bangsa.

Tujuan dari Operasi Mantap Brata adalah untuk memastikan pemilu ber- langsung aman dan demokratis.

Poin penting dalam Operasi Mantap Brata antara lain: Operasi Mantap Brata adalah operasi khusus yang dilakukan oleh Polri untuk mengamankan Pemilu 2024. Operasi ini melibatkan 2.130 personel dan berlangsung selama masa Pemilu 2024. Polri bertujuan agar pemilu berjalan dengan aman dan demokratis. Tujuan utama dari Operasi Mantap Brata adalah meningkatkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia.

Konsep dan Tujuan Operasi Man-



Kepentingan Kelompok," kata Kapolri dalam sambutannya saat Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang berlangsung di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa, 17 Oktober 2023.

Kapolri menjelaskan, Operasi Nusan- tara Cooling System 2023-2024 bertu-juan untuk menghindari penyebaran berita palsu yang dapat memengaruhi persatuan masyarakat. Dalam kerang- ka operasi ini, terdapat satuan tugas (satgas) yang akan mengawasi keg- iatan terkait politik uang dan menjaga stabilitas selama Pemilu 2024.

"Kami bertekad untuk mengantisi- pasi polarisasi yang dapat disebabkan

20 Oktober 2024, melibatkan 261.695 personel di seluruh Indonesia untuk mengamankan seluruh tahapan Pem- lu 2024. Selain itu, Polri telah menga- tur pola pengamanan wilayah/zonasi bagi personel Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara untuk memastikan keamanan yang lebih baik.

Sebagai langkah tambahan, Polri telah menyiapkan 2.000 personel Bri- mob Power on Hand Kapolri dan 8.500 personel Dalmas Nusantara yang siap untuk mobilisasi di seluruh wilayah In- donesia. Dengan langkah-langkah ini, Polri berkomitmen untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan dengan aman dan tanpa polarisasi yang meng-

tap BrataOperasi Mantap Brata meru- pakan upaya strategis Polri dalam menjaga keamanan dan kelancaran Pemilu 2024 dengan beberapa tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konsep operasi ini, Polri akan melibatkan 2.130 personel dari Mabes Polri dan bek- erja sama dengan 11 satuan kerja Polri serta sembilan satuan tugas yang akan ditempatkan di berbagai wilayah.

Salah satu tujuan utama Operasi Mantap Brata adalah untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas se- lama proses pemilihan umum berlang- sung. Polri akan menyiapkan skema yang tepat agar pemilu serentak dapat berjalan aman dan demokratis mulai

dari tingkat Mabes Polri hingga tingkat Polres jajaran. Dalam kurun waktu 222 hari, operasi ini akan dilaksanakan dengan fokus pada pengamanan setiap tahapan pemilu dan pilkada.

Operasi Mantap Brata juga bertujuan untuk membantu menjaga kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Keberhasilan pemilu yang aman dan lancar akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap negara kita. Dengan keterlibatan personel dan satuan tugas yang terlatih, Polri siap menjaga keamanan pemilu agar berjalan dengan baik. Operasi ini menjadi langkah strategis dalam menjaga integritas pemilu dan memastikan

dan TNI.

Selain itu, Polri juga akan mengadakan operasi pengamanan untuk tahapan-tahapan penting seperti kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang dapat mengganggu jalannya Pemilu.

Tak hanya itu, Polri juga akan bekerja sama dengan masyarakat dan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi intelijen yang dapat membantu dalam pengamanan pemilu. Dengan demikian, Polri berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman

meningkatkan patroli dan pengawasan di lokasi-lokasi strategis, termasuk tempat pemungutan suara, kantor-kantor partai politik, dan tempat keramaian lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengganggu ketertiban dan keamanan selama pemilu. Penanggulangan gangguan keamanan: Polri akan siap menghadapi segala jenis gangguan keamanan yang mungkin terjadi selama pemilu. Mereka akan mengambil langkah-langkah tegas untuk menangani aksi kekerasan atau pelanggaran hukum lainnya yang mengancam stabilitas pemilu.

Pentingnya Operasi Mantap Brata dalam menjaga keamanan dan kelancaran pemilu tidak dapat diabaikan. Melalui langkah-langkah yang ketat dan taktik yang inovatif, Polri berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat selama tahapan pemilu. Keberhasilan Operasi Mantap Brata akan membawa manfaat besar, tidak hanya bagi pemilu itu sendiri, tetapi juga dalam membangun kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai negara demokratis yang stabil.

Menetapkan Prioritas Keamanan Pemilu

Demi melaksanakan Operasi Mantap Brata dengan baik, Polri akan memprioritaskan keamanan pemilu sebagai fokus utama. Polri akan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk TNI, KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan lainnya untuk memastikan sinergi dalam menjaga keselamatan selama pemilu. Polri juga akan mengadakan koordinasi dan rapat rutin dengan seluruh jajaran untuk memastikan pelaksanaan operasi berjalan sesuai rencana.

Dengan panduan dan langkah-langkah yang jelas, serta komitmen Polri dalam melaksanakan Operasi Mantap Brata, diharapkan pemilu dan pilkada di tahun 2024 dapat berlangsung aman, tertib, dan demokratis. Semua pihak dihimbau untuk mendukung operasi ini dan bersama-sama menjaga keamanan pemilu, karena keberhasilan pemilu kita adalah keberhasilan kita sebagai ne-



bahwa masyarakat dapat menyalurkan hak suaranya secara bebas dan adil.

Taktik dan Strategi dalam Operasi Mantap Brata Polri telah merancang taktik dan strategi khusus yang efektif untuk Operasi Mantap Brata guna mengamankan Pemilu 2024. Dalam operasi ini, Polri akan menggunakan pendekatan yang terencana dan terkoordinasi untuk memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung dengan aman dan lancar.

Taktik yang akan digunakan meliputi peningkatan patroli polisi di wilayah yang rentan konflik, peningkatan pengawasan di TPS, serta penggunaan teknologi canggih seperti sistem CCTV dan pemantauan online. Strategi yang telah dirancang melibatkan koordinasi antarlembaga untuk memperkuat keamanan pemilu, dengan melibatkan berbagai pihak seperti Bawaslu, KPU,

dan kondusif bagi masyarakat saat memilih pemimpin negara di Pemilu 2024.

Panduan dan Langkah-Langkah Operasi Mantap Brata Operasi Mini dirancang untuk mengamankan pemilu dan pilkada di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga tingkat Polres jajaran. Dengan melibatkan 2.130 personel dari Mabes Polri dan berlangsung selama 222 hari, Operasi ini menjadi komitmen nyata Polri dalam menjaga keamanan dan keselamatan selama tahapan pemilu.

Penetapan dan penyebaran personel: Polri akan menentukan jumlah dan penempatan personel yang tepat untuk setiap tahap pemilu. Personel akan disebar di berbagai wilayah untuk memastikan pemilu berjalan aman dan tertib.

Peningkatan patroli dan pengawasan: Operasi Mantap Brata akan

gara. Mari kita wujudkan pemilu yang aman dan bermartabat.

Sistem Kerja dan Manfaat Operasi Mantap Brata

Beberapa sistem kerja dan manfaat dari Operasi Mantap Brata akan terungkap dalam bagian ini, menggambarkan pengaruh positifnya terhadap integritas pemilu.

1. Sistem Kerja Operasi Mantap Brata:Keahlian Khusus: Satuan kerja Polri yang terlibat dalam operasi ini memiliki keahlian khusus dalam mengamankan peristiwa pemilu. Mereka dilatih dengan metode terkini untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan yang mungkin terjadi.

Kerja Sama Antar Lembaga: Operasi Mantap Brata melibatkan kerja sama antara Polri, TNI, dan Kementerian terkait. Hal ini memastikan bahwa semua pihak terlibat bekerja secara sinergi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu pemilu yang aman dan demokratis.

Penggunaan Teknologi Canggih: Polri menggunakan teknologi canggih dalam operasi ini, termasuk penggunaan sistem keamanan terintegrasi dan pemantauan dengan kamera CCTV. Hal ini memungkinkan Polri untuk mendeteksi dan merespons secara cepat berbagai ancaman keamanan.

2. Manfaat Operasi Mantap Brata:Peningkatan Keamanan: Dengan melaksanakan Operasi Mantap Brata, Polri dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap proses pemilihan. Hal ini akan meningkatkan rasa aman masyarakat saat memberikan suaranya dan meminimalisir potensi kerusuhan atau kecurangan.

Kepastian Hukum: bertujuan untuk menjamin kepastian hukum selama pemilu. Polri akan berupaya mengidentifikasi dan mengatasi segala bentuk pelanggaran hukum yang terjadi selama proses pemilihan.Peningkatan Kepercayaan Masyarakat: menjaga integritas pemilu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan lembaga yang terlibat akan semakin meningkat. Hal ini akan mengukuhkan posisi Indonesia di mata dunia dan meningkatkan kepercayaan internasional terhadap negara ini.

Signifikansi Operasi

Operasi Mantap Brata tidak hanya menjadi benteng keamanan yang kokoh dalam menghadapi Pemilu, tetapi juga menjadi pembuktian bahwa Indonesia mampu menjalankan proses demokrasi dengan baik. Dengan mengungkapkan rahasia dan manfaat dari operasi ini, diharapkan masyarakat semakin yakin bahwa pemilu akan berlangsung dengan aman, adil, dan transparan.

Peran Polri dalam Menjaga Kepercayaan Publik

Peran Polri dalam menjaga kepercayaan internasional terhadap Pemilu Indonesia akan dibahas dalam bagian terakhir ini, menyoroti pentingnya ke-

mampu mencegah terjadinya kecurangan, konflik, dan ancaman terhadap proses demokrasi.

Kunci keberhasilan Operasi Mantap Brata tidak hanya terletak pada segi pengamanan fisik, tetapi juga pada pemeliharaan kredibilitas Polri dalam menjalankan tugasnya. Polri harus bertindak secara profesional, netral, dan bersih dari pengaruh politik atau kepentingan pribadi. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan internasional terhadap pemilu di Indonesia, sehingga negara kita semakin dihormati dan diakui di dunia internasional.

Keberhasilan Operasi Mantap Brata juga akan berdampak positif pada peningkatan kepercayaan masyarakat



berhasilan Operasi Mantap Brata. Polri, sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu.

Operasi Mantap Brata yang akan digelar Polri adalah bentuk nyata komitmen untuk menjaga integritas dan keamanan Pemilu 2024. Dengan melibatkan ribuan personel dari berbagai satuan kerja Polri, pengamanan pemilu akan dilakukan dengan cermat dan terukur. Langkah-langkah yang dirancang dan diimplementasikan dalam Operasi Mantap Brata diharapkan

dalam proses pemilu. Dengan merasa aman dan terjaminnya proses pemungutan suara, masyarakat akan lebih percaya bahwa suaranya dihargai dan hasil pemilu akan mencerminkan kehendak rakyat. Polri, melalui Operasi Mantap Brata, berperan penting dalam membangun keyakinan masyarakat terhadap lembaga demokrasi, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memilih calon pemimpin yang berintegritas.

Bagaimana dengan Operasi Nusantara Cooling System dan operasi satunya lagi? Silakan simak bagian berikutnya. ●

2 OPERASI LAINNYA

Tiga Operasi yang dirancang Polri untuk Pemilu 2024 adalah Mantap Brata, Nusantara Cooling System, dan Operasi Aman Nusa.

Selain Operasi Mantap Brata, Polri sudah merancang dua operasi lainnya. Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) Polri Irjen Fadil Imran mengungkapkan instansinya menyiapkan tiga operasi untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.

Perwira tinggi Polri yang sebelumnya menjabat Kapolda Metro Jaya ini menjelaskan bahwa operasi pertama Polri adalah Nusantara Cooling System. Berdasarkan artinya, kata dia, Operasi Nusantara Cooling System adalah melakukan deteksi, penyelidikan, penga-



manan tertutup dan penggalangan intelijen dan penggalangan eskalasi pada potensi sampai dengan ambang gangguan.

Kedua, Operasi Mantap Brata, yakni operasi pengamanan ambang gangguan dan gangguan nyata dalam tahapan pemilu serentak tahun 2023-2024. Sedangkan yang ketiga adalah Operasi Kontijensi Aman Nusa 1, 2, dan 3.

“Penanganan operasi kontijensi ini bertujuan kepada penanganan gangguan nyata yang bersifat kontijensi (darurat) yang disebabkan oleh konflik sosial, bencana alam dan terorisme,” ungkap Kabaharkam dalam Rapat Kerja Bersama Komisi III DPR RI, Rabu, 15 November 2023.

Dalam proses pelaksanaan operasi Mantap Brata dan kegiatan pengamanan Pemilu lainnya, Polri mengerahkan dua pertiga pasukannya. Sedangkan sisa lainnya tetap berjaga sesuai dengan pos masing-masing.

“Kegiatan operasi Mantap Brata 2023-2024 didukung dengan kekuatan Polri di mana 2/3 kekuatan dikerahkan, sedangkan 1/3 kekuatan Polri digunakan untuk melaksanakan kegiatan rutin kepolisian,” jelas Kabaharkam.

Mengenai Operasi Nusantara Cooling System, Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS), Irjen Asep

Edi Suheri, S.I.K, M.Si, menekankan pentingnya pendekatan preemtif dan preventif dalam pelaksanaannya.

Latar belakangnya, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar Pemilu serentak 2024 berlangsung tanpa adanya perpecahan di tengah masyarakat. Sejalan dengan arahan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap terjalin kerja sama antara Polri dan masyarakat melalui cooling system. Tujuannya adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta memastikan Pemilu berlangsung dengan damai.

Upaya Preemtif dan Preventif

Untuk mengimplementasikan arahan tersebut, Kapolri mengeluarkan Surat Perintah, Sprin/2439/VIII/OPS.1.1/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk melaksanakan Operasi Nusantara Cooling System sejak 11 September 2023. Operasi ini bertujuan meminimalisir isu-isu provokatif yang berkaitan dengan primordialisme atau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) baik di masyarakat maupun di ruang siber. Pentingnya operasi ini terletak pada tindakan preemtif dan preventif, tanpa ada upaya penegakan hukum yang bersifat represif.

Irjen Asep, yang juga menjabat Waka-

bareskrim, menjelaskan bahwa Operasi Nusantara Cooling System melibatkan empat satuan tugas (satgas) dan delapan subtagas, dengan dukungan dari Polda jajaran. Tugas utama Satgas Nusantara Cooling System adalah meminimalisir isu-isu provokatif dengan pendekatan preemtif dan preventif.

Sasaran dan Target Operasi

Operasi ini memiliki sasaran yang meliputi potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata. Adapun target operasi mencakup orang, kelompok, tempat kegiatan, dan benda. Pendekatan yang diambil dalam operasi ini mencakup deteksi, pembinaan masyarakat, patroli dialogis, patroli siber, sosialisasi, dan bantuan operasi.

Peran Satuan Tugas

Empat Satgas terlibat dalam operasi ini:

Satgas Preemtif: Terdiri dari Subsatgas Intelijen dan Subsatgas Binmas, bertugas melakukan deteksi dini dan berinteraksi dengan mitra serta para tokoh masyarakat.

Satgas Preventif: Melibatkan Subsatgas Patroli Siber dan Subsatgas Patroli Dialogis Netizen, bertugas melakukan patroli siber dan berdialog dengan netizen serta influencer dalam menjaga ketertiban masyarakat.



Satgas Humas: Terdiri dari Subsatgas Penmas dan Subsatgas Multimedia, memiliki tugas untuk menyampaikan ajakan, imbauan, edukasi, serta melakukan pemantauan di media sosial dan media mainstream.

Satgas Banops: Mengandalkan Subsatgas TIK dan Subsatgas Logis-

Subsatgas Patroli Dialogis Netizen melaksanakan tugas patroli Siber dan berdialog dengan netizen, influencer dalam menjaga kamtibmas yang kondusif.

Untuk Satgas Humas yaitu Subsatgas Penmas dan Subsatgas Multimedia memiliki tugas, antara lain menyampaikan



tik, bertugas memberikan dukungan teknologi, informasi, dan logistik kepada Operasi Nusantara Cooling System.

Asep menyebut tugas dari empat satgas, yaitu Satgas Preemtif yang terdiri dari Subsatgas Intelijen dan Subsatgas Binmas melakukan tugas, antara lain deteksi dini dan melakukan pendekatan dengan mitra dan para tokoh.

Sedangkan Satgas Preventif yang memiliki Subsatgas Patroli Siber dan

ajakan, imbauan, edukasi serta melakukan monitoring, baik media sosial maupun media mainstream.

"Untuk Satgas Banops, yaitu Subsatgas TIK dan Subsatgas Logistik melakukan dukungan teknologi, informasi dan logistik kepada Operasi Nusantara Cooling System," ujarnya.

Asep meminta, Operasi Nusantara Cooling System mendapat dukungan dari media massa dan masyarakat Indo-

nesia untuk menghindari hal-hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kami mengajak masyarakat Indonesia untuk menghindari hal-hal yang mengganggu stabilitas keamanan, terutama yang dapat berpotensi konflik sosial, sehingga kita bisa mewujudkan pemilu yang aman dan damai," ujarnya.

Salah satu bentuk Operasi Nusantara Cooling System adalah pertemuan tatap muka dengan para ulama terkemuka dan berpengaruh. Antara lain Ustadz Das'ad Latif yang memiliki banyak jamaah di Indonesia Timur. Irjen Pol Asep menemui Ustadz Das'ad Latif di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 28 September 2023.

Jenderal bintang dua yang mendapat amanat sebagai Kepala Operasi Nusantara Cooling System' (Kaops NCS) meminta petuah ustadz asal Makassar, Sulawesi Selatan. "Alhamdulillah, Ustadz Das'ad Latif bersedia membantu tugas Polri," kata Irjen Asep, Jumat, 29 September 2023.

Asep mengatakan, Ustadz Das'ad Latif juga bersedia melakukan safari dakwah. Bahkan, akan menjembatani dengan tokoh-tokoh agama lainnya untuk membantu tugas Polri dalam cooling system. "Ustadz juga akan berdakwah dan menjembatani dengan tokoh-tokoh agama di wilayah yang menjadi atensi dan eskalasi tinggi terkait kerawanan dalam rangkaian Pemilu 2024," katanya.

Selain menemui Ustadz Das'ad, Irjen Asep juga bertatap muka dengan Ustadz Abdul Somad di Pesantren Nurul Azhar, Rumbi, Pekanbaru, Selasa, 21 November 2023.

Dalam pertemuan itu Ustadz Abdul Somad (UAS) mengaku dalam ceramahnya selalu mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan jangan terpecah belah kendati beda pilihan harus mewujudkan pemilu 2024 mendatang yang aman dan damai.

Sejak aktif berdakwah di masyarakat, UAS mengemukakan, selalu berpesan kepada masyarakat untuk menjaga keutuhan bangsa. Juga menjaga persaudaraan dan kebersamaan sebagai anak bangsa.

Tentunya dengan kedatangan Irjen Asep dan rombongan selaras dengan visi dirinnya dalam berkebangsaan. "Se-

lalu dalam kajian subuh, tabligh akbar dzuhur, kajian malam, di stadion, di masjid, tanah lapang, tetap saya selipkan jaga ketertiban ikut serta dalam pesta demokrasi jangan golput, gunakan hak pilih jangan tergiur money politic, jaga ketertiban jaga ketentraman jaga keamanan itu ikhtiar kita,” tutur UAS.

Selain itu, UAS mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi. Menurutnya, hal tersebut bisa menentukan nasib bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan.

“Gunakan hak lima menit menentu-

masyarakat terutama para tokoh agama untuk menjaga pemilu 2024 berlangsung aman dan damai.

“Alhamdulillah UAS menyambut baik maksud dan tujuan kami dalam menjalankan tugas Operasi Nusantara Cooling System ini untuk mendinginkan suasana jelang pemilu. Agar masyarakat tidak terpecah belah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan pemilu yang aman dan damai,” tutur Irjen Asep.

Sebelumnya, pada Minggu, 8 Oktober 2023, Irjen Asep juga menemui Pengasuh Pondok Pesantren Daarut

dan meneguhkan kebersamaan dengan para jamaah,” kata Aa Gym.

Selain itu, Aa Gym menyebut masyarakat Indonesia harus selalu menjaga kerukunan dan jangan sampai terprovokasi dengan isu-isu SARA. Bahkan, tambahnya, perbedaan pilihan jangan sampai menjadi pemicu pertengkaran dan permusuhan.

“Siapapun yang terpilih dalam pemilu 2024 harus tetap didukung. Karena siapapun nanti yang terpilih adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia,” tutur Aa Gym.

Menyimak penjelasan Aa Gym, Wak-



kan lima tahun kedepan. Walaupun paginya masyarakat ada yang berkebun, potong karet, potong sawit, baca quran, shalat subuh, zikir, gunakan hak pilih sesuai hati nurani dalam pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kalau ada yang main money politic ambil uangnya, jangan coblos orangnya,” tegas UAS.

Sedangkan Irjen Asep Edi menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan dirinya beserta rombongan bersilaturahmi dengan UAS untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Meski dalam pemilu nanti masyarakat berbeda pilihan, jangan sampai terpecah belah. Ditegaskannya, bahwa Polri selalu mengajak peran aktif

Tauhid, KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym). Aa Gym menyambut baik maksud Irjen Asep menggandeng para ulama dan tokoh agama lainnya untuk mendinginkan suasana Pemilu 2024.

Aa Gym menegaskan akan mengajak para jamaah untuk meredam isu-isu provokatif agar tidak terjadi polarisasi dan disintegrasi sehingga bangsa Indonesia tidak terpecah belah selama pelaksanaan Pemilu 2024. Ia mengaku selalu menyerukan pemilu 2024 berjalan dengan damai. Aa Gym menyebut selalu meneguhkan kebersamaan dengan para jemaahnya.

“Selama ini tanpa diminta pun selalu menyerukan pemilu aman dan damai

abareskrim Irjen Asep Edi Suheri mengucapkan terima kasih kepada Aa Gym untuk menyerukan pesan damai. Pada kesempatan itu, Irjen Asep didampingi oleh Wakaops NCS Brigjen Yuyun Yudhantara, Kasatgas Preventif Ops NCS Brigjen Himawan Bayu Aji, KaminOps NCS, Kombes Budi Hermawan dan Wakasatgas Preemtif Ops NCS Kombes Dwi Suryo Cahyono.

“Kami berterima kasih kepada Aa Gym melalui ceramah-ceramah baik yang disiarkan di youtube dan media lainnya ataupun secara offline senantiasa menyerukan pemilu aman dan damai agar bangsa tidak terpecah belah,” kata Irjen Asep. ●



MENANTI BERKAH DARI IKN

Proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur masih terus berlangsung. Jelang pergantian kepala negara tahun depan, sejumlah legislator di Benua Etam kini menyoroti sejumlah hal tentang Pembangunan proyek strategis nasional itu.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Litiyono, mempertanyakan mengenai anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut, mengingat hingga kini belum ada informasi yang jelas. Dia mendesak pemerintah pusat untuk melakukan

transparan. Hari ini kan semua harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan juga," kata Nidya, Sabtu, 25 November 2023.

Nidya berharap, Badan Otorita IKN, Pemprov Kaltim, dan pemerintah pusat bisa bekerja sama dengan baik dalam membangun IKN. Ia juga menginginkan agar informasi mengenai IKN bisa diakses oleh masyarakat secara mudah.

Selain itu, Nidya juga menyoroti masalah penyerapan tenaga kerja lokal Kaltim dalam pembangunan IKN. Ia mengatakan, masyarakat Kaltim harus mempersiapkan diri dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar bisa terlibat dalam proyek IKN.

"Kita juga akan menyiapkan SDM kita dan SDM kita juga harus terserap dengan baik. Ini pesan juga untuk semua masyarakat Kaltim," ujarnya.

Kritik terkait pembangunan IKN yang

IKN seharusnya berdampak positif dengan serapan angkatan kerja. Namun, informasi yang diterimanya menyebutkan serapan tenaga lokal maupun perusahaan lokal masih sedikit.

Dia pun mendorong agar kehadiran IKN di Kaltim dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Khususnya, yang berkaitan dengan serapan tenaga kerja lokal.

"Memberikan ruang kepada generasi muda, seperti memberikan pelatihan khusus demi peningkatan kemampuan menyambut IKN Nusantara, adalah pekerjaan rumah yang harus di kerjakan Pemprov kaltim," terangnya.

Ely juga meminta pemprov memiliki inisiatif terhadap pengembangan keterampilan generasi muda. "Kalau perlu saya minta generasi muda di Kaltim dilatih dan dipersiapkan untuk bekerja di IKN sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan," harapnya.

Selain itu, dia berharap agar pemprov menyusun regulasi khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan para pengusaha lokal dalam IKN, agar dapat mengetahui partisipasi dan serapan ekonomi pengusaha lokal dengan detail.

"Kita harus bisa ikut berperan dan mendapatkan hasilnya supaya tidak terdengar lagi nada-nada miring soal tenaga kerja di sini," ujar dia.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, mengharapkan para pelaku usaha bidang konstruksi dari Kaltim mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi terhadap pembangunan IKN yang kian masif.

"Adanya pembangunan IKN juga bisa memberikan dampak positif untuk daerah penyangga di sekitar IKN. Tapi, pelaku usaha bidang konstruksi juga harus jadi perhatian," kata Seno.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan salah satu cara melibatkan pelaku usaha konstruksi lokal dalam pembangunan IKN adalah melalui skema kerja sama operasi (KSO) antara BUMN dan perusahaan lokal.

"Dengan kerja sama itu, perusahaan



transparansi anggaran kepada publik.

Menurut Nidya, anggaran pembangunan IKN sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang merupakan hak masyarakat untuk mengetahuinya. Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pemerintah.

"Kalau mau transparan, semua harus

tidak banyak menyerap tenaga lokal juga disampaikan anggota DPRD Kaltim, Ely Hartati.

"Pembangunan IKN saat ini minim melibatkan lokal, sehingga peran pemerintah sangat diharapkan agar pihak Otorita mengutamakan hal tersebut," ungkap Ely Hartati.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Kaltim itu meminta agar aktivitas mega proyek di

konstruksi di Kaltim punya kesempatan untuk sama-sama membangun IKN. Dampaknya, banyak kelompok masyarakat Kaltim yang diberdayakan membangun IKN. Kami di Kaltim tentu ingin turut serta memberikan kontribusi bagi pembangunan negeri," ujarnya.

Dia optimistis mekanisme KSO akan memberikan dampak positif pada pengembangan ekonomi Kaltim secara keseluruhan.

Anggota legislator daerah pemilihan Kutai Kartanegara itu juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang terus mempercepat pembangunan IKN menyusul jadwal pemindahan aparatur sipil negara (ASN) mulai berlangsung pada 2024, bahkan penyelenggaraan upacara 17 Agustus.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Bagus Susetyo, juga mengharapkan KSO BUMN dengan kontraktor lokal untuk pembangunan IKN. "Untuk saat ini, kontraktor lokal hanya dilibatkan sebagai sub-kontraktor. Keuntungan sub-kontraktor dinilai tipis sehingga perlu langsung terlibat KSO dengan BUMN," ujar Bagus.

Kerja sama operasi tersebut, menurut Bagus, bisa dipercayakan ke kontraktor lokal untuk proyek dengan nilai di bawah Rp100 miliar. Kategorisasi itu sesuai dengan kemampuan keuangan kontraktor daerah.

"Keikutsertaan dan kontribusi perusahaan lokal daerah dalam pembangunan IKN menjadi nilai pembangunan ibu kota baru itu di Kaltim, karena meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal," ujar Bagus.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fitri Maisyaroh, mengatakan, Kaltim harus menyiapkan SDM yang berkualitas untuk bisa bersaing dengan IKN yang dalam tahap pembangunan di Benua Etam.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya terfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengatakan, hadirnya IKN akan memperketat persaingan tenaga kerja, terutama bagi mereka yang ingin mencari nafkah di kawasan IKN. Oleh karena itu, ia berharap ada tingkat kesadaran tinggi pada masyarakat Kaltim untuk membangun karakter dan perilaku yang

positif.

"Kalau infrastruktur itu kita tidak punya dana, masyarakat bisa swadaya. Tetapi terkait SDM ketika banyak hal yang tidak beres, dalam hal ini Kaltim keluarganya masih banyak yang rentan, kemudian juga pemudanya masih banyak yang perlu dilakukan pembinaan, ini membutuhkan perhatian serius," ujar Fitri.

Ia menambahkan, bahwa SDM yang baik tentu dapat membangun infrastruktur

dalam menyambut hadirnya IKN.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim dalam menyambut hadirnya IKN.

"Kedatangan IKN menjadi tantangan bagi dunia pendidikan, khususnya universitas yang ada di Kaltim. Mereka harus siap bersaing dengan universitas dari luar Kaltim," ujarnya.



tur yang baik juga. Karena itu, ia mengajak masyarakat Kaltim untuk mengalami lompatan kualitas dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah provinsi yang telah memberikan berbagai program dan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Terlebih kita sudah di depan mata akan jadi mitra IKN. Tentu persaingan akan semakin ketat sehingga SDM kita perlu mengalami lompatan kualitas untuk bisa bersaing," tegasnya.

Sebagai anggota DPRD Kaltim, Fitri Maisyaroh sendiri telah melakukan berbagai kegiatan untuk membangun kualitas SDM di daerah pemilihannya, yaitu Balikpapan.

Ia telah memberikan pembinaan kepada sekitar 2.000 warga Kota Minyak, baik dalam hal keterampilan, kewirausahaan, maupun keagamaan. Ia berharap, langkah ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Balikpapan

Salehuddin menilai, lulusan mahasiswa Kaltim harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ia juga mengatakan, banyak perguruan tinggi di Kaltim yang ingin membangun fasilitas perkuliahan di wilayah IKN.

"Untuk itu, mereka harus mempersiapkan diri dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mereka juga harus membuka program studi dan jurusan baru sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang akan ada di IKN," jelasnya.

Politikus asal Golkar itu juga mengatakan, keterlibatan masyarakat lokal sangat penting bagi pemerintah Kaltim. Ia berharap, semua pihak dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi besar pemindahan IKN.

"Masyarakat Kaltim tidak hanya menjadi penonton dalam menyambut IKN. Mereka harus menjadi bagian dari pembangunan dan kemajuan IKN," ujarnya. •



SEMAKIN MASIF MEMBANGUN PAPUA

Sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Barat mulai diresmikan pembangunan maupun operasionalnya oleh Presiden Joko Widodo di akhir November 2023. Proyek-proyek tersebut diharapkan bisa membawa manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat di Timur Indonesia.

Presiden Jokowi melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Kamis, 23 November 2023. Presiden menyambut baik pembangunan kawasan tersebut agar kawasan timur Indonesia memiliki industri pupuk sendiri.

"Sudah 40 tahun kita memiliki lima industri pupuk, semuanya berada di kawasan barat wilayah negara kita Indonesia, yang kawasan timur belum ada sama sekali," ujar Presiden.

Presiden menilai, pembangunan kawasan industri pupuk tersebut dilakukan di Kabupaten Fakfak dikarenakan dekat dengan sumber suplai gas dan ke depannya dapat mendukung rencana besar pembangunan lumbung pangan

di Papua.

"Kalau itu dimulai tidak di-back up oleh industri pupuknya, ini juga akan berat. Oleh sebab itu, ini sudah sebuah rencana besar, saling mendukung, dan kita harapkan tanah Papua semakin makmur dan sejahtera," jelasnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah Papua serta menyuplai pupuk untuk lumbung pangan yang telah direncanakan, PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak ini juga dinilai dapat menopang kebutuhan pupuk di wilayah timur Indonesia seperti Maluku dan Maluku Utara.

"Kemudian juga sebagian bisa diekspor karena lebih dekat ke Australia, karena Australia juga impor sebagian dari kita dan sebagian dari negara lain," sambungnya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi men-



dorong agar pembangunan konstruksi kawasan tersebut segera dilaksanakan dan dapat diselesaikan pada 2028. "Memang ini proyek yang sangat besar, dengan investasi kurang lebih Rp30-an triliun," ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi berharap agar pabrik pupuk tersebut dapat memiliki kapasitas produksi hingga 1,15 juta ton pupuk urea dan 825 ribu ton amonia setiap tahunnya.

"Nanti tentu saja akan ada pengembangan lebih besar lagi," tandasnya.

Presiden Jokowi menekankan pembangunan industri pupuk di wilayah Papua merupakan bagian dari strategi Indonesia dalam menegakkan kedaulatan pangan. Hal

"Kita ini penduduk hampir 280 juta. Oleh sebab itu, kita harus mandiri, kita harus berdikari, kita harus bisa berdaulat betul dalam hal pangan," ujar Presiden.

Kedaulatan pangan tersebut harus dicapai agar Indonesia dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan tidak bergantung kepada negara lain.

Kepala Negara memberikan contoh,

konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia telah mengganggu pemenuhan kebutuhan pangan Indonesia.

"Saya juga kaget, lho kita ngambil apa dari sana? Ternyata gandum kita 30 persen itu berasal dari Rusia dan Ukraina, untungnya kita mendapat suplai dari negara lain. Ini yang harus kita pikirkan dalam jangka ke depan," ucapnya.

Presiden juga menekankan kembali pentingnya pembangunan industri pupuk dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

"Dalam proses tersebut, pupuk memiliki peran yang sangat penting. Sering ini dikeluhkan kalau saya ke desa, ke sawah, yang dikeluhkan oleh para petani pupuk—kelangkaan pupuk, ini yang harus kita segera selesaikan," tuturnya.

Presiden Jokowi juga menjelaskan urusan pangan bukan hanya mengenai pemenuhan kebutuhan beras, melainkan juga untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman yang ditanam.

"Oleh sebab itu, ini menjadi bagian yang sangat penting karena pupuk itu akan meningkatkan produktivitas tana-

man yang kita tanam, baik itu padi, baik itu tebu, baik itu jagung, semuanya membutuhkan pupuk," jelasnya.

Mengenai kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di wilayah Papua dalam mendukung industri pupuk tersebut, Presiden menilai perlu adanya penyesuaian suplai SDM yang dapat sesuai dengan kebutuhan industri dan kebutuhan lapangan.

"Saya kira ini kesempatan yang baik bagi SDM-SDM muda di tanah Papua untuk ikut membangun industri pupuknya sendiri," tegasnya.

Presiden Jokowi juga meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tangguh Train 3 di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Jumat, 24 November 2023. Presiden menyebut hasil produksi dari proyek tersebut dapat meningkatkan kapasitas produksi tahunan Tangguh LNG menjadi 11,4 juta ton per tahun.

"Dan berkontribusi signifikan untuk mendukung target produksi gas 12 miliar kaki kubik per hari pada tahun 2030," ujar Presiden.

PSN Tangguh Train memiliki nilai investasi senilai USD4,83 miliar atau setara

dengan Rp72,45 triliun. Presiden Jokowi juga mengapresiasi kehadiran PSN tersebut karena mampu menyerap banyak tenaga kerja dalam negeri, utamanya tenaga kerja asli Papua.

"Saat ini, 70 persen tenaga operasional tangguh adalah pekerja dari Papua Barat dan Papua," ucapnya.

Kepala Negara pun menyambut baik rencana Tangguh LNG yang menetapkan target sebesar 85 persen pekerja operasi pada 2029 adalah tenaga kerja asli Papua.

"105 teknisi operasi dan pemeliharaan kilang LNG adalah putra putri Papua

mikan Kampung Nelayan Modern di Desa Samber dan Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Kamis, 23 November 2023. Dia menekankan bahwa pendampingan para nelayan dalam hal teknis maupun manajemen untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun di Kampung Nelayan Modern merupakan hal yang sangat penting.

"Jadi persiapan untuk manajemen yang baik, persiapan untuk agar nelayan itu bisa memanfaatkan sebaik-baiknya sebuah lokasi yang sangat bagus seperti ini jangan sampai kita gagal lagi," ucap Presiden.

dibangun di Kampung Nelayan Modern yang berada di Desa Samber dan Binyeri tersebut dapat dikelola dengan baik dan terintegrasi.

"Pengelolaannya harus utuh, terintegrasi, berkesinambungan, tidak setengah-setengah, tidak selesai hanya di fasilitas, tetapi sekali lagi pendampingan, tata kelola, pendampingan manajemen itu sangat diperlukan," tegasnya.

Kepala Negara menjelaskan bahwa Kampung Nelayan Modern yang diresmikannya tersebut dibangun secara terintegrasi dan memiliki fasilitas yang cukup lengkap, dimulai dari cold stor-



Barat dan Indonesia yang telah direkrut sejak SMA, yang menjalani program pendidikan dari BP di Berau," sambungnya.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa terdapat sejumlah proyek hulu migas dan turunannya yang akan dibangun di Papua Barat, antara lain proyek Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) Ubadari, proyek hilirisasi blue ammonia, serta proyek Lapangan Asap, Kido, dan Merah (AKM).

Membangun Sektor Kelautan

Presiden Joko Widodo juga meres-

Presiden memaparkan bahwa terdapat beberapa pembangunan serupa dengan fasilitas-fasilitas penunjang yang lengkap dan bagus kemudian tidak bisa beroperasi secara berkelanjutan dikarenakan tata kelola yang tidak baik.

"Banyak sekali cold storage yang sudah dibangun yang lalu-lalu, tetapi berhenti karena enggak bisa bayar listrik," ucap Presiden.

Oleh karenanya, Presiden Jokowi menekankan agar sejumlah fasilitas yang

age, pabrik es, hingga bengkel bagi para nelayan. Presiden mengingatkan agar seluruh pihak dapat merawat dan memelihara fasilitas tersebut dengan baik.

"Membangun lebih mudah, merawat dan memelihara itu yang biasanya kita gagal," ucapnya.

Presiden Jokowi berpesan agar hasil yang telah didapatkan oleh para nelayan di kampung tersebut harus didorong untuk melakukan hilirisasi. "Dan kita harapkan di kampung nelayan ini nanti bisa masuk ke rantai pasok nasional, bisa

masuk ke rantai pasok global, sehingga betul-betul apa yang kita bangun ini ada manfaatnya,” tegasnya.

Mantan Wali Kota Solo ini juga menyampaikan bahwa pembangunan maritim merupakan sebuah upaya yang kompleks dalam mengelola sumber daya serta potensi laut yang dimiliki.

“Pembangunan maritim ini tidak hanya urusan nelayan saja, karena yang namanya sumber daya alam—laut kita ini kan bukan hanya urusan ikan,” ungkap Presiden.

Presiden menuturkan bahwa banyak potensi yang harus dikelola yang berkaitan dengan kelautan dan kemaritiman, di antaranya adalah terumbu karang, biota laut, hingga gas serta minyak yang ada di dasar laut.

“Saya kira sumber kekayaan alam laut kita kan gede sekali, belum nanti budi daya rumput laut kalau dikembangkan di seluruh pesisir yang kita miliki itu juga sebuah potensi yang besar,” sambungnya.

Kepala Negara menekankan bahwa untuk mengelola itu semua diperlukan tata kelola yang baik, dimulai dari meningkatkan kemampuan nelayan hingga menciptakan tata kelola modern dalam pengelolaan kekayaan alam laut Indonesia, salah satunya rumput laut.

“Sehingga bisa masuk ke supply chain nasional, bisa masuk ke supply chain global,” harapnya.

Presiden Jokowi juga menanggapi mengenai potensi hasil laut yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Presiden menilai bahwa diperlukan pembangunan infrastruktur logistik yang mampu menyalurkan hasil laut tersebut langsung ke pasar global.

“Sehingga yang diminta oleh bupati ada penerbangan langsung misalnya ke Jepang, ada penerbangan langsung ke Amerika, ada penerbangan langsung (ke) China, yang itu adalah pasar-pasar tuna Indonesia, tidak usah lewat tangan kedua, tangan ketiga,” jelasnya.

Dengan begitu, Presiden Jokowi menilai, harga jual hasil laut tersebut dapat diperbaiki dan kesejahteraan nelayan juga dapat meningkat. Oleh karenanya, Presiden menyebut dirinya akan meminta kepada kementerian terkait untuk menindaklanjutinya.

“Saya nanti akan sampaikan ke Men-

teri Perhubungan, Menteri BUMN, agar ada penerbangan langsung kargo untuk urusan ikan tuna dengan jumlah sesuai dengan kapasitas di Biak dan sekitarnya,” ujarnya.

Transportasi Lebih Baik

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa wilayah Papua saat ini makin berkembang dengan pembangunan dan kegiatan perekonomian yang terus meningkat, sehingga diperlukan fasilitas transportasi yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan Bandar Udara Siboru dan Bandar Udara Douw Aturure, Kamis, 23 November 2023 di Bandar Udara Siboru, Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

“Papua makin berkembang, pamban-

usaha-usaha baru,” sambung Presiden.

Kepala Negara menyebut bahwa kedua bandara baru yang diresmikan tersebut akan menjadi jembatan udara di masing-masing provinsi. Presiden menuturkan, misalnya untuk Bandar Udara Siboru yang berlokasi di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dinilai dapat terhubung dengan sejumlah wilayah lainnya seperti Kabupaten Sorong, Kabupaten Kaimana, hingga Kabupaten Teluk Bintuni.

“Bandara Siboru ini akan menjadi jembatan udara di wilayah Papua Barat, menghubungkan Fakfak dengan daerah-daerah yang lain,” tuturnya.

Sedangkan untuk Bandar Udara Douw Aturure yang berlokasi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, dapat menghubungkan Kabupaten Nabire



gunan makin banyak, kegiatan ekonomi makin meningkat sehingga dibutuhkan fasilitas dan sarana transportasi yang lebih baik,” ucap Presiden.

Presiden Jokowi menuturkan bahwa akses transportasi di wilayah Papua tidaklah mudah. Presiden menilai masih terdapat sejumlah wilayah yang sulit untuk dijangkau sehingga membutuhkan waktu tempuh yang lama dari satu daerah ke daerah lainnya.

“Bandara Siboru dan Bandara Douw Aturure yang kita resmikan pada hari ini akan meningkatkan konektivitas di Papua, meningkatkan mobilitas orang, meningkatkan mobilitas barang, dan membuka banyak peluang untuk memicu tumbuhnya ekonomi-ekonomi baru,

dengan sejumlah wilayah hingga lintas provinsi seperti Kabupaten Manokwari di Papua Barat dan Kota Jayapura di Papua.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengimbau kepada jajaran pemerintah daerah agar masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan kedua bandara tersebut dengan baik, baik untuk pergerakan orang maupun untuk memperkenalkan potensi yang ada di Papua.

“Memanfaatkan akses yang makin terbuka untuk memperkenalkan potensi-potensi yang ada di daerah kita ini, memperkenalkan destinasi-destinasi wisata yang ada, dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Papua,” tandasnya. ●



RIDHO RAHMADI TURUN GUNUNG GAET GENEREASI MUDA

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, telah mengumumkan kesiapannya untuk bertarung dalam Pemilu 2024 di daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat (Sumbar) 1.

Ridho Rahmadi menjadi satu-satunya Ketua Umum partai yang akan bersaing di Sumbar, Ridho mengungkapkan harapannya untuk meraih satu kursi di Dapil Sumbar 1.

"Di Sumbar 1 ini, kita berharap dapat satu kursi. Inshaallah kita yakin,"katanya.

Untuk meraih kemenangan Partai Ummat di Sumbar, Ridho Rahmadi telah merencanakan berbagai strategi yang meliputi sosialisasi kepada masyarakat dan penggaetan generasi muda untuk mendukung Partai Ummat.

"Salah satunya dengan mendekat ke anak-anak muda. Itu termasuk perjalanan kita ke kampus-kampus dan sosialisasi

langsung ke masyarakat," jelasnya.

Mengenai alasan pemilihannya maju di Dapil Sumbar 1, Ridho Rahmadi menjelaskan bahwa Sumbar memiliki nilai historis dan merupakan tempat di mana Partai Ummat telah berjuang secara ideologis.

"Saya pilih Sumbar, karena dari analisis dan faktanya Sumbar itu merupakan Serambi Madinahnya Partai Ummat,"sambungny.

Selain alasan ini, Ridho Rahmadi juga merujuk pada sejarah kemenangan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, dalam Pilpres 2004 di Sumbar.

"Ditambah data historis, pak Amien Rais menang di tiga wilayah, salah satunya di Sumatera Barat," tambahny.

Ridho Rahmadi menegaskan bahwa dalam Pemilu 2024, seluruh mesin kader Partai Ummat akan siap bergerak dan bersosialisasi langsung dengan masyarakat.

Meskipun dia tidak mendiskusikan pencalonan dan Pileg secara rinci, dia menekankan bahwa tujuan utama berdirinya Partai Ummat adalah untuk mendorong kebaikan (bil-ma'rufi) dan melarang kemungkaran (anil-munkar).

Ketua DPW Partai Ummat, Taslim, menyatakan kebanggaannya atas keputusan Ridho Rahmadi untuk maju di Dapil Sumbar dan menekankan bahwa langkah ini diambil demi kemenangan bersama dan menjaga harga diri seluruh kader dan simpatisan Partai Ummat.

"Kita sangat bangga atas keputusan Ridho Rahmadi maju di Dapil Sumbar 1 demi kemenangan bersama dan menjaga harga diri seluruh kader dan simpatisan Partai Ummat,"ungkapny.

Keterlibatan Partai Ummat dalam Pemilu 2024 tidak bisa dilepaskan dari peran penting



yang dimainkan oleh Amien Rais dan ketua partai tersebut, Ridho Rahmadi. Dalam berbagai sumber, informasi mengenai latar belakang Ridho Rahmadi menyatakan bahwa ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 13 April 1985.

Ia adalah menantu dari Amien Rais dan telah ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Ummat, sedangkan Amien sendiri menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro. Selain berperan sebagai seorang politikus, Ridho juga merupakan seorang akademisi.

Agung Mozin, telah mengungkapkan bahwa penunjukan Ridho Rahmadi sebagai ahli teknologi informasi adalah keputusan yang sangat tepat yang diambil oleh Majelis Syuro.

"Hal ini dikarenakan dalam dunia politik saat ini, keahlian dalam teknologi sangat dibutuhkan agar sebuah partai dapat bersaing dengan partai lainnya," katanya.

Agung juga berharap bahwa usia yang masih muda dan termasuk dalam generasi milenial dapat mem-

peserta Pemilu 2024, yang merupakan partisipasi perdana partai tersebut dalam pemilihan umum.

Menurut informasi yang dilansir Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan bahwa Partai Ummat berhasil memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024. Setelah lolos, Ketua Majelis Partai Ummat, Amien Rais, mendorong Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk tidak menunda Pemilu 2024.

Keberhasilan Partai Ummat dalam



Ridho Rahmadi adalah suami dari Tasniem Fauzia Rais, putri keempat dari Amien Rais. Ia merupakan seorang ahli teknologi yang meraih gelar PhD-nya dari Radboud University, Belanda.

Selain itu, Ridho Rahmadi juga memperoleh dua gelar master dalam bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence) dari Czech Technical University di Praha, Republik Ceko, dan Johannes Kepler University di Austria.

Setelah menyelesaikan studinya di Belanda, Ridho pernah menjadi peneliti tamu di Carnegie Mellon University, Amerika Serikat. Ia juga aktif mengajar di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, sebelum bergabung dengan Partai Ummat.

Mantan Wakil Ketua Partai Ummat,

bantu Partai Ummat mendapatkan dukungan dari kaum muda.

Agung menekankan bahwa dalam politik, integritas dan kapabilitas bukanlah satu-satunya faktor penting. Loyalitas terhadap partai juga merupakan hal yang sangat penting. Ia percaya bahwa semua kriteria tersebut sudah ada pada Ridho Rahmadi, menantu Amien Rais.

Partai Ummat secara resmi didirikan oleh Amien Rais di Yogyakarta pada tanggal 29 April 2021.

Dengan usianya yang baru mencapai 38 tahun, Ridho menjadi salah satu Ketua Umum Partai Politik termuda yang akan bersaing di Pemilu 2024.

Di bawah kepemimpinan Ridho, Partai Ummat berhasil lolos sebagai

memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024 tidak lepas dari bimbingan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang menginstruksikan KPU untuk melakukan verifikasi faktual perbaikan di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, menetapkan nomor urut 24 untuk Partai Ummat dalam Pemilu 2024.

Sebelumnya, Partai Ummat mengajukan gugatan terhadap KPU karena awalnya dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) dalam kepengurusan di wilayah NTT dan Sulawesi Utara.

Setelah mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu antara Partai Ummat dan KPU, partai ini diberi kesempatan untuk mengikuti verifikasi faktual kembali. •

WILDAN ANWAR HAKIM BAWA MISI PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

Dalam pemilihan umum (pemilu) tahun 2024, perhatian juga diberikan kepada generasi muda sebagai wakil rakyat atau calon anggota legislatif (caleg).

Banyak partai politik (parpol) yang mulai melibatkan anak muda sebagai kader mereka. Bahkan, beberapa dari mereka turut serta dalam pertarungan pemilihan anggota legislatif (Pileg), meskipun pengalaman mereka dalam politik masih terbatas.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota besar seperti Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah.

Salah satunya adalah di Kota Magelang, di mana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berperan aktif dalam hal ini. Ketika pendaftaran bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu, DPD PKS Kota Magelang mendaftarkan kader termudanya, yakni Wildan Anwar Hakim (23 tahun).

Wildan, yang lahir pada 4 September 2000 di Magelang, mendaftarkan diri sebagai Bacaleg di daerah pemilihan (dapil) 2 Magelang Tengah.

Meskipun ia terdaftar pada nomor urut 10, yang artinya ia berada di posisi paling bawah dalam daftar caleg dari partainya, hal tersebut tidak membuatnya patah semangat.

Wildan saat ini merupakan mahasiswa semester 8 jurusan hukum di Universitas Diponegoro (Undip), yakin bahwa nomor urut bukanlah penghalang dalam perjuangannya dalam Pileg. Motivasinya untuk melayani masyarakat, khususnya anak muda, sangat kuat.



"Anak muda seharusnya diperimbangkan sebagai calon legislatif karena mereka dapat mewakili perspektif dan aspirasi generasi muda yang seringkali berbeda dari generasi sebelumnya,"ujarnya.

Ia meyakini bahwa anak muda cenderung lebih inovatif dan memiliki kemampuan berpikir kritis, yang merupakan kualitas penting dalam pembuatan kebijakan.

"Selain itu, melibatkan partisipasi politik anak muda akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab generasi muda terhadap proses politik dan pembangunan negara,"jelasnya.

Wildan berpendapat bahwa sektor pemuda harus terus didorong agar memiliki kesempatan dan peran yang lebih besar dalam pembangunan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.

Wildan juga memiliki target ambisius dalam pemilihan nanti, yakni meraih sekitar 3.000 suara dari total sekitar 36.000 suara di Dapil 2.

Bagiannya, minimal harus meraih 1.700 suara untuk bisa mendapatkan kursi sebagai wakil rakyat.

Jika terpilih, Wildan berharap dapat bergabung dalam Komisi C yang salah satunya bertanggung jawab dalam hal pendidikan. Ia ingin berperan dalam mendorong perkembangan pendidikan nonformal di Magelang agar semakin maju dan diakui oleh orang tua.

"Saya merasa prihatin melihat banyak anak muda saat

ini yang kurang memiliki kegiatan yang terarah setelah sekolah. Banyak dari mereka hanya menghabiskan waktu dengan bersantai, nongkrong, atau bahkan terlibat dalam konflik remaja,"sambungannya.

Menurut Wildan, sebaiknya setelah sekolah, mereka harus terlibat dalam kegiatan positif atau melanjutkan pembelajaran, baik di rumah, dalam lingkungan mereka, atau melalui lembaga pendidikan nonformal seperti pelatihan bahasa Inggris yang

pembangunan Magelang dan melayani masyarakat, terutama generasi muda, melalui perannya sebagai calon anggota legislatif.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jateng, Dr. H. Muhammad Haris, memiliki target ambisius dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Ia berharap PKS bisa memenangkan 18 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah. Pada Pemilu 2019, PKS berhasil meraih 10

besar pada pemilu mendatang, DPW PKS Jateng memahami pentingnya mendekati pemilih dari kalangan milenial atau Gen Z. Pada pemilu 2024, suara dari Gen Z di Jawa Tengah diperkirakan mencapai lebih dari 50 persen.

"PKS mewajibkan semua kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk memiliki caleg berusia di bawah 30 tahun. Setiap kabupaten/kota juga diwajibkan memiliki setidaknya satu wakil dari Gen Z,"bebernyanya.

Haris menyadari bahwa memikat



berkualitas.

Selain itu, Wildan juga berkomitmen untuk mendukung dan mengoptimalkan sembilan program unggulan yang telah diusung oleh Wali Kota Magelang, salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat Maju, Sehat, Bahagia (Rodanya Mas Bagia).

Jika terpilih, ia bersama PKS berencana untuk meningkatkan nilai program tersebut dari Rp 30 juta per RT per tahun menjadi Rp 50 juta per RT per tahun.

Dengan semangatnya yang tinggi, Wildan Anwar Hakim berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam

kursi di DPRD Jawa Tengah.

Dengan tekad, usaha, dan doa, Haris yakin bahwa mereka dapat mencapai target peningkatan suara sebesar 15 persen pada Pemilu 2024.

"Selain itu, PKS juga memiliki harapan untuk meningkatkan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 7 kursi menjadi 12 kursi,"ungkapnya.

Haris, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Salatiga, menyatakan bahwa PKS terus berkembang secara bertahap. Ia optimistis dengan perkembangan partainya.

Dalam upaya meraih suara yang lebih

Gen Z agar mau terlibat di politik bukanlah hal yang mudah. Gen Z lebih cenderung tertarik pada dunia bisnis dan filantropi daripada politik.

Meskipun demikian, PKS sangat peduli terhadap generasi muda ini dan berharap mereka tidak akan golput pada pemilu mendatang.

Haris dan timnya tetap optimis dalam menghadapi kontestasi pemilu tahun 2024. Mereka telah memahami karakteristik pemilih di daerah tersebut, baik yang bersikap legowo (menerima) maupun yang lebih kritis, serta memperhitungkan berbagai faktor dalam strategi politik mereka. ●

GENERASI MILENIAL PERKUAT IKLIM DEMOKRASI

Manifestasi demokrasi menunjukkan partisipasi pemuda memiliki peran krusial dalam pembangunan berkelanjutan.

Generasi milenial hadir untuk menciptakan dan memperkuat iklim demokrasi inklusif, menjaga hubungan positif antar generasi muda dan bersama-sama bergerak untuk meningkatkan solidaritas kerjasama.

Proses ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik, dengan penekanan pada keterlibatan pemuda dalam parlemen dan aktif dalam perumusan kebijakan pemerin-

tahan.

Salah satu kader Partai Amanat Nasional (PAN) Marta Dwi Ananda, perempuan muda berusia 23 tahun, dengan percaya diri menyatakan kesiapannya untuk ikut dalam Pemilihan Legislatif 2024 di DPRD Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim).

Ia akan mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) II, mencakup Kecamatan Nipah Panjang, Rantau Rasau, Berbak, dan Kecamatan Sadu di nomor urut 9.

Marta menegaskan bahwa dirinya, sebagai perempuan lajang, siap memposisikan diri sebagai wakil dari masyarakat pemuda milenial.

"Fokusnya adalah memberdayakan pemuda untuk bertindak, dengan penekanan pada perlindungan hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari visi dan misinya," jelasnya.

Marta percaya bahwa saatnya bagi generasi muda untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan Tanjabtim yang lebih baik.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Jambi, Rusli Kamal Siregar menekankan bahwa keberhasilan PAN terletak pada upaya individu masing-masing Caleg.

Rusli berharap agar setiap Caleg dapat memulai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan pendekatan dan strategi yang sesuai dengan karakter mereka masing-masing.

"Strategi kita berarti semua Caleg harus aktif untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan meraih sebanyak mungkin suara di setiap Daerah Pemilihan (Dapil)," ungkapnya.

Rusli Kamal menyampaikan harapannya bahwa DPD PAN menargetkan perolehan minimal enam kursi di DPRD Kota Jambi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024



dan berambisi untuk mendapatkan posisi kepemimpinan di dalamnya.

“Dengan keyakinan, kita tidak berharap adanya perubahan, karena semuanya sudah kita tetapkan sejak awal,” pungkasnya.

Melalui penelusuran data Daftar Pemilih Tetap (DCT) Pemilu 2024 bahwa ada sedikitnya 98 caleg muda yang berlaga di Pemilu 2024 berusia 21 tahun.

Partai Amanat Nasional (PAN) yang berusia 21 tahun, yaitu Nina Marlina asal Kota Depok, Jawa Barat, yang akan bersaing di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII.

Partai Bulan Bintang (PBB) memiliki sembilan caleg berusia 21 tahun yang akan bersaing dalam Pemilu 2024. Mereka tersebar di berbagai daerah

Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) memiliki 25 caleg berusia 21 tahun yang tersebar di berbagai Dapil, seperti Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan I, Jatim VIII hingga Jatim X, serta Jateng V hingga Jateng IX.

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) memiliki satu caleg berusia 21 tahun, Radikal Osama Siregar, yang akan bersaing di Dapil Riau I dengan nomor urut 2.

Partai Gerindra mencatatkan empat caleg berusia 21 tahun yang akan bersaing di Dapil Sumatera Selatan II, Jateng IX, Jatim III, dan Kalimantan Tengah.

Partai Hanura juga memiliki dua caleg berusia 21 tahun, yaitu Purbo Widodo dan Komalasari, yang akan bersaing di Dapil Jateng III dan Jateng X.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencatatkan dua caleg berusia 21 tahun, Hana Sausan dan Yahya Ayyash, yang akan bersaing di Dapil Jabar IX dan Sulawesi Tenggara.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencatatkan lima caleg berusia 21 tahun yang akan bersaing di Dapil Sumatera Utara I, Sumsel II, Lampung II, Jawa Barat IV, dan Sulawesi Tengah.

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) mencatatkan

14 caleg berusia 21 tahun yang akan bersaing di berbagai Dapil, seperti Sumatera Barat I, Jabar II dan Jabar III, Jateng II, Jateng VII, Jateng IX, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jatim III, Jatim V, Jatim VII, Jatim X, dan Kalimantan Utara.

Partai Nasdem juga memiliki lima caleg berusia 21 tahun yang akan bersaing di Dapil Sumatera Utara III, Jateng II, Jatim IV dan Jatim IX, serta Kalimantan Barat II.

Partai Perindo mencatatkan dua caleg berusia 21 tahun, yaitu Muhammad Arjuna Artik Saputra dan Muhammad Irfan Syaumi, yang akan bersaing di Dapil Jabar XI dan Jatim VIII.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga mencatatkan dua caleg berusia 21 tahun, yaitu Dhea Umi Choiriyah dan Muhammad Hosni, yang masing-masing akan bersaing di Dapil Sumsel I dan Jatim VIII.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mencatatkan sebelas caleg berusia 21 tahun yang akan bersaing di Dapil Jambi, Sumsel II, Lampung II, Jabar VII, Jateng II, Jatim VIII, Banten II, dan Kalimantan Selatan II. •



Strategi kita berarti semua Caleg harus aktif untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan meraih sebanyak mungkin suara di setiap Daerah Pemilihan (Dapil)

pemilihan, antara lain Jawa Barat IX, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat II, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat.

Partai Buruh juga mencatatkan delapan caleg berusia 21 tahun yang akan bersaing di Dapil Papua Barat, Bali, Jawa Timur IX, Jawa Timur VII, Jawa Tengah V, Jawa Barat IX, dan Sumatera Selatan I.

Partai Demokrat memiliki dua caleg berusia 21 tahun, yakni Rifky Miftahul Achmad dan Fakhri Muhammad Novendi, yang akan bersaing di Dapil Jatim III.



DARI DEMONSTRASI KINI MASUK POLITIK

Manik Marganamahendra, mantan Ketua Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), kembali menjadi sorotan saat ia bersiap menjadi calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jakarta.

Manik maju sebagai calon dari Partai Perindo pada Pemilu 2024 di Daerah Pemilihan 6 Jakarta Timur yang meliputi wilayah Makasar, Cipayung, Ciracas, dan Pasar Rebo.

Berdasarkan akun media sosialnya, Manik menggambarkan keputusan ini sebagai salah satu pilihan paling rumit dan berat yang harus diambilnya.

"Saya yakin ada yang merasa dikhianati, ada yang tidak setuju, dan ada yang kecewa," ujarnya di akun Instagram @marganamahendra.

Manik Marga-

namahendra menjadi berita utama pada tahun 2019 ketika ia mengejutkan publik dengan kritiknya terhadap pejabat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Dia terkenal menyebut mereka sebagai "Dewan Pengkhianat Rakyat," sebuah pernyataan yang dia sampaikan dengan berani di depan anggota majelis.

Dikenal publik sebagai Ketua BEM UI pada tahun 2019 hingga 2020, Manik juga pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) pada tahun 2018 hingga 2019.

Ia aktif terlibat dalam berbagai aksi protes, khususnya terkait penolakan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Di usianya yang ke-27 tahun, Manik tetap berkomitmen untuk konsisten dan tak tergoyahkan dalam memberikan dukungan kepada masyarakat, seperti yang ditunjukkan-



nya saat berhadapan dengan anggota DPR RI pada tahun 2019.

Menurut Manik, pencalonannya sebagai anggota legislatif bermula dari persepsi adanya kesenjangan antara wakil pemerintah di parlemen dan masyarakat umum, yang menurutnya belum terjembatani secara memadai.

“Sudah terlalu lama kita kekurangan jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput,” kata Manik.

Ia meminta dukungan dan partisipasi masyarakat dalam proses pencalonannya.

“Hal inilah yang pada akhirnya membuat saya memutuskan bahwa kesadaran politik juga harus dibawa ke meja politik praktis,” ujarnya.

“Jika Anda juga merasa terpenggil untuk bergerak dalam ‘gerakan sistemik’ ini, izinkan saya meminta kritik, masukan, dan saran,” sambungnya.

Manik menakar jika politik itu memang rasanya mahal untuk orang muda minim privileg seperti dirinya. Akhirnya, diakui Manik dirinya sudah menjalankan kapasitasnya sebagai mahasiswa dengan melakukan kritik di luar sistem dan menyampaikan rekomendasi kebijakan.

“Dari dulu saya selalu menyuarakan isu rokok, misalnya pengendalian konsumsi rokok dan tembakau. Saya melihat minim sekali politikus yang menyuarakan isu tersebut,” katanya.

Keputusannya untuk masuk partai politik dan maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) setidaknya bisa membawa warna yang sudah diperjuangkan sebelumnya saat menjadi mahasiswa.

“Bagaimanapun masyarakat sipil berperan dalam membentuk aksi demonstrasi, audiensi, policy brief dan banyak hal lainnya. Namun, tetap ada orang yang punya otoritas untuk menentukan kebijakan tertentu seperti membuat undang-undang. Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Pemerintah (PP), mereka adalah wakil rakyat,” bebernya.

Lalu yang menjadi banyak pertanyaan terhadap Manik adalah kenapa join Caleg Muda?

Manik menjelaskan bahwa sejatinya manusia butuh belajar setiap saat. Begitupun dengan dirinya yang butuh be-

lajar lebih detail mengenai isu-isu pencalonan, khususnya biaya kampanye.

“Saya juga ingin tahu gambaran anak-anak muda yang terjun di politik, apakah mereka memiliki latar belakang dan visi yang sama seperti saya? Selain itu, saya merasa Caleg muda bisa menjadi jalan untuk berjejaring dengan teman-teman Caleg muda ataupun di luar Caleg muda yang menjadi narasumber,” ungkapnya.

Profil Manik Marganamahendra

Manik dikenal publik sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Kesehatan

1 Bogor, SMPN 4 Bogor, dan SMAN 1 Bogor. Sebagai lulusan program Kesehatan Masyarakat, Manik fokus pada pengendalian tembakau.

Pada tahun 2020, ia terlibat dalam kerja advokasi dengan Komite Nasional Pengendalian Tembakau hingga awal tahun 2023.

Saat ini beliau aktif terlibat dalam Think Policy Indonesia sebagai pengurus koalisi dan Dewan Pemuda Indonesia Pengendalian Tembakau (IYCTC) sebagai ketua tim.

Pada tahun 2022, ia mengikuti kompetisi Abang Nene Jakarta Timur dan menjadi salah satu finalis, tepatnya runner-up kedua, Abang Jakarta Penuh Harapan.



Masyarakat (BEM FKM) pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.

Mengawali studinya pada tahun 2015 sebagai mahasiswa program Kesehatan Masyarakat, Manik aktif mengikuti Model United Nations Club, Departemen Kajian Strategis dan Aksi BEM FKM UI, Tim Debat FKM UI untuk OIM UI 2016, Senat Indonesia Mahasiswa Kesehatan Masyarakat (ISMK-MI), dan Aliansi Organisasi Kesehatan Mahasiswa Indonesia (AOMKI).

Sebelum masuk perguruan tinggi, pria kelahiran Bogor, 11 Desember 1996 ini bersekolah di SDN Semeru

Belum lama ini, Manik menyempatkan diri bertemu dengan Ekonom dan politikus alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Faisal Basri.

Faisal Basri memberikan semangat agar anak muda seperti Manik terus maju karena memang banyak harapan terbentang didepan mata.

“Gas aja Manik! Kita tidak pernah tahu rahasia-rahasia Tuhan dan bantuan-bantuan tangan dari orang-orang baik yang juga punya mimpi dan cita-cita serupa dengan kita untuk politik,” ujarnya. •

ANGGARAN

Gunawan Effendi

Sejauh ini tahapan-tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) berlangsung sesuai dengan perencanaan. Dari sisi jadwal, masa kampanye yang diagendakan Komisi Pemilihan Umum mulai memasuki pelaksanaannya pada 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Berlanjut dengan masa tenang hingga tiba Hari H pemungutan suara, 14 Februari 2024. Jika terjadi Pilpres hingga dua putaran, Hari H pemungutan suara sudah terjadwal pada 25 Juni 2024.

Selanjutnya, rekapitulasi hasil penghitungan suara, 27 Juni- 20 Juli 2024, Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD, 1 Oktober 2024. Sedangkan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden, 20 Oktober 2024. Rangkaian jadwal itu sudah tersusun rapi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022. Tinggal pelaksanaannya saja yang perlu dikawal agar sesuai dengan perencanaan. Alhasil, kita akan dapat menilai sukses penyelenggaraan perhelatan politik itu dengan membandingkan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaannya.

Sukses adalah pelaksanaan yang tegak lurus atau simetris dengan perencanaan. Bolehlah ada toleransi, misalnya 90 persen sukses meski 10 persen meleset dari perencanaan.

Bagaimana anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024? Kementerian Keuangan telah merinci alokasi anggaran itu sejak 2022 lalu. Per 2022 anggaran Pemilu mencapai Rp3,1 triliun. Pada 2023, anggaran Pemilu mencapai Rp30,0 triliun. Selanjutnya pada 2024, anggarannya mencapai Rp38,2 triliun. Totalnya Rp71,3 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata menjelaskan total keseluruhan anggaran itu untuk menetapkan antara lain jumlah kursi, pengawasan penyelenggara Pemilu, pemutakhiran data pemilih, penyusunan dapil, pengelolaan dan pengadaan laporan dan dokumentasi logistik. Jadi, sebagian besar anggaran dialokasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Pak Dirjen mengemukakan pula, total realisasi anggaran Pemilu per 2022 mencapai Rp2,7 triliun atau 88,2 persen dari

pagu anggaran Rp3,1 triliun. Sedangkan realisasi hingga 30 September 2023, telah mencapai Rp17,8 triliun atau 59,3 persen dari pagu anggaran Rp30,0 triliun.

Untuk anggaran Pemilu TA 2024 sebesar Rp38,2 triliun, dana tersebut telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024. Menurut Pak Dirjen, besaran anggaran tersebut hanya untuk kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 satu putaran.

Meski begitu, Kemenkeu telah memastikan anggaran untuk Pemilu 2024 juga dicadangkan bila terjadi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sampai dua putaran. "Kita pokoknya sudah menyediakan cukup kok, tenang saja. Termasuk kalau ada putaran kedua, kita akan sediakan kalau Pilpresnya ada putaran kedua ya. Jadi sudah siap kita,

tinggal semoga yang terbaiklah buat Indonesia," kata Pak Isa.

Nah, bagaimana dengan Pilkada 2024 yang juga berlangsung serentak? Pergeseran jadwal agaknya masih menjadi kontroversi meskipun pada Selasa, 21 November 2023 DPR sudah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi usulan inisiatif DPR. Salah

satu poin krusial utama yang disepakati dalam rapat pleno tersebut yakni memajukan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari November 2024 menjadi September 2024.

Sebelumnya Mendagri M Tito Karnavian menyampaikan usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada ke Komisi II DPR RI untuk mengubah jadwal Pilkada serentak. Tito mengusulkan Pilkada serentak dilakukan pada September 2024, dua bulan lebih cepat dari yang ditentukan.

Toh jarang yang melihat kontroversi ini dari sudut disiplin anggaran. Namun jika memang hirau pada Pilkada 2024, silakan kawal masing-masing daerah provinsi maupun kabupaten dan kota menjelang tutup tahun anggaran 2023 terkait dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Inilah sumber pendanaan penyelenggaraan Pilkada 2024 selain APBD. ●





EKONOMI DI SEKITAR SUKSESI

Indikasi positif dan negatif muncul dari ekonomi domestik (dalam negeri) maupun lingkungan global di akhir 2023. Berkombinasi dengan siklus politik lima tahunan berbentuk Pemilu, Pilpres, dan Pilkada, apakah riang-gembira akan menandai perjalanan Indonesia pada 2024 dan tahun-tahun selanjutnya?



Tanda-tanda baik muncul dari ujung timur Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan proyek Tangguh Train 3. Proyek tersebut merupakan proyek pengembangan kilang LNG di lapangan gas tangguh, Teluk Bintuni Papua Barat.

Presiden Jokowi mengatakan,

proyek tangguh train 3 merupakan penghasil gas bumi terbesar di Indonesia. Proyek ini juga banyak menyerap tenaga kerja. Saat ini 70 persen tenaga operasional tangguh adalah pekerja dari provinsi Papua Barat dan Papua. Ia mendengar tenaga operasional lokal dapat mencapai 85 persen di 2029.

Jokowi menambahkan, 105 teknisi

operasi dan pemeliharaan kilang LNG adalah putra putri Papua Barat dan Indonesia yang direkrut sejak SMA. Mereka pun telah menjalani program pendidikan.

"Proyek tangguh train 3 ini dibangun dengan investasi US\$ 4,83 miliar atau Rp 72,45 triliun dan proyek ini akan meningkatkan kapasitas produksi ta-



hunan tangguh LNG menjadi 11,4 juta ton pertahunnya,” ujar Jokowi dipantau dari Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, 24 November 2024.

Jokowi mengatakan pula akan melakukan groundbreaking proyek Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) Ubadari, proyek hilirisasi blue ammonia, dan dimulainya pengemban-

gan lapangan gas Asap Kido Merah. Ini terkait dengan penyesuaian ekonomi terhadap perubahan iklim global.

Dari sektor perbankan, Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 akan lebih tinggi dari pertumbuhan pada tahun 2023. Gubernur BI Perry Warjiyo mengemukakan, salah satu pendorong

pertumbuhan ekonomi 2024 adalah perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu).

“Pertumbuhan tahun 2024 akan naik didorong tetap baiknya keyakinan konsumen, serta positifnya pelaksanaan Pemilu 2024,” ungkap Perry, Kamis, 23 November 2023.

Sebelumnya, di depan para wakil rakyat di parlemen, Perry mengemukakan, perekonomian Indonesia tahun depan tetap tumbuh kuat pada level lima persen dalam rancangan anggaran tahunan BI (RATBI) 2024. “Tentu saja [pertumbuhan ekonomi] di tahun depan itu masih cukup baik sekitar lima persen,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin, 14 November 2023.

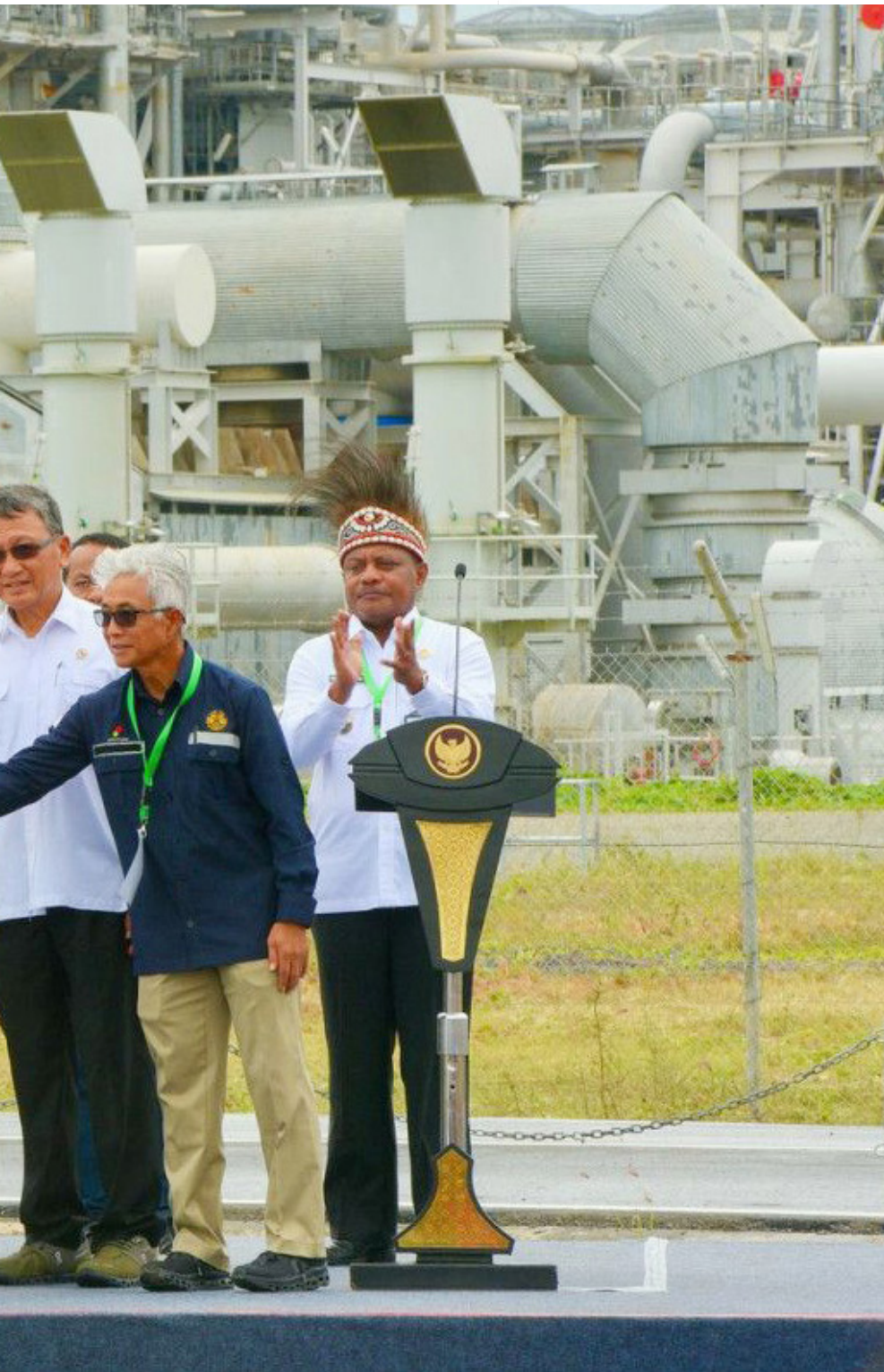


Pertumbuhan tahun 2024 akan naik didorong tetap baiknya keyakinan konsumen, serta positifnya pelaksanaan Pemilu 2024

Perry mengatakan pertumbuhan ekonomi pada 2024 terutama akan didukung oleh penguatan permintaan domestik seiring dengan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), penyelenggaraan Pemilu 2024, dan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sejalan dengan itu, Perry mengatakan bahwa laju inflasi pada 2024 diperkirakan terjaga dalam kisaran 1,5-3,5 persen, didukung oleh konsistensi kebijakan moneter serta eratnya strategi pengendalian inflasi antara BI dan pemerintah melalui TPIIP dan TPIDD, juga Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Lebih lanjut, Perry memperkirakan nilai tukar rupiah relatif stabil dan cenderung menguat sesuai dengan nilai



fundamentalnya pada 2024. Nilai tukar rupiah secara rata-rata diperkirakan berada pada level Rp15.510 per dolar AS, lebih tinggi dari 2023 yang diperkirakan secara rata-rata di level Rp15.280 per dolar AS.

Dia menambahkan bauran kebijakan BI akan terus diperkuat untuk mencegah stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang bergejolak. "Keseimbangan pencapaian tujuan antara stabilitas dan pertumbuhan ini kami tempuh dengan mengarahkan satu kebijakan yakni moneter tetap fokus pada stabilitas, tapi empat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan, yakni kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, dan juga pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah," kata dia.

Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mulai mencatat defisit pada Oktober 2023, setelah sembilan bulan mengalami surplus.

Menkeu menyebutkan, defisit APBN per Oktober 2023 mencapai Rp 700 miliar atau sebesar 0,003 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit APBN ini terjadi karena belanja negara yang sudah lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara.

Sedangkan realisasi pendapatan negara yang terdiri dari pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp 2.240,1 triliun per Oktober 2023, atau mencapai 90,9 persen dari target. Pendapatan negara ini juga tumbuh 2,8 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

Sementara itu, belanja negara baru tercatat Rp 2.240,8 triliun atau 73,2 persen dari pagu. Belanja negara ini mengalami kontraksi 4,7 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu. "Dengan posisi ini maka postur APBN sudah mulai defisit sebesar Rp 700 miliar atau sebesar 0,003 persen dari PDB," tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat, 24 November 2023

Toh meski APBN pada Oktober 2023 sudah mencatatkan defisit, keseimbangan primer masih tercatat surplus Rp 365,4 triliun. Keseimbangan primer merupakan selisih dari total pendapa-

tan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Jelas bahwa utang merupakan beban yang dapat mengurangi kekuatan ekonomi Indonesia.

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemerintah akan melakukan percepatan belanja di sisa dua bulan terakhir 2023. Selaras dengan percepatan belanja tersebut, APBN mulai mengalami defisit.

Ia optimistis APBN 2023 akan mencatatkan defisit di bawah 2,3 persen dari PDB. Outlook defisit APBN 2023 diperkirakan mencapai Rp 486,4 triliun atau 2,28 persen dari PDB, atau lebih rendah dari defisit APBN 2022 yang



**Dengan posisi ini
maka postur APBN
sudah mulai de-
fisit sebesar Rp 700
miliar atau sebesar
0,003 persen dari
PDB," tutur Sri Mul-
yani dalam konfe-
rensi pers**

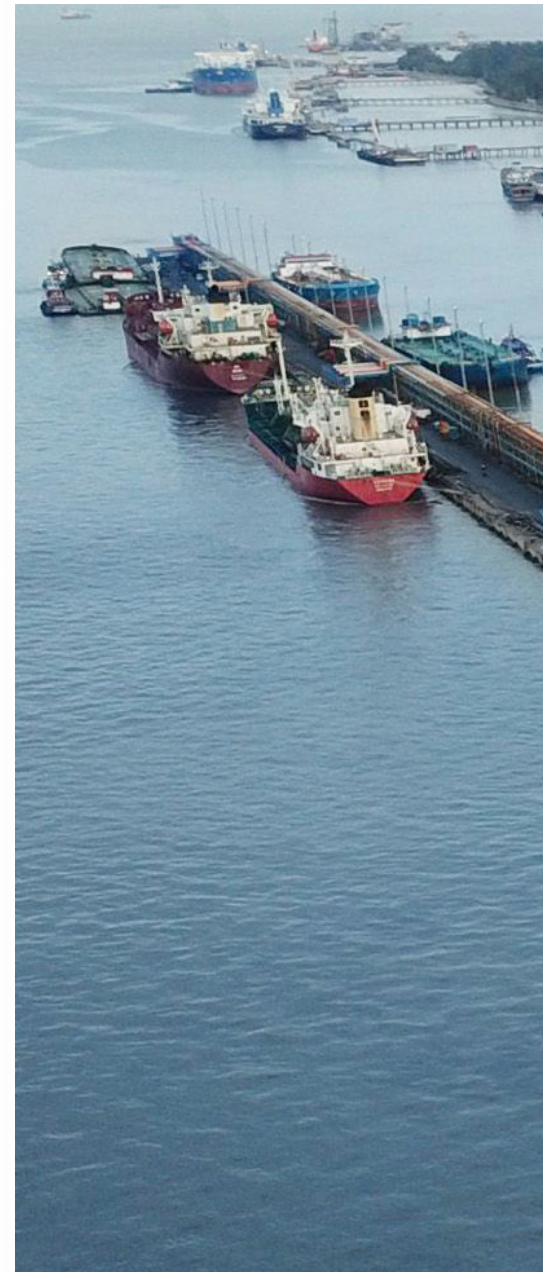
sebesar 2,35 persen atau Rp 460,4 triliun.

Kondisi akhir 2023 ini sebagiannya merupakan dampak dari dinamika perekonomian global. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) yang menerbitkan outlook (rangkuman perkembangan dan prediksi ke depan) ekonomi Indonesia 2024 menyebutkan, di tengah tren penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global, kinerja sektor eksternal Indonesia tetap kuat pada triwulan ketiga 2023.

Neraca perdagangan Indonesia terus mencatat surplus selama 41 bulan berturut-turut. Pada Triwulan-III 2023, surplus perdagangan mencapai USD3,42 miliar, turun dari USD7,8 miliar pada Triwulan-II 2023. Namun, surplus

perdagangan keseluruhan dari Januari hingga September 2023 tercatat sebesar USD27,8 miliar, lebih rendah dari surplus sebesar USD39,8 miliar dalam periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas global, terutama batu bara, nikel, dan minyak kelapa



sawit. Ini sejalan dengan laporan Bank Dunia, yang memperkirakan penurunan harga komoditas global sebesar -21,2 persen pada 2023 dibandingkan dengan 2022 akibat risiko perlambatan ekonomi global.

Berlanjutnya normalisasi harga setelah terjadinya lonjakan pada 2022 me-

mang menyebabkan penurunan nilai ekspor Indonesia pada 2023. Pada Triwulan-III 2023, ekspor hanya mencapai USD63,6 miliar, mengalami penurunan sebesar 18,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022. Perlambatan ekspor non-migas sebesar 19,2 persen (y.o.y) yang disebabkan

Toh meski kinerja ekspor melemah, neraca perdagangan tetap mengalami surplus karena terjadi penurunan impor pada Triwulan-III 2022. Nilai impor keseluruhan Indonesia turun sebesar 11,9 persen (y.o.y) dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022.

Lebih rinci, impor di sektor migas

impor non-migas dapat dijelaskan oleh kondisi ekspor yang lebih lemah akibat risiko perlambatan ekonomi global.

Tanda-tanda kinerja ekonomi yang lebih lemah telah mengurangi permintaan Indonesia terhadap bahan baku dan bahan bantu yang diimpor dari luar negeri pada 2023. Hal ini



oleh penurunan permintaan minyak kelapa sawit dari India akibat peningkatan stok CPO dan penurunan harga batu bara dibandingkan dengan harga dasar per 2022, merupakan salah satu kontributor terbesar dalam penurunan ekspor secara keseluruhan pada Triwulan-III 2023.

mengalami penurunan sebesar 21,2 persen (y.o.y), sementara impor non-migas turun sebesar 9,8 persen (y.o.y) pada Triwulan-III 2023 dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Penurunan impor migas disebabkan oleh penurunan harga minyak global, sementara penurunan

dipengaruhi oleh prospek ekonomi Tiongkok yang suram, manakala Negeri Panda itu merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia.

Meskipun surplus perdagangan terus berlanjut, jumlah surplus tersebut secara bertahap menurun. Surplus perdagangan yang lebih rendah pada

Januari-September 2023 mendorong neraca transaksi berjalan kembali negatif. Pada Triwulan-II 2023, neraca transaksi berjalan mengalami defisit sebesar USD1,9 miliar atau setara dengan 0,5 persen dari PDB, setelah pada triwulan sebelumnya mengalami surplus transaksi berjalan sebesar USD3,0 miliar atau 0,9 persen dari PDB. Selain menurunnya surplus perdagangan barang, defisit transaksi berjalan juga disebabkan oleh meningkatnya defisit

untuk pertama kalinya dari level nasional hingga kabupaten/kota; sehingga mendorong terjadinya injeksi likuiditas dalam jumlah besar ke perekonomian akibat adanya pengeluaran kampanye dan belanja publik,” ungkap laporan itu.

Besarnya dampak pengganda di perekonomian, sambung laporan yang sama, akan memicu konsumsi domestik selama 2024 mengingat pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan terjadi menjelang akhir ta-

tuk 2023 (5,0-5,1 persen). Di samping adanya risiko dari sisi domestik dan eksternal di waktu mendatang, Indonesia sejauh ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik selama paruh pertama 2023. Tumbuh sebesar 5,17 persen (y.o.y) di Triwulan-II 2023, PDB Indonesia saat ini dalam tren kenaikan yang didorong oleh berbagai faktor musiman.

Sebagai rekomendasi, LPEM FEB UI menyarankan ke depan, sangat pent-



perdagangan jasa.

Secara umum, LPEM FEB UI menyebutkan iklim politik dan kondisi moneter global akan menjadi dua tema utama yang akan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia di 2024. Periode Pemilu mendatang akan berdampak pada pertumbuhan dan berbagai indikator makroekonomi lainnya pada 2024. “Di satu sisi, Indonesia akan melaksanakan Pemilu Serentak

hun. Namun, di sisi lain, panjangnya periode transisi kekuasaan hingga pemerintahan baru menjabat akan memperpanjang periode sentimen ‘wait-and-see’ oleh sektor swasta dan berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Toh LPEM FEB UI melihat, PDB Indonesia akan tumbuh sebesar 5,1 persen (y.o.y) di 2024, cukup stabil dibandingkan revisi perkiraan lembaga itu un-

ing untuk menjaga stabilitas dari keyakinan konsumen, tingkat harga, dan nilai tukar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi jangka pendek di tengah berbagai potensi ketidakpastian. Poin ini tentu sangat relevan untuk tahun-tahun setelah pemerintahan berganti.

Lembaga think-tank ini juga mengingatkan, masalah vital pertama yang perlu diprioritaskan oleh pemerintahan mendatang adalah target pertumbu-

han ekonomi dan transisi iklim. Perihal pembangunan jangka panjang, Indonesia menargetkan untuk mencapai status 'negara berpendapatan tinggi' pada 2045. Untuk mencapai target ini, ekonomi Indonesia diestimasi perlu tumbuh sebesar enam persen selama 20 tahun atau tujuh persen selama 17 tahun.

Menimbang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini hanya berada di kisaran lima persen, Indonesia per-

depannya Indonesia harus menurunkan tingkat emisinya secara signifikan dan konsisten. LPEM FEB UI menyebut upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan target NZE dapat bersifat dikotomis (saling bertentangan).

Untuk mencegah dikotomi yang mengganggu itu, LPEM FEB itu menyarankan pemanfaatan bonus demografi, yang berarti meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif. Lembaga ini menyebut, se-

hal ini membutuhkan penduduk usia produktif tersebut untuk benar-benar produktif. Muncul kekhawatiran pada aspek produktivitas di Indonesia. Sejak memasuki era bonus demografi, isu pengangguran usia muda, tingkat pendidikan yang stagnan, dan rendahnya kualitas tenaga kerja belum mengalami perbaikan yang signifikan.

Akhirnya, Pemilu yang bersambung dengan Pilkada serentak pada 2024 justru menjadi ujian pertama untuk



lu mendorong mesin pertumbuhan ekonominya secara masif untuk mencapai level yang mencukupi agar berada dalam trayek pertumbuhan ke arah negara berpendapatan tinggi pada 2045. Di sisi lain, Indonesia juga telah menetapkan target yang sama ambisiusnya di jangka panjang, yaitu mencapai net zero emission (NZE) atau emisi nol bersih di 2060 atau lebih cepat. Target NZE ini mensyaratkan bahwa ke-

jak 2012, rasio ketergantungan di Indonesia mencapai angka di bawah 50, mengindikasikan jumlah penduduk usia produktif lebih besar ketimbang penduduk non-produktif (atau disebut juga masa bonus demografi) dan akan berlangsung setidaknya hingga 2035.

Memiliki jumlah penduduk yang besar dengan kapasitas menjadi produktif membuat Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang masif. Namun,

menghadapi, bahkan mengatasi kecenderungan negatif yang melekat pada perekonomian Indonesia. Jika berlangsung dengan riang gembira, ada harapan tata kelola negara dapat lebih fokus menghadapi tantangan dan hambatan bangsa ini di masa depan. Begitu sebaliknya: tahun politik yang kacau akan mengurangi kesempatan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang maju. •



TIMBAL BALIK EKONOMI DAN KEAMANAN

Kondisi perekonomian berhubungan timbal-balik dengan tingkat kerawanan, terutama keamanan dan ketertiban. Para pemangku kepentingan tampaknya sudah mengantisipasi berbagai kemungkinan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), misalnya, telah memetakan lima daerah yang dengan kerawanan tinggi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kelima daerah tersebut adalah Sulawesi Utara, Jawa Barat, Maluku Utara, DKI Jakarta, dan Papua.

"Sehingga terkait daerah-daerah tersebut perlu koordinasi dengan Mabes Polri. Sejauh ini ada Operasi Mantap Brata yang dilakukan oleh Polri serta memiliki indeks kerawanan sendiri yang dilakukan oleh teman-teman di

intelkam," ungkap Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dalam Dialog Publik dengan tema Pilpres 2024: Memperkuat Pemilu Damai dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju, di Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023.

Rahmat menambahkan, Bawaslu akan melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran di daerah-daerah rawan tersebut. Upaya tersebut antara lain melalui pengawasan melekat, pengawasan partisipatif, dan sosialisasi kepada masyarakat. "Kami akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait



untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengemukakan, situasi Pemilu 2024 berbeda dengan Pemilu 2019. Saat Pemilu 2019, rangkaian tahapan pemilu berentetan dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 berlanjut Pilkada 2018. Untuk Pemilu 2024, sambungnya, ketegangan yang sifatnya konflik dan kompetisi dalam pilkada tidak ada, karena pilkada serentak terakhir berlangsung pada 2020.

“Saat ini, situasi konflik hampir dikatakan tidak ada dalam konteks kompetisi dalam pilkada-pilkada. Ketegangan yang sifatnya konflik dan kompetisi dalam pilkada itu juga tidak ada. Ini menjadi faktor yang memengaruhi juga ketika memasuki tahapan Pemilu 2024,” ungkap Hasyim.

Selain itu, hari pemungutan suara

pada Pemilu 2024 nanti akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sekitar 35 hari setelah itu, sudah ada penetapan hasil pemilu secara nasional. Hasil pemilu legislatif di DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, akan dijadikan modal untuk pencalonan kepala daerah.

“Karena hasil pemilu tidak dapat diprediksi, kami meyakini partai-partai ini akan menahan diri dalam konteks kompetisi sehingga konfliknya tidak keras. Papol sama-sama menunggu hasil suaranya di DPRD untuk dijadikan modal syarat pencalonan pilkada,” ujarnya.

Sedangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan lembaga akan memberi perhatian khusus untuk mengamankan provinsi dan kabupaten/kota yang berpotensi konflik SARA hingga politik uang di pemilu.

“Berdasarkan indeks kerawanan pemilu Bawaslu, terdapat 5 provinsi dan 85 kabupaten kota berkategori

kerawanan tinggi. Serta berdasarkan indeks kerawanan pemilu tahap 3 Polri, terdapat 2 provinsi dan 1 kabupaten/kota berkategori sangat rawan,” pesan Kapolri pada jajarannya dalam apel Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Monas, Selasa, 17 Oktober 2023.

Bagi wilayah yang tergolong kerawanan tinggi dan sangat rawan, Kapolri memerintahkan para anggotanya mengantisipasi segera. “Sedangkan bagi wilayah lain jangan underestimate dengan tetap mempersiapkan pengamanan sebaik mungkin,” tandasnya.

Sigit meminta pula agar pemetaan potensi konflik sosial terus dilakukan detail di wilayah masing-masing pasukan. Ia juga memerintahkan konflik diselesaikan sampai akar.

“Selesaikan potensi konflik hingga ke akar masalah. Apabila terhadap konflik yang sedang mengganggu stabilitas Kamtibmas, pastikan peng-

gunaan muatan dilakukan tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas,” ujar dia.

Selain itu, Sigit meminta jajarannya memetakan daerah yang rawan bencana saat pemilu. Polri juga berkoordinasi dengan TNI, BNPB, BMKG, Basarnas dan stakeholder lainnya untuk memetakan daerah rawan sehingga bencana dapat dimitigasi.

an, hingga mendapat legitimasi dari masyarakat.

Kapolri mengimbau pula agar jajarannya mengantisipasi tindak terorisme selama rangkaian persiapan hingga Pemilu 2024 tuntas. “Terorisme juga harus menjadi perhatian serius. Pada Pemilu 2019, terdapat enam aksi serangan teror dan ini tidak boleh terjadi di Pemilu 2024. Terlebih saat ini perang antara Hamas dengan Israel

(IKP) 2024 dengan mendefinisikan kerawanan sebagai “segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan umum yang demokratis.” Jadi, bukan hanya faktor keamanan dan ketertiban saja, melainkan juga proses Pemilu dan Pilkada 2024 berdasarkan asas jujur dan adil sesuai dengan ranah kelembagaannya.

“Bawaslu menyusun IKP Pemilu



“Siapkan pula rencana antisipasi bekerja sama dengan penyelenggara Pemilu, apabila nanti terdapat situasi bencana alam di suatu daerah. Contohnya mempersiapkan fasilitas pencoblosan di lokasi-lokasi pengungsian,” lanjutnya.

Terkait tindak pidana pemilu, Kapolri meminta jajarannya mengedepankan koordinasi dan kolaborasi dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Menurutnya, penyelesaian tindak pidana pemilu harus dilakukan profesional, transpar-

sedang bereskalasi, hal ini dapat berdampak terhadap situasi di dalam negeri,” ujar Sigit.

“Optimalkan preventif strike agar pelaku teror bisa ditangkap sebelum melancarkan aksinya, sehingga kita bisa memastikan kita minimalkan, tidak ada letupan sekecil apa pun pada Pemilu 2024,” tandasnya.

Sementara kepolisian lebih menitikberatkan pada stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu

dan Pemilihan Serentak 2024 dengan menitikberatkan pada empat dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat,” ungkap Rahmat.

Keempat dimensi tersebut yaitu konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi dengan tiga tingkatan kerawanan: rendah, sedang dan tinggi. Melalui kategori-kategori tersebut, kata Rahmat, diharapkan Bawaslu dan pemangku kepent-

ingan lainnya dapat membuat dan mengambil intervensi terukur terkait kerawanan Pemilu yang terjadi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Tolok-ukur empat dimensi ini disusun berdasarkan catatan-catatan Pemilu dan Pilkada sebelumnya yang berlangsung sejak 2014. Untuk dimensi sosial politik, terdapat tiga determinan (pembentuk) yakni fungsi keamanan dan ketertiban, fungsi otoritas penyelenggara pemilu, dan fungsi otoritas penyelenggara negara. Sedangkan dalam dimensi penyelenggaraan pemilu determinannya adalah faktor-faktor yang melekat dengan gangguan terhadap pemilih seperti rintangan pelaksanaan hak memilih, praktik kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, dan fungsi pengawasan.

Dalam dimensi kontestasi, tercakup di dalamnya faktor-faktor yang melekat dengan gangguan terhadap aktor politik di daerah pemilihan. Antara lain pelaksanaan hak dipilih dan respon terhadap kampanye para calon. Sedangkan dimensi partisipasi mencakup gangguan atau rintangan terhadap partisipasi pemilih, baik secara perorangan maupun kelompok.

Bawaslu mencatat, meskipun DKI Jakarta tidak memiliki satupun dimensi dengan skor maksimum (100), provinsi ini menjadi provinsi paling rawan karena rerata terbobot dari keempat skor dimensinya paling tinggi. Persoalan pada dimensi kontestasi merupakan penyumbang terbesar bagi tingkat kerawanan pada provinsi DKI Jakarta. Soal kampanye dan politik uang mewarnai persoalan kontestasi dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Sebagaimana jamak diketahui, beberapa kasus materi kampanye bermuatan SARA, hoax dan kebencian kerap mewarnai kampanye media sosial pada masa-masa pemilu dan pemilihan gubernur. Bawaslu mengkategorikan beberapa kasus ini sebagai kasus dengan tingkat keseriusan tinggi.

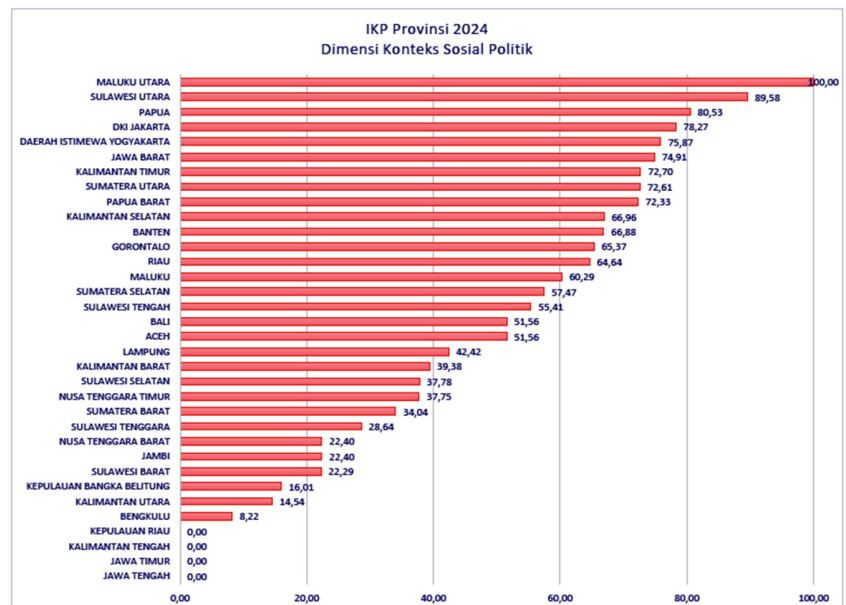
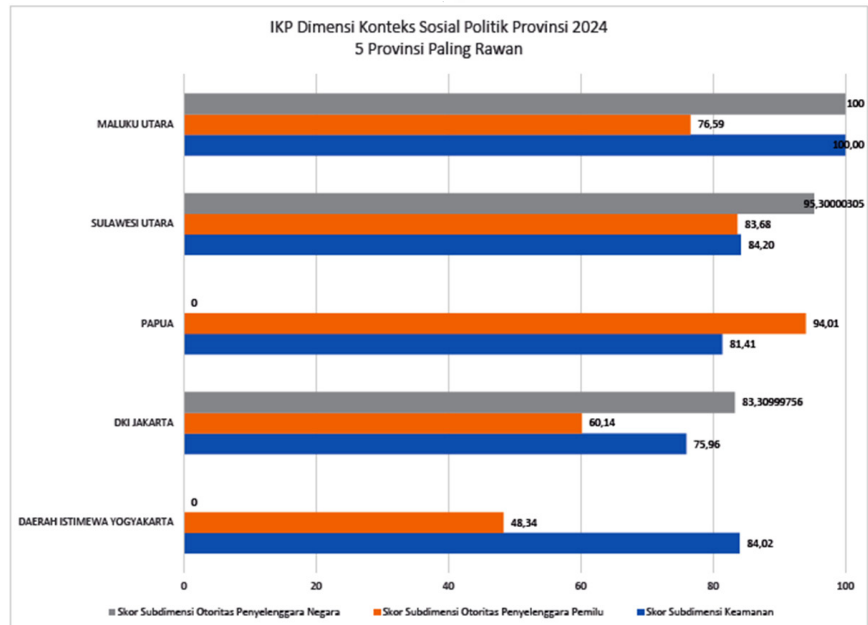
Di samping itu, terdapat sejumlah kasus money politics yang juga terpancui selama periode pemilu/pilgub di DKI Jakarta. Di samping itu, proses penyelenggaraan pemilu di DKI Jakarta juga diwarnai dengan sejumlah kasus

dengan tingkat keseriusan sedang dan tinggi.

Kasus-kasus ini terutama muncul di subdimensi pelaksanaan pemungutan suara (adanya komplain saksi, pemungutan dan penghitungan suara ulang, gugatan hasil dan sebagainya). Terakhir, DKI Jakarta juga mengalami persoalan dengan kerawanan partisipasi. Paling tidak terdapat sepuluh insiden/

Penyebabnya, di Sulawesi Utara terdapat kasus mobilisasi massa untuk menolak hasil pemilu sementara di DKI Jakarta ini tidak terjadi.

Catatan lain, Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan tingkat kerawanan dimensi penyelenggaraan pemilu paling tinggi. Provinsi ini mencatatkan ribuan kasus perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai



kasus mobilisasi pemilih tambahan dengan tingkat keseriusan rendah yang terpantau oleh Bawaslu.

Meskipun demikian, dibandingkan dengan Sulawesi Utara skor dimensi partisipasi DKI Jakarta lebih rendah.

ketentuan dengan tingkat keseriusan kasus sedang dan tinggi. Di samping itu, terdapat 51 kasus serius terkait dengan keterlambatan logistik pemilu, dan puluhan kasus lainnya yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran

ran pemilu, pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, pemungutan suara susulan dan ratusan catatan khusus dari pengawas.

Terakhir, Jawa Barat juga masuk dalam lima provinsi paling rawan lantaran dua dimensi, yakni penyelenggaraan pemilu dan kontestasi. Pada dimensi penyelenggaraan pemilu, beberapa kasus yang berhubungan dengan kehilangan hak pilih, pemilihan ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat, logistik pemilu (perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai ketentuan, perlengkapan/logistik yang terlambat dan tertukar), komplain dalam pemungutan dan penghitungan dan gugatan hasil masih menjadi catatan buruk yang membuat skor dimensi ini cukup tinggi.

Kerawanan pada dimensi kontestasi di Provinsi Jawa Barat disumbang terutama sekali oleh adanya sembilan kasus politik uang dengan tingkat keseriusan yang tinggi. Di samping itu, juga terdapat sejumlah kasus terkait pelanggaran kampanye seperti kampanye di luar jadwal, kampanye bermuatan sara dan kampanye hoax di media sosial.

Maluku Utara merupakan provinsi dengan skor dimensi sosial politik paling tinggi. Ini berarti dalam dimensi ini, provinsi Maluku Utara merupakan provinsi paling rawan.

Secara berturut-turut lima provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam dimensi sosial politik adalah Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta. Sedangkan lima provinsi dengan skor dimensi sosial politik terendah secara berturut-turut dari bawah adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kep. Riau dan Bengkulu.

D.I. Yogyakarta masuk dalam lima provinsi dengan IKP dimensi sosial politik tertinggi oleh sebab adanya persoalan dengan kondisi keamanan masa pemilu. Data Bawaslu memperlihatkan bahwa adanya beberapa insiden kekerasan berbasis SARA, kekerasan yang melibatkan tokoh publik, adanya intimidasi terhadap penyelenggara pemilu, dan adanya pengrusakan fasilitas pemilu.

Sedangkan Papua masuk sebagai daerah rawan oleh sebab persoalan terkait otoritas penyelenggara pemilu.

Data memperlihatkan adanya beberapa kasus putusan DKPP kepada jajaran KPU/dan atau Bawaslu dan rekomendasi Bawaslu terkait dengan perubahan suara pada proses rekapitulasi. Di samping itu, pemilu/pemilihan kepala daerah pada level provinsi di Papua ini juga diwarnai dengan adanya kerusuhan yang melibatkan tokoh publik/politik/aparat keamanan.

Alhasil, mengingat tahapan Pilpres dan Pemilu telah memasuki masa kampanye mulai 28 November 2023, dinamika politik di berbagai daerah akan berlangsung serentak dan ancaman kerawanan dapat muncul tanpa diduga tempat maupun waktunya. Akhirnya penegakan hukum yang adil dan transparan akan ikut menentukan.

Pada gilirannya, kerawanan dalam Pemilu akan bertimbal-balik dengan dinamika ekonomi. Penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil akan lebih mendorong dinamika ekonomi ke arah positif. Sebaliknya, ketika dinamika ekonomi di tahun politik tampak mengarah ke sisi positif, idealnya, Pemilu hendaknya berlangsung jujur dan adil secara optimal. ●



info indonesia www.infoindonesia.id

iNOVASI **UNTUK** NEGERI Network



Lautan
 informasi
 di dunia maya
 melalui jaringan
 internet
 memberikan
 banyak
 referensi
INFO
 kepada
 masyarakat
 Sumsel

Koran Cetak Info Indonesia




 www.infoindonesia.id


 facebook @infoindonesia.id
 
 twitter : @_infoindonesia


 Instagram @info_indonesia.id
 
 YouTube : infoindonesiatv

JAKARTA
 Jl. Raya Kalibata No. 8
 Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
 Email : redaksi@infoindonesia.id



**SIAPAPUN WAPRESNYA
JOKOWI TETAP
PEGANG KENDALI**